



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 965 -Diskominfo/2023

TENTANG

PROFIL RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang mengkaji risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tangerang.
- KEDUA** : Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. Pendahuluan;
 - b. Profil Pemerintah Kota Tangerang;
 - c. Penerapan SPBE Kota Tangerang;
 - d. Penerapan Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kota Tangerang;
 - e. Proses Pengelolaan Risiko SPBE; dan
 - f. Penutup.
- KETIGA** : Profil Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko-risiko SPBE guna menjaga keberlangsungan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 965 -Diskominfo/2023

TENTANG : PROFIL RISIKO SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

**PROFIL RISIKO
SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar	5
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	6
A. PENDAHULUAN	9
1. Latar belakang	9
2. Ruang Lingkup.....	10
3. Dasar Hukum	10
4. Definisi	12
B. PROFIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG	15
1. Umum.....	15
2. Visi dan Misi	15
3. Tujuan Pemerintah Kota Tangerang	15
4. Sasaran Strategis Kota Tangerang	16
5. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).....	16
C. PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA TANGERANG	18
1. Gambaran Umum Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Tangerang	18
2. Rencana Pengembangan Penerapan SPBE di Pemerintah Kota Tangerang	18
D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG ..	20
1. Pemahaman Organisasi terhadap Manajemen Risiko	20
2. Manajemen Risiko ISO 31000:2018.....	20
a. Prinsip Manajemen Risiko	20
b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko	22
c. Proses Pengelolaan Risiko	26
3. Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Organisasi	27
4. Penerapan Manajemen Risiko SPBE	27
E. PROSES PENGELOLAAN RISIKO SPBE	29
1. Penetapan Kriteria Pengelolaan Risiko SPBE	29
a. Kategori Risiko SPBE	29
b. Kriteria Kemungkinan Keterjadian Risiko SPBE	30
c. Kriteria Dampak Risiko SPBE	30
d. Peta Risiko SPBE.....	31
2. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko SPBE.....	32
3. Identifikasi Risiko SPBE	33
4. Analisis Risiko SPBE	35
5. Evaluasi Risiko SPBE.....	37
6. Penetapan Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Risiko SPBE	37



7. Penetapan Profil Risiko SPBE Strategis	39
8. Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan	42
F. PENUTUP	45



Daftar Tabel

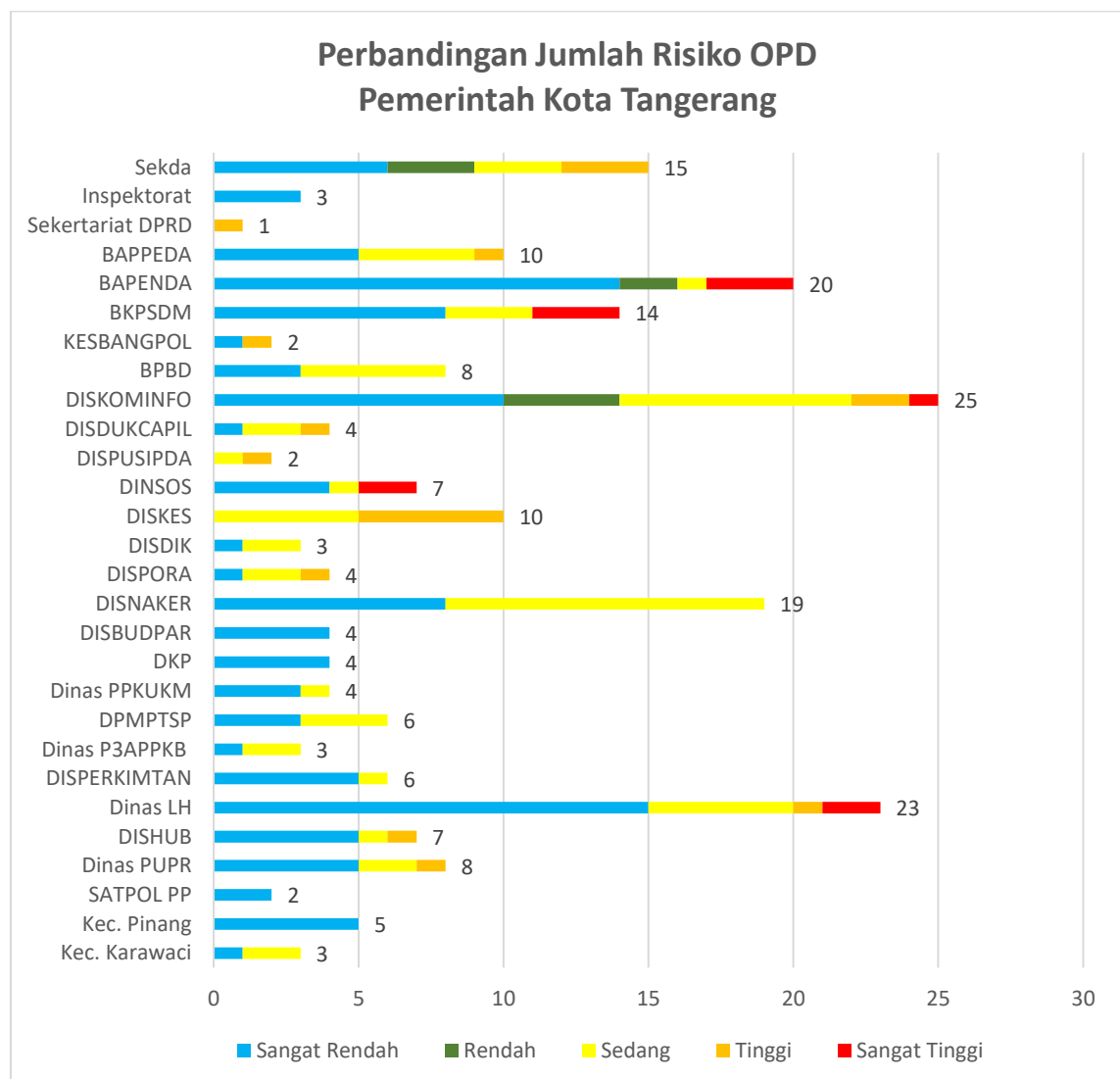
Tabel E-I Kategori Risiko SPBE	30
Tabel E-II Level risiko.....	32
Tabel E-III Area Dampak Risiko SPBE.....	33
Tabel E-IV Contoh Identifikasi Risiko	34
Tabel E-V Contoh Analisis Risiko.....	36
Tabel E-VI Contoh Evaluasi Risiko	37
Tabel E-VII Tabel Contoh Rencana Penanganan Risiko.....	39

Daftar Gambar

Gambar B-I Struktur Organisasi Kota Tangerang	17
Gambar D-I Kerangka Kerja Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018 Sumber: SNI ISO 31000:2018	22
Gambar D-II Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE	26
Gambar D-III Proses Manajemen Risiko	27
Gambar E-I Peta Risiko.....	32
Gambar E-II Agregasi Risiko	40

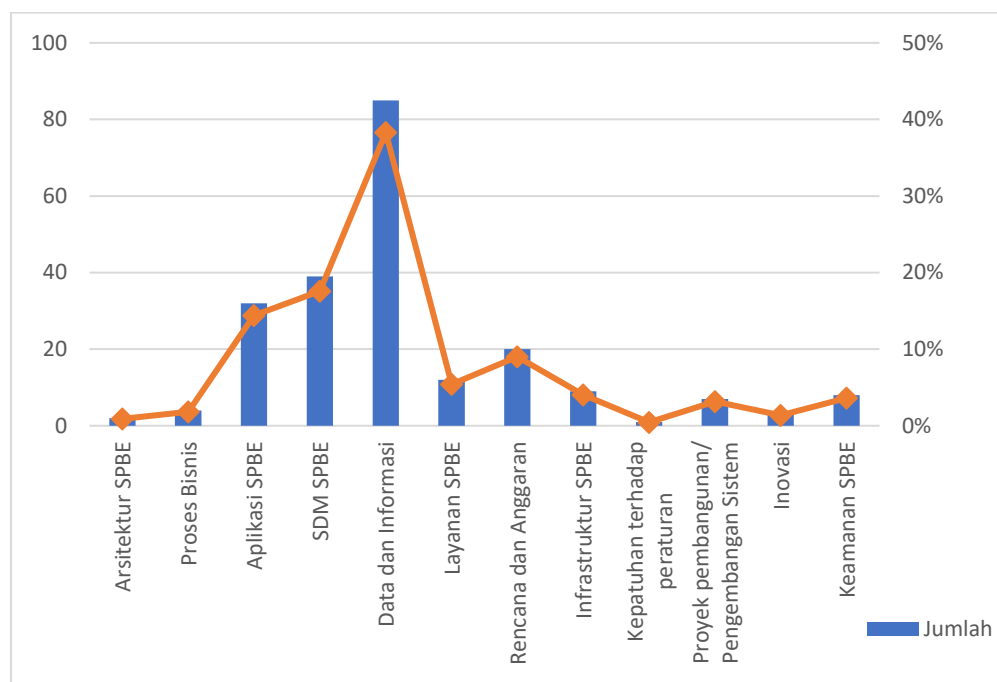
EXECUTIVE SUMMARY

Buku "Profil Risiko SPBE Kota Tangerang" merupakan sebuah laporan yang mengkaji risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tangerang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi risiko dilakukan dengan mengacu pada pendekatan analisis risiko berbasis kerangka kerja ISO 31000 serta menerapkan pedoman dan prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) No. 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan.



Melalui laporan ini, ditemukan beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan SPBE di Kota Tangerang. Adapun jumlah keseluruhan risiko yang telah teridentifikasi di seluruh OPD Pemerintah Kota Tangerang sebanyak 222 risiko, yang terdiri dari Level Risiko Sangat Rendah sebanyak 9 risiko (4,05%), Level Risiko Rendah sebanyak 118 risiko (53,15%), Level Risiko Sedang sebanyak 65 risiko (29,28%), Level Risiko Tinggi sebanyak 19 risiko (8,56%), dan Level Risiko Sangat Tinggi sebanyak 11 risiko (4,95%).

Beberapa di antaranya adalah risiko terhadap kerahasiaan dan integritas data, risiko keamanan jaringan, risiko kesalahan pengguna, dan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi.



Kategori Risiko	Jumlah	%
Arsitektur SPBE	2	0.90%
Proses Bisnis	4	1.80%
Aplikasi SPBE	32	14.41%
SDM SPBE	39	17.57%
Data dan Informasi	85	38.29%
Layanan SPBE	12	5.41%
Rencana dan Anggaran	20	9.01%
Infrastruktur SPBE	9	4.05%
Kepatuhan terhadap peraturan	1	0.45%
Proyek pembangunan/ Pengembangan Sistem	7	3.15%
Inovasi	3	1.35%
Keamanan SPBE	8	3.60%

Guna mengurangi risiko tersebut, laporan ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Pertama, laporan ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pengguna SPBE, baik bagi pengguna internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan secara rutin, memasang poster edukasi di area kerja, serta membuat panduan penggunaan yang jelas dan mudah dipahami.

Kedua, laporan ini menyarankan agar seluruh OPD di Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan SPBE. Pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan audit secara rutin,

memasang sistem keamanan jaringan, serta menerapkan mekanisme pengamanan akses dan otentikasi pengguna.

Ketiga, laporan ini merekomendasikan perluasan dan pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan risiko. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat membangun mekanisme pelaporan risiko secara terstruktur dan membuat sistem pemantauan risiko yang berkala.

Keempat, laporan ini menyarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan SPBE. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan kebijakan dan prosedur penggunaan SPBE, serta membuat dokumen penilaian risiko yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Terakhir, laporan ini menekankan pentingnya perluasan kerja sama antar unit kerja yang terkait dalam penggunaan SPBE. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat membangun forum koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja yang berfungsi sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, pengalaman, serta solusi terhadap risiko yang teridentifikasi.

Secara keseluruhan, laporan ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai potensi risiko keamanan dan privasi yang dapat terjadi dalam penggunaan SPBE di Kota Tangerang, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi risiko.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk mengatur dan memberikan pedoman mengenai manajemen risiko pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia saat ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan juga memperlihatkan adanya risiko yang harus diidentifikasi dan dikelola secara tepat agar tidak membahayakan keamanan informasi dan jaringan sistem pemerintahan.

Dalam peraturan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam manajemen risiko pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pertama, identifikasi risiko. Lembaga pemerintah harus melakukan identifikasi risiko secara sistematis dan komprehensif dengan melihat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Identifikasi risiko harus dilakukan secara terus-menerus dan harus mencakup risiko yang muncul dari sumber internal dan eksternal. Kedua, penilaian risiko. Lembaga pemerintah harus melakukan penilaian risiko dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk menilai tingkat risiko. Penilaian risiko harus dilakukan dengan objektif dan sistematis sehingga dapat menghasilkan tindakan mitigasi risiko yang tepat. Ketiga, mitigasi risiko. Lembaga pemerintah harus mengambil tindakan mitigasi risiko dengan memilih strategi yang tepat untuk mengurangi risiko atau dampak risiko yang teridentifikasi. Strategi mitigasi risiko yang tepat harus mempertimbangkan tingkat risiko dan dampaknya serta memperhatikan faktor biaya dan waktu. Keempat, pemantauan dan evaluasi risiko. Lembaga pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Pemantauan dan evaluasi risiko dapat membantu untuk mengevaluasi efektivitas dari tindakan mitigasi risiko yang telah dilakukan serta memberikan informasi yang tepat untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut.

Selain itu, peraturan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa setiap lembaga pemerintah harus memiliki tim manajemen risiko yang bertugas untuk melakukan manajemen risiko secara terus-menerus. Tim manajemen risiko harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam manajemen risiko dan harus dilengkapi dengan alat-alat dan sistem yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen risiko dengan efektif dan efisien.

Peraturan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2020 memberikan pedoman yang jelas dan rinci mengenai manajemen risiko pada sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ruang lingkup Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

- a. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
- b. Proses Manajemen Risiko SPBE;
- c. Struktur Manajemen Risiko SPBE; dan
- d. Budaya sadar Risiko SPBE.

Buku profil risiko SPBE Pemkot Tangerang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, serta penetapan rencana tindak lanjut pengelolaan risiko dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di wilayah Kota Tangerang. Buku ini juga membahas gambaran umum arsitektur SPBE Pemkot Tangerang, mekanisme pemantauan dan pelaporan, serta rencana pengembangan penerapan SPBE. Dalam penyusunan buku profil risiko ini, digunakan peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai acuan. Buku ini ditujukan bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tangerang melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Dasar Hukum

Adapun beberapa dasar hukum yang digunakan diantaranya:

- a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- b. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 - i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor

- 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
- j. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);
- k. Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 141);
- l. Perban BSSN Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE dan Standar Teknis & Prosedur Keamanan SPBE;
- m. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko SMKI versi 1.0 Nomor SMKI.PRO-008 Tanggal 2 September 2019.

4. Definisi

- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- b. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
- c. Risiko SPBE Positif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
- d. Risiko SPBE Negatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
- e. Kategori Risiko SPBE adalah pengelompokan Risiko SPBE berdasarkan karakteristik penyebab Risiko SPBE yang menggambarkan seluruh jenis Risiko SPBE yang terdapat pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Area Dampak Risiko SPBE adalah pengelompokan area yang terkena dampak dari Risiko SPBE.
- g. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE adalah besarnya peluang terjadinya suatu Risiko SPBE dalam periode tertentu.

- h. Kriteria Dampak Risiko SPBE adalah besarnya akibat terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasaran SPBE.
- i. Kriteria Risiko SPBE adalah parameter atau ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menentukan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dan Kriteria Dampak Risiko SPBE.
- j. Besaran Risiko SPBE adalah nilai Risiko SPBE yang dihasilkan dari proses analisis Risiko SPBE.
- k. Level Risiko SPBE adalah pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
- l. Selera Risiko SPBE adalah penentuan Besaran Risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diterima atau ditangani.
- m. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
- n. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- o. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
- p. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
- q. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
- r. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan Risiko dan dampak Risiko.
- s. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
- t. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.

- u. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
- v. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
- w. Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
- x. Pelaporan adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk laporan tertulis atau lisan.

B. PROFIL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Umum

Profil Pemerintah Kota Tangerang mencakup informasi tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memimpin, mengelola, dan menyelenggarakan pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah Kota Tangerang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan infrastruktur kota yang modern dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga aktif dalam menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Di dalam Pemerintah Kota Tangerang sendiri terdapat 51 kelurahan yang terbagi di 13 kecamatan, Pemerintah Kota Tangerang memiliki berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas, Badan, dan Kantor di bawah koordinasi Wali Kota. Pemerintah Kota Tangerang memiliki visi dan misi serta sasaran strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan di wilayahnya, yakni menjadikan Kota Tangerang sebagai kota yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kota Tangerang adalah *"Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya"*. Sedangkan misi Pemerintah Kota Tangerang adalah *memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, membangun infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, serta memelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya daerah*. Dengan visi dan misi ini, Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk menciptakan Kota Tangerang yang maju, sejahtera, dan berbudaya, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kota yang berdaya saing tinggi di Indonesia

3. Tujuan Pemerintah Kota Tangerang

Tujuan pemerintah Kota Tangerang adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah kota,

serta melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, swasta, dan organisasi kemasyarakatan.

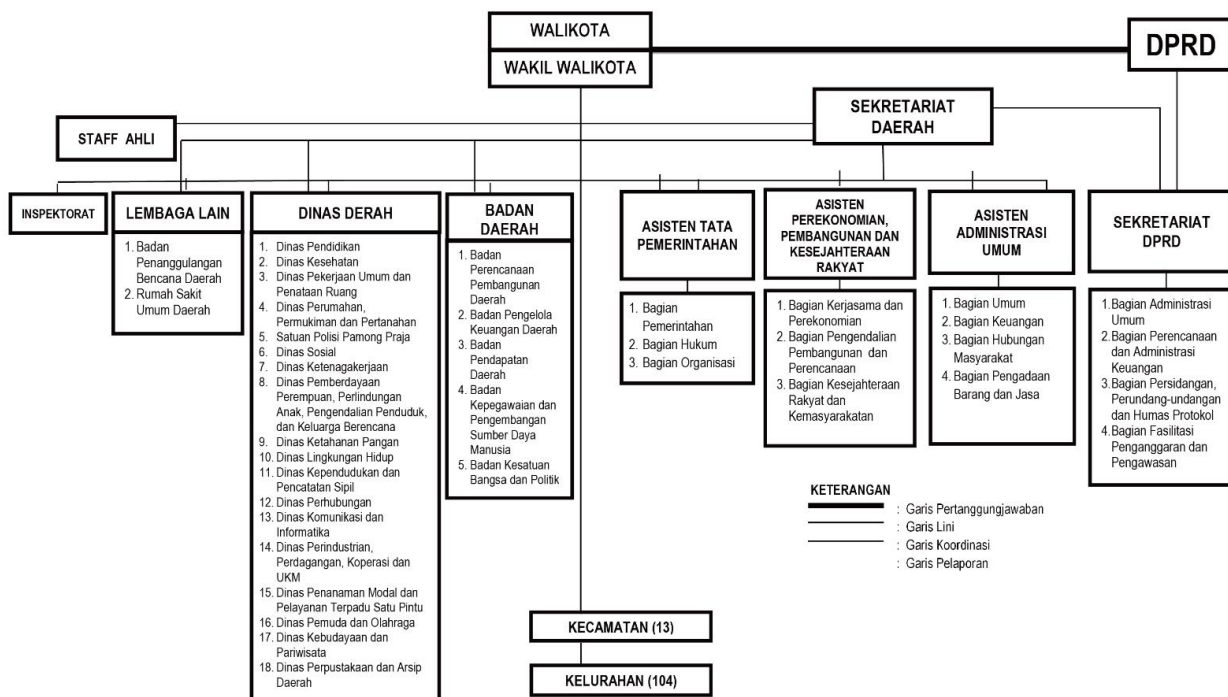
4. Sasaran Strategis Kota Tangerang

Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari beberapa hal, di antaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, memberikan akses yang mudah dan cepat untuk masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah kota juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor industri, pariwisata, dan pertanian, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Tangerang. Tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang baik untuk berinvestasi dan berusaha di Kota Tangerang.

5. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari berbagai unit kerja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Kota Tangerang memiliki 13 Kecamatan yang terdiri dari 104 Kelurahan. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari 3 unsur utama yaitu: 1) Walikota sebagai kepala pemerintahan, 2) DPRD sebagai lembaga legislatif dan 3) Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota. Selain itu, terdapat juga unit kerja lain seperti Badan, Dinas, dan Kantor yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, seperti Badan Kepegawaian, Keuangan, dan Pengelolaan Aset, Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Perumahan Rakyat, serta Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Melalui struktur organisasi yang efektif, diharapkan pemerintah kota dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warganya.

STRUKTUR ORGANISASI



File : SOTK Kota Tangerang 2020.DOC

Gambar B-I Struktur Organisasi Kota Tangerang

C. PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA TANGERANG

1. Gambaran Umum Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Tangerang

Arsitektur SPBE di Pemerintah Kota Tangerang mencakup tiga layer utama yaitu Layer Aplikasi, Layer Integrasi, dan Layer Infrastruktur. Layer Aplikasi meliputi aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menyediakan layanan-layanan publik secara *online*. Layer Integrasi digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang ada sehingga terjadi keterkaitan antar sistem. Sedangkan Layer Infrastruktur merupakan layer yang berisi server, jaringan komunikasi, *Storage*, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut.

Pemerintah Kota Tangerang memiliki kebijakan terkait manajemen risiko dalam penggunaan SPBE. Salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2024. Dalam perda ini, Pemerintah Kota Tangerang menetapkan strategi pengembangan pelayanan publik yang dilakukan secara digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga memedomani Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional di Pemerintah Kota Tangerang di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan SPBE berjalan dengan baik dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaannya.

2. Rencana Pengembangan Penerapan SPBE di Pemerintah Kota Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan merencanakan pengembangan dan perbaikan sistem yang sudah ada. Salah satu kebijakan terbaru terkait hal ini adalah Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengatur tentang kebijakan dan strategi pengembangan SPBE di Kota Tangerang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa program yang akan dikembangkan dalam rangka penerapan SPBE adalah pembangunan pusat data, pengembangan aplikasi *e-government*,



serta pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang juga berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengadopsi kebijakan *smart city*. Diharapkan dengan adanya pengembangan SPBE, pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, transparan, dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Pemahaman Organisasi terhadap Manajemen Risiko

Dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Tangerang, risiko yang muncul juga tidak dapat diabaikan. Risiko yang terkait dengan keamanan data dan informasi menjadi perhatian utama dalam penerapan SPBE. Oleh karena itu, pemahaman organisasi tentang manajemen risiko SPBE harus ditingkatkan agar Pemerintah Kota Tangerang dapat mengidentifikasi risiko yang muncul dan membuat langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat dalam penggunaan teknologi informasi. Pemahaman yang baik terhadap manajemen risiko dapat membantu Pemerintah Kota Tangerang dalam menyiapkan langkah-langkah pengamanan data dan informasi yang dapat mengurangi risiko kebocoran data atau serangan siber.

Selain itu, pemahaman organisasi terhadap manajemen risiko dalam penerapan SPBE juga dapat membantu Pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mengidentifikasi risiko yang muncul dan membuat pengendalian risiko yang tepat, Pemerintah Kota Tangerang dapat meminimalkan potensi kerugian dan kesalahan dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam hal ini, pemahaman organisasi tentang manajemen risiko sangat penting agar Pemerintah Kota Tangerang dapat menerapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan lebih efektif dan efisien..

2. Manajemen Risiko ISO 31000:2018

a. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko merupakan dasar dalam penerapan pengelolaan risiko dan harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko organisasi dan prosesnya. Tujuan manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai. Penerapan manajemen risiko diharapkan mampu meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Prinsip-prinsip manajemen risiko menurut SNI ISO 31000:2018, diantaranya:

1) Terintegrasi

Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Prinsip ini dapat diupayakan melalui komitmen manajemen puncak atau Pimpinan Kementerian untuk memastikan tersedianya kerangka kerja dan program manajemen risiko yang berkontribusi terhadap proses perencanaan strategi, penetapan anggaran, pelaksanaan strategi, dan pelaporan organisasi. Selain itu, tersedia juga kebijakan formal sebagai dasar instruksi yang menggambarkan dan mendokumentasikan hubungan antara sistem manajemen risiko dengan sistem manajemen lainnya.

2) Terstruktur dan Komprehensif

Penerapan manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap hasil aktivitas manajemen secara konsisten dan terstruktur. Prinsip ini dapat diupayakan melalui pemastian penentuan sasaran memenuhi kriteria *SMART-C* yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Time Bound* (batas waktu) dan *Challenging* (menantang).

3) Disesuaikan

Kerangka kerja manajemen risiko dan prosesnya dapat disesuaikan dan menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal organisasi terkait sasaran organisasi. Prinsip ini dapat diupayakan melalui adanya proses formal dalam penentuan konteks internal dan eksternal organisasi termasuk pemetaan keterlibatan dan/atau pengaruh pemangku kepentingan. Selain itu, kerangka kerja dan proses manajemen risiko dijalankan selaras dengan kebijakan formal yang relevan dan berlaku di organisasi, misal: Undang-Undang, Hukum dan Regulasi.

4) Inklusif

Kesesuaian waktu dan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, terkait dengan pengetahuan, pandangan, persepsi harus selalu dipertimbangkan. Hasil dari kegiatan ini ialah perbaikan kesadaran dan terinformasikannya kegiatan pengelolaan risiko.

5) Dinamis

Risiko yang dapat muncul, berubah dan hilang, seiring dengan perubahan konteks serta kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko harus bersifat antisipatif, mendeteksi, mengakui dan merespons terhadap perubahan tersebut.

6) Berdasarkan pada Informasi Terbaik yang Tersedia

Pelaksanaan Manajemen Risiko didasarkan pada masukan dan informasi berdasarkan data historis dan informasi saat ini dan juga harapan di masa mendatang.

7) Faktor Manusia dan Budaya

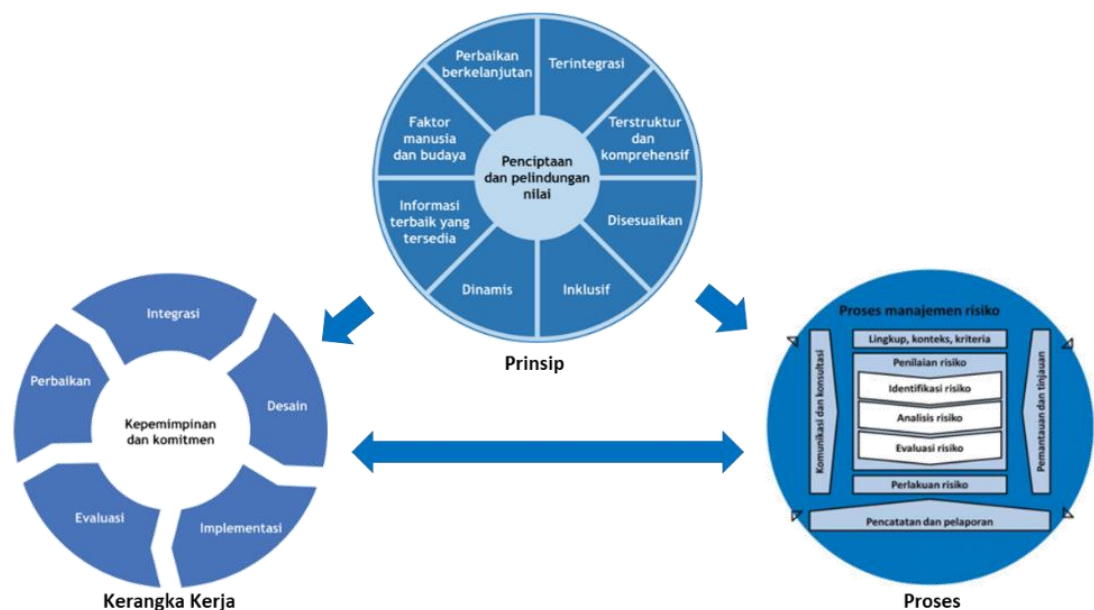
Perilaku manusia dan faktor budaya bisa secara signifikan memberi pengaruh terhadap seluruh aspek dalam manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi.

8) Perbaikan Berkesinambungan

Kegiatan manajemen risiko secara berkesinambungan diperbaiki melalui pembelajaran dan langkah terbaik yang harus diambil.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Keberhasilan manajemen risiko ditentukan pada efektivitas kerangka kerja manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks organisasi.



Gambar D-1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018
Sumber: SNI ISO 31000:2018

Tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam upaya penerapan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan baik, organisasi dapat mengadopsi secara langsung atau memodifikasi kerangka kerja manajemen risiko ini sesuai dengan konteks internal dan eksternal di lingkungannya masing-masing. Kerangka kerja yang diadopsi dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu SNI ISO 31000:2018. Kerangka kerja Manajemen Risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen puncak serta bagian pengawas memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan manajemen risiko telah terintegrasi dalam seluruh kegiatan organisasi dan harus memberikan contoh kepemimpinan dan komitmen yang konsisten. Manajemen puncak memiliki akuntabilitas dalam menjalankan Manajemen Risiko sehingga dapat membantu organisasi untuk:

- a) Menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.
- b) Menemukanali setiap kewajiban dan juga komitmen suka rela.
- c) Membangun sejumlah tipe risiko yang mungkin atau tidak untuk diambil dalam rangka pengembangan kriteria risiko, memastikan bahwa hal tersebut terkomunikasikan ke seluruh organisasi dan setiap pemangku kepentingan terkait.
- d) Mengkomunikasikan nilai dan keutamaan dari manajemen risiko untuk organisasi dan pemangku kepentingan terkait.
- e) Memajukan pendekatan sistematis untuk memonitor risiko
- f) Memastikan kerangka kerja manajemen risiko yang ada selalu sesuai dengan konteks dari organisasi.

Kemudian, bagian pengawas memiliki akuntabilitas dalam mengawasi kegiatan, maka sering kali bagian pengawasan diharapkan untuk:

- a) Memastikan bahwa risiko sudah dipertimbangkan secara cukup dalam merumuskan tujuan dan target organisasi.
- b) Memahami bahwa risiko merupakan hal yang harus dihadapi dalam rangka organisasi mencapai tujuannya.
- c) Memastikan bahwa terdapat sistem yang tersedia telah beroperasi dalam rangka mengelola risiko yang ada.
- d) Memastikan bahwa risiko yang ada telah sesuai dengan konteks dari tujuan organisasi.
- e) Memastikan bahwa setiap informasi terkait dengan risiko dan pengelolaannya secara tepat terkomunikasikan ke pihak terkait.

2) Integrasi

Secara umum integrasi ini ialah proses dan upaya dalam memastikan bahwa Manajemen Risiko menjadi proses yang tidak terpisahkan dari seluruh proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kerangka kerja integrasi adalah sebagai berikut:

- a) Mengintegrasikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi.
- b) Manajemen Risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan organisasi, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, tujuan dan sasaran, serta kegiatan operasional.
- c) Mengintegrasikan manajemen risiko kepada pemahaman terkait dengan struktur dan proses organisasi.
- d) Menentukan akuntabilitas dan peran pengawasan manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola yang dibutuhkan.
- e) Dengan adanya integrasi maka secara umum setiap insan organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola risiko.

3) Perencanaan Kerangka Kerja

Dalam merencanakan kerangka manajemen risiko, organisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap kondisi dan sifat organisasi serta konteks internal maupun eksternalnya.
- b) Mengartikulasikan bentuk komitmen terkait manajemen risiko.
- c) Menetapkan secara jelas peran, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas di dalam organisasi untuk kegiatan manajemen risiko.
- d) Alokasi sumber daya yang sesuai.
- e) Membangun proses komunikasi dan konsultasi.
- f) Implementasi.

4) Penerapan

Ketepatan bentuk dan penerapan kerangka kerja akan memastikan bahwa proses manajemen risiko akan menjadi bagian dari setiap aktivitas di seluruh organisasi termasuk dalam pengambilan keputusan serta berubah mengikuti perubahan konteks internal dan eksternal yang terjadi. Organisasi dapat menerapkan kerangka kerja Manajemen Risiko yang sudah dibentuk dengan cara:

- a) Membangun kesesuaian rencana termasuk waktu dan sumber daya.

- b) Mengidentifikasi berdasarkan 5(lima)W+1(satu)H terkait dengan keputusan yang akan dibuat.
 - c) Memodifikasi proses pengambilan keputusan apabila dibutuhkan.
 - d) Memastikan pengaturan pengelolaan risiko yang dibuat secara jelas dipahami dan dapat dilakukan.
 - e) Keberhasilan implementasi dari kerangka kerja membutuhkan keterlibatan dan kesadaran dari setiap pemangku kepentingan.
- 5) Evaluasi
- Dalam rangka pelaksanaan evaluasi efektivitas dari kerangka kerja maka organisasi perlu melakukan hal sebagai berikut:
- a) Mengukur kemajuan penerapan kerangka kerja manajemen risiko secara berkala dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, rencana, indikator dan budaya yang diharapkan.
 - b) Memastikan kesesuaian kerangka kerja dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.
- 6) Perbaikan Kerangka Kerja
- Proses perbaikan kerangka kerja harus memperhatikan
- a) Adaptasi yang harus selalu dimonitor oleh organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal untuk meningkatkan nilainya.
 - b) Perbaikan berkesinambungan, perusahaan harus selalu memperbaiki kesesuaian, ketepatan dan efektivitas dari kerangka kerja dan pola penerapan dan integrasi proses Manajemen Risiko.

Kerangka kerja manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam konteks organisasi. ISO 31000:2018 adalah standar internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko dan mencakup tiga tahap utama yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan penilaian risiko. Kerangka kerja ini membantu organisasi untuk memahami risiko yang dihadapi, mengembangkan rencana tindakan yang sesuai, dan memastikan bahwa manajemen risiko yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Melibatkan *stakeholder* yang terkait, seperti karyawan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, juga sangat penting dalam kerangka kerja ini untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi dapat dikelola secara efektif.

kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE yang menjelaskan elemen-elemen dasar yang digunakan sebagai dasar penerapan Manajemen Risiko SPBE di Kota Tangerang. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk membantu

integrasi Manajemen Risiko SPBE dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tangerang dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.

Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE sebagaimana terlihat pada Gambar D-II Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE.



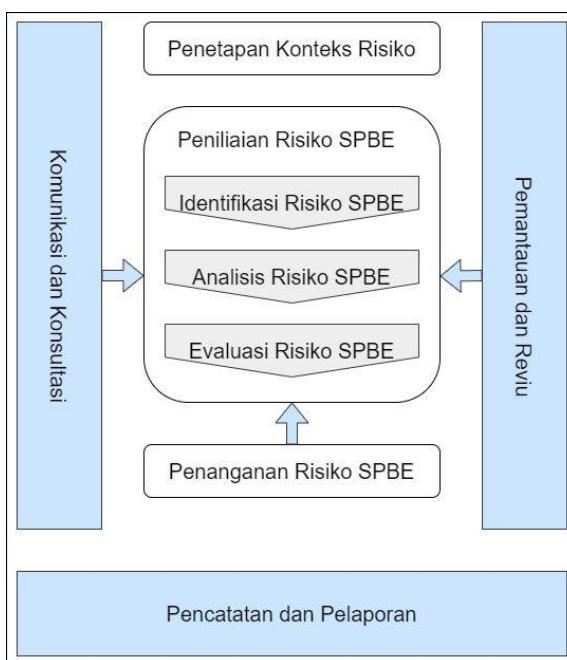
Gambar D-II Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE

c. Proses Pengelolaan Risiko

Proses pengelolaan risiko dalam kerangka kerja ISO 31000:2018 terdiri dari tiga tahap, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan penilaian risiko. Tahap identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dalam konteks organisasi, sedangkan tahap analisis risiko dan penilaian risiko bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi serta membuat keputusan tentang tindakan yang harus diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi. Dalam proses pengelolaan risiko, penting untuk melibatkan *stakeholder* yang terkait dan mengkomunikasikan temuan kepada mereka secara jelas dan terbuka untuk memastikan manajemen risiko yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi

risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reuiu, serta pencatatan dan pelaporan. Proses Manajemen Risiko SPBE diilustrasikan pada [Gambar D-III Proses Manajemen Risiko](#).



Gambar D-III Proses Manajemen Risiko

3. Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Organisasi

Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko organisasi adalah seperangkat panduan dan aturan yang mengatur cara organisasi melakukan manajemen risiko. Kebijakan dan pedoman ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Selain itu, kebijakan dan pedoman ini juga mencakup aturan mengenai tanggung jawab, kewenangan, serta komunikasi dan pelaporan tentang manajemen risiko. Dengan adanya kebijakan dan pedoman yang jelas dan terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa manajemen risiko yang dilakukan sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Kebijakan dan pedoman juga membantu dalam meminimalkan risiko yang terkait dengan kegiatan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* pada organisasi..

4. Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Penerapan Manajemen Risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Pemerintah Kota Tangerang adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Langkah-langkah yang diambil mencakup identifikasi dan analisis risiko, serta penilaian dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Selain itu, penerapan manajemen

risiko SPBE juga mencakup pengembangan rencana tindakan dan penerapan kontrol yang tepat untuk mengurangi risiko. Dengan menerapkan manajemen risiko SPBE, Pemerintah Kota Tangerang dapat meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi dan teknologi mereka, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta meminimalkan risiko terkait dengan penyalahgunaan informasi dan kebocoran data.

E. PROSES PENGELOLAAN RISIKO SPBE

1. Penetapan Kriteria Pengelolaan Risiko SPBE

Penetapan kriteria pengelolaan risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kota Tangerang adalah langkah krusial dalam menerapkan manajemen risiko. Kriteria pengelolaan risiko ini mencakup prosedur, teknik, dan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin terjadi di SPBE. Kriteria ini juga mencakup langkah-langkah untuk menentukan prioritas risiko, mengembangkan rencana tindakan dan kontrol yang tepat, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang dilakukan. Dengan penetapan kriteria pengelolaan risiko SPBE yang tepat, Pemerintah Kota Tangerang dapat memastikan bahwa manajemen risiko yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan kegiatan pemerintahan berbasis elektronik..

a. Kategori Risiko SPBE

Kategori risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kota Tangerang mencakup berbagai aspek yang harus dikelola dengan baik agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Beberapa kategori risiko yang perlu diperhatikan antara lain rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis, rencana dan anggaran, inovasi, kepatuhan terhadap peraturan, pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan/pengembangan sistem, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, layanan SPBE, SDM SPBE, dan bencana alam. Dalam mengelola risiko pada setiap kategori tersebut, Pemerintah Kota Tangerang perlu melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan dan peninjauan kembali risiko secara berkala agar dapat mengambil tindakan yang tepat dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi.

Kategori Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE meliputi:

Tabel E-I Kategori Risiko SPBE

No.	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE Nasional
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencana SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	SDM SPBE
16	Bencana Alam

b. Kriteria Kemungkinan Keterjadian Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE.

Kota Tangerang menggunakan 5 (lima) level yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 (lima) level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hampir Tidak Terjadi;
- 2) Jarang Terjadi;
- 3) Kadang-Kadang Terjadi;
- 4) Sering Terjadi;
- 5) Hampir Pasti Terjadi.

c. Kriteria Dampak Risiko SPBE

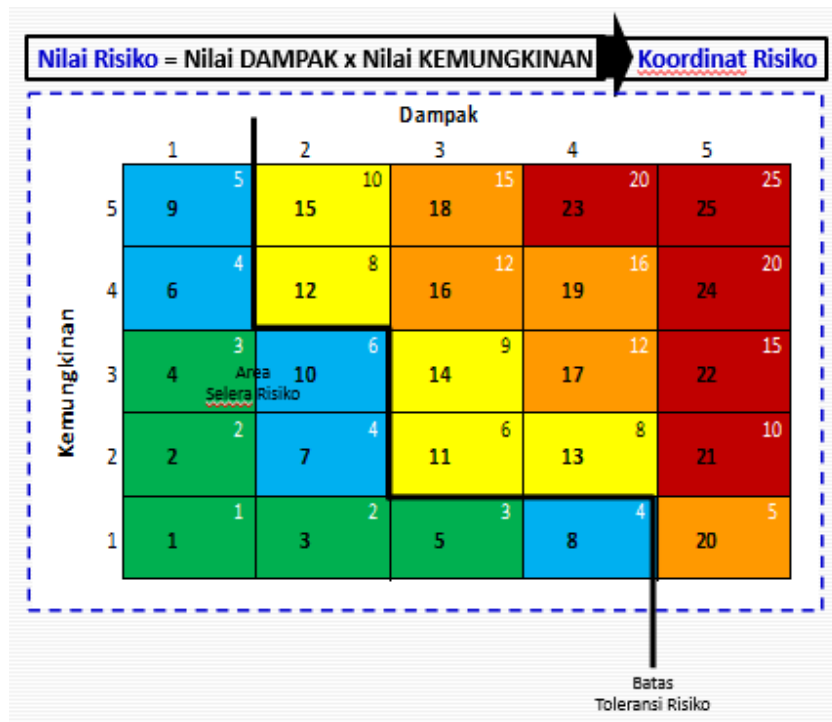
Kriteria Dampak Risiko SPBE dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE dan level dampak, Kriteria Dampak Risiko SPBE dijabarkan untuk setiap Area Dampak Risiko SPBE Negatif. Kota Tangerang

Menggunakan 5 (lima) level yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE. Untuk 5 (lima) level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak Signifikan;
- 2) Kurang Signifikan;
- 3) Cukup Signifikan;
- 4) Signifikan;
- 5) Sangat Signifikan.

d. Peta Risiko SPBE

Peta Risiko SPBE Pemkot Tangerang merupakan sebuah gambaran yang menyajikan daftar risiko yang telah diidentifikasi yang berisi level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan besaran risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Merujuk pada SNI ISO 31000:2018 tentang Manajemen Risiko yaitu nilai dampak dikali kemungkinan tetapi dikarenakan besaran risiko SPBE ini tidak dapat merepresentasikan warna nilai rentang besaran risiko, maka Pemerintah Kota Tangerang menyesuaikan lagi dengan titik koordinat. dimana hasil perkalian dampak x kemungkinan menghasilkan titik koordinat untuk merepresentasikan kompleksitas risiko SPBE. Di dalam Peta risiko ini juga terdapat Batas toleransi Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE, untuk prioritas risiko yang dapat ditangani lebih dahulu dari level risiko sedang, tinggi dan sangat tinggi sedangkan untuk level risiko yang masuk ke dalam Area Selera Risiko (sangat rendah, rendah) dikembalikan kepada pelaku risiko atau OPD terkait untuk di tangani atau tidak. Peta Risiko ini berguna sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang ada dan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Tangerang, untuk lebih detilnya bisa di lihat pada [gambar](#)



Gambar E-I Peta Risiko

Tabel E-II Level risiko

Level Risiko	Rentan Besaran Risiko	Keterangan Warna	
1	Sangat Rendah	1-5	
2	Rendah	6-10	
3	Sedang	11-15	
4	Tinggi	16-20	
5	Sangat Tinggi	21-25	

2. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko SPBE

Penetapan konteks pengelolaan risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemkot Tangerang dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan konteks internal serta eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini meliputi pengidentifikasian kebijakan, proses bisnis, tata kelola organisasi, standar, regulasi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang relevan. Dalam penetapan konteks pengelolaan risiko SPBE, diperlukan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan dan pengguna jasa SPBE untuk memastikan risiko dapat diidentifikasi dengan benar dan dikelola dengan tepat guna mencapai tujuan organisasi. Penetapan konteks ini menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko dan mengelola risiko pada seluruh aspek SPBE yang berada di bawah lingkup Pemkot Tangerang.

3. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE. Proses identifikasi risiko pada SPBE Pemkot Tangerang dilakukan dengan melihat potensi ancaman atau kejadian yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem. Identifikasi risiko menjadi dasar dalam pengambilan tindakan pencegahan meminimalisasi dampak buruk yang mungkin terjadi pada sistem ataupun layanan SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:

a. Jenis Risiko SPBE

Jenis Risiko Pemerintah Kota Tangerang adalah Negatif

b. Pristiwa Risiko / Kejadian

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut sebagai Risiko SPBE.

c. Penyebab

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Kota Tangerang. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani Risiko SPBE.

d. Kategori

Penentuan Kategori Risiko SPBE didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE. Terdapat 16 Kategori sesuai dengan [Tabel E-I Kategori Risiko SPBE](#).

e. Dampak

Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE.

f. Area Dampak

Penentuan Area Dampak Risiko SPBE didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area dampak terbagi menjadi 7 yaitu:

[Tabel E-III Area Dampak Risiko SPBE](#)

No.	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi

- 3 Kinerja
- 4 Layanan Organisasi
- 5 Operasional Aset TIK
- 6 Hukum dan Regulasi
- 7 Sumber Daya Manusia

Tabel E-IV Contoh Identifikasi Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO SPBE					
JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK
1	2	3	4	5	6
Negatif	Tidak bisa mengakses web	IP akses terblokir	Aplikasi SPBE	Tidak bisa membuka Web dan menghambat proses bisnis	Operasional dan Aset TIK
...
...

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Jenis Risiko SPBE yaitu "Positif" atau "Negatif". Risiko Positif yaitu peristiwa risiko yang dapat mempercepat pencapaian sasaran/program/kegiatan. Risiko Negatif yaitu peristiwa risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran/program/kegiatan. Catatan: dalam penyusunan kali ini, Pemerintah Kota Tangerang belum secara formal mengakomodir risiko yang bersifat "positif" dalam dokumen ini, akan tetapi jika ditemukan beberapa risiko yang bersifat "positif" atau peluang, tentunya hal tersebut akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
2. Diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dan berdampak menghambat/mempercepat pencapaian sasaran/program/kegiatan SPBE dan/atau indikator kinerja SPBE.
3. Diisi dengan uraian singkat suatu peristiwa yang menjadi pemicu/penyebab (akar penyebab) terjadinya peristiwa risiko. Dalam mengidentifikasi penyebab dapat menggunakan pendekatan 5M (*Man, Material, Machine, Method, Money*).
4. Diisi dengan 16 kategori risiko yang telah ditetapkan dalam Permenpan 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perwal 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, didasarkan pada penyebab terjadinya peristiwa risiko.
5. Diisi dengan uraian peristiwa dampak yang ditimbulkan jika peristiwa risiko benar terjadi. Uraian peristiwa dampak harus berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE yang telah ditetapkan.

6. Diisi dengan aspek-aspek yang terkena dampak 7 (tujuh) area. Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari peristiwa risiko. Area dampak dapat merujuk pada Permenpan 5 Tahun 2020 dan Perwal 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

4. Analisis Risiko SPBE

Dalam analisis risiko SPBE Pemkot Tangerang, dilakukan penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada dan diidentifikasi level kemungkinan serta level dampak dari setiap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dari hasil analisis, dilakukan penentuan besar risiko dengan menghitung perkalian level kemungkinan dan level dampak dari masing-masing risiko. Selain itu, dilakukan juga penilaian level risiko dengan mempertimbangkan besar risiko yang telah ditentukan sebelumnya serta kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengelolaan risiko yang efektif dan efisien. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi:

a. Sistem Pengendalian

- 1) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE.
- 2) Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko SPBE tersebut.

b. Level Kemungkinan

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE dalam satu periode yang dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE. Dan penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.

c. Level Dampak

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE yang dicocokkan dengan Kriteria Dampak Risiko

SPBE dan Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.

d. Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Penentuan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE didapat dari kombinasi Level Kemungkinan dan Level Dampak dengan menggunakan rumusan dalam Peta Risiko SPBE [Gambar E-I Peta Risiko](#)

Tabel E-V Contoh Analisis Risiko

ANALISIS RISIKO SPBE						
SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	LEVEL RISIKO
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
7	8	9	10	11	12	13
Mencoba menggunakan browser berbeda, Melakukan restart PC, bersihkan <i>cache</i> .	1	Sangat Jarang	5	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja lebih dari 1 Minggu	20	Sangat Tinggi
...
...

Petunjuk Pengisian:

7. Diisi dengan bentuk pengendalian (Kebijakan atau Standar Operasional Prosedur serta bentuk pengendalian lainnya) yang sudah ada dan dinyatakan relevan serta memadai dalam mengendalikan risiko.
8. Diisi sesuai dengan nilai skala kemungkinan (skala 1 s.d. skala 5) dapat merujuk pada Tabel Kriteria Kemungkinan yang ada di dalam Perwal 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
9. Diisi sesuai dengan penjelasan skala kemungkinan skala 1 s.d. skala 5 yang ada di dalam Perwal 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
10. Diisi sesuai dengan nilai skala dampak (skala 1 s.d. skala 5) dapat merujuk pada Tabel Kriteria Dampak yang ada di dalam Perwal 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
11. Diisi sesuai dengan penjelasan skala dampak skala 1 s.d. skala 5 yang ada di dalam Perwal 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

12. Diisi dengan besaran risiko merupakan perkalian sederhana antara nilai dampak dengan nilai kemungkinan (hasil perkalian kolom 13 dengan kolom 15).
13. Diisi sesuai level atau tingkat pada matriks peta risiko sesuai Perwal 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan/atau Permenpan 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemkot Tangerang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko. Setelah diperoleh besaran risiko, dilakukan evaluasi apakah risiko tersebut memerlukan penanganan atau tidak dengan memberikan keputusan "Ya" atau "Tidak". Selain itu, dilakukan juga penentuan prioritas risiko dengan mempertimbangkan besaran risiko, tingkat dampak, dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang memerlukan penanganan mendapat prioritas yang tepat dan tindakan yang diambil dapat efektif dalam mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut.

Tabel E-VI Contoh Evaluasi Risiko

EVALUASI RISIKO SPBE	
KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO SPBE (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
14	15
Ya	1
...	...
...	...

Petunjuk Pengisian:

14. Diisi dengan keputusan penanganan risiko "Ya" atau "Tidak", dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah dilakukan serta memperhatikan besaran risiko berdasarkan selera dan toleransi risiko.
15. Diisi dengan hasil perankingan dari nilai atau tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil.

6. Penetapan Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Risiko SPBE

Setelah evaluasi risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemkot Tangerang dilakukan, langkah selanjutnya adalah penetapan rencana tindak lanjut pengelolaan risiko. Rencana tindak lanjut ini berisi keputusan

terhadap risiko yang akan ditangani dan prioritas risiko yang harus diatasi. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi risiko dan meminimalkan dampaknya. Rencana tindak lanjut harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Hal ini juga harus diiringi dengan waktu yang jelas, bertanggung jawab siapa, serta tindakan apa yang akan diambil. Rencana tindak lanjut ini harus diperbarui secara berkala dan dievaluasi untuk memastikan keefektifannya dalam mengatasi risiko yang teridentifikasi. Proses untuk memodifikasi risiko, khususnya dalam hal menurunkan nilai risiko. Adapun penetapan rencana tindak lanjut pengelolaan risiko dapat berupa beberapa bentuk aktivitas sebagai berikut:

a. Eskalasi Risiko.

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko ke unit kerja yang lebih tinggi.

b. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko.

c. Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko.

d. Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran.

e. Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

Dalam memilih opsi penetapan rencana tindak lanjut pengelolaan risiko, memungkinkan tidak mencapai hasil keluaran yang diharapkan dan dapat memberi konsekuensi yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu, pengendalian perlu

menjadi bagian integral dalam implementasi penetapan rencana tindak lanjut pengelolaan risiko untuk memberi kepastian bahwa berbagai bentuk penanganan risiko menjadi dan tetap efektif. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam merancang kegiatan pengendalian penanganan risiko:

- a. Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pengendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisasi risiko.
- b. Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probabilitas terjadinya risiko maupun mengurangi dampak risiko.
- c. Selain itu, juga perlu diperhatikan ada/tidaknya pengendalian alternatif (*compensating control*) yang dapat mengurangi terjadinya risiko.
- d. Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada, namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kegiatan pengendalian yang baru/merevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada.
- e. Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengelola risiko.

Kegiatan penanganan risiko dituangkan dalam tabel berikut:

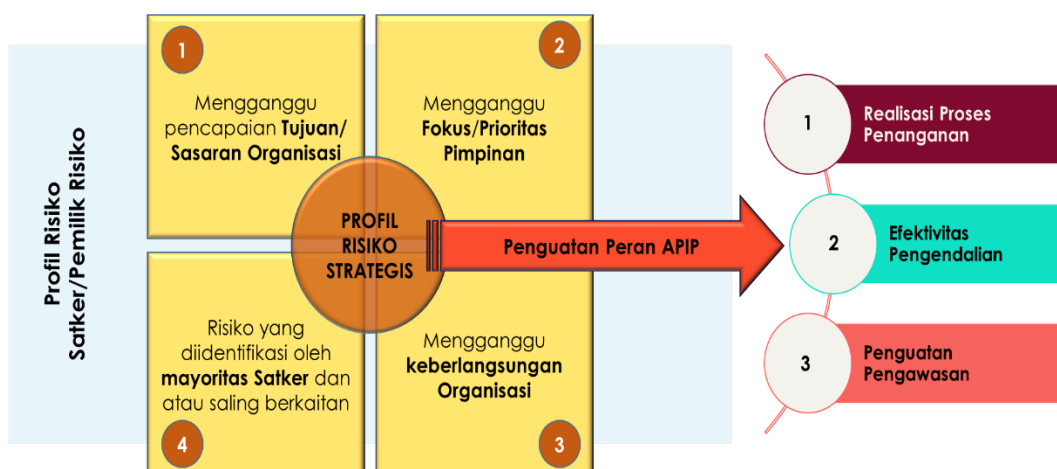
Tabel E-VII Tabel Contoh Rencana Penanganan Risiko

NO	Pemilik Risiko	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
			OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB	Biaya/ Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Badan Pendapatan Daerah									
1	BAPENDA	Tidak bisa mengakses web karena IP akses terblokir	Penghindaran Risiko	gunakan VPN untuk mengakses web yang terblokir	Penambahan sistem untuk mengelola web	Tahun anggaran berjalan	BAPENDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
...

7. Penetapan Profil Risiko SPBE Strategis

Setelah seluruh *risk register* (daftar risiko) telah disusun dan dikompilir oleh setiap pemilik risiko (OPD) untuk dijadikan Profil Risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemkot Tangerang, yang dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi risiko yang memiliki dampak strategis terhadap tujuan organisasi dan kemampuan dalam mencapainya. Profil risiko strategis dapat menjadi landasan dalam merancang strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien. Dalam penetapan profil risiko strategis SPBE, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti visi dan misi organisasi, arah kebijakan, sumber daya yang tersedia, potensi ancaman dan peluang, serta dampak dari risiko

tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan penetapan profil risiko strategis yang tepat, diharapkan organisasi dapat lebih siap menghadapi risiko-risiko strategis yang ada dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Maka langkah selanjutnya Pemerintah kota Tangerang dapat menentukan Profil Risiko SPBE Strategis yang disusun bertujuan untuk memudahkan unsur pimpinan Pemerintah Kota Tangerang dalam memperhatikan risiko-risiko yang sifatnya penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tangerang dan menjadi fokus prioritas pimpinan. Secara sederhana, mekanisme penentuan Profil Risiko Strategis dapat dilihat dari gambar bagan berikut beserta penjelasannya



Gambar E-II Agregasi Risiko

Profil Risiko Strategis disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengganggu pencapaian Tujuan/ Sasaran Organisasi

Risiko merupakan dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Maka, tujuan/ sasaran organisasi menjadi acuan dalam melakukan pemetaan risiko. Peristiwa risiko yang mengganggu pencapaian tujuan/ sasaran organisasi merupakan peristiwa risiko yang nilai/ level risikonya berada diluar dari batas toleransi risiko. Dalam arti, peristiwa risiko yang bernilai sedang, tinggi dan sangat tinggi kemungkinan besar dapat mengganggu pencapaian tujuan/ sasaran organisasi apabila tidak dilakukan mitigasi risiko. Oleh sebab itu, profil risiko yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang selanjutnya dapat diagregasi peristiwa risikonya yang bernilai diluar dari batas toleransi risiko untuk selanjutnya dilakukan analisis lebih mendalam untuk menentukan profil risiko strategis.

b. Mengganggu Fokus Prioritas Pimpinan

Setelah profil risiko diagregasi terhadap peristiwa risiko yang bernilai diluar dari batas toleransi, selanjutnya pemilik risiko perlu mempertimbangkan apakah risiko tersebut dapat mengganggu fokus prioritas pimpinan

c. Mengganggu keberlangsungan organisasi

Setiap peristiwa risiko yang telah dijadikan profil risiko oleh pemilik risiko merupakan peristiwa yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi. Namun yang menjadi perhatian adalah terdapat peristiwa risiko yang masih dapat diterima oleh organisasi dan terdapat peristiwa risiko yang perlu dilakukan penanganan lebih lanjut sebab dampaknya menimbulkan hal yang negatif bagi keberlangsungan organisasi. Dalam hal ini, peristiwa risiko yang perlu dilakukan penanganan perlu menjadi pertimbangan pemilik risiko untuk dapat lebih diperhatikan oleh unsur pimpinan dan seluruh perangkat organisasi.

d. Risiko yang diidentifikasi oleh Mayoritas Pemilik Risiko (OPD)

Setelah peristiwa risiko yang bernilai diluar dari batas toleransi dikompulir oleh pemilik risiko. Selanjutnya peristiwa risiko tersebut dianalisis oleh pemilik risiko, analisis tersebut dapat mempertimbangkan risiko-risiko apa saja yang mayoritas dipetakan oleh Pemilik Risiko (OPD) yang bernilai sedang, tinggi dan sangat tinggi (diluar batas toleransi). Sehingga timbul kesimpulan faktor/ peristiwa apa saja yang dapat menghambat keberlangsungan organisasi serta tercapainya sasaran dan indikator kinerja organisasi.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik risiko dengan melakukan *Foccus Group Disscusion* (FGD) yang dihadiri oleh seluruh elemen organisasi termasuk unsur pimpinan didalamnya bersama-sama menentukan profil risiko strategis organisasi dan berkomitmen dalam menjalankan realisasi proses penanganan.

Berdasarkan agregasi yang telah dilakukan oleh pemilik risiko dengan memperhatikan peristiwa risiko yang berada diluar dari batas toleransi risiko. Maka, disusun Profil Risiko Strategis Pemerintah Kota Tangerang sebagai berikut:

PROFIL RISIKO SPBE Kota Tangerang						
Unit Pemilik Risiko					: BPKPSDM	
Periode Penerapan					: September – Agustus 2024	
NO.	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN INTERN SAAT INI	RENCANA PENANGANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kompetensi Aparatur	informasi jejak rekam digital pengembangan kompetensi tidak lengkap per individu ASN	kurang update data rekam jejak pengembangan kompetensi tidak disertai upload sertifikat yang dimiliki per individu ASN	Rendahnya nilai komposit IP ASN dari Pengembangan Kompetensi ASN (PNS dan PPPK)	Koordinasi dan korespondensi dengan OPD terkait.	penyusunan aplikasi SIM DIKLAT ASN

8. Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Mekanisme pemantauan dan pelaporan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemkot Tangerang sangat penting untuk memastikan bahwa semua risiko teridentifikasi dan ditangani dengan tepat. Pemantauan dilakukan secara teratur untuk memantau efektivitas rencana tindak lanjut dan mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Laporan risiko juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak terkait mengetahui perkembangan terbaru dalam pengelolaan risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Dengan adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan yang baik, SPBE Pemkot Tangerang dapat meminimalkan dampak risiko dan memastikan kelancaran operasional sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Proses pemantauan merupakan proses untuk memastikan bahwa *risk assessment* dan *risk treatment* telah berjalan memadai dan efektif. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Sedangkan pelaporan risiko berisikan atas tersedianya profil risiko dari setiap OPD yang dilaporkan secara berkala atau sesuai kebutuhan dengan menampilkan eksposur risiko secara keseluruhan kepada unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko SPBE di Kota Tangerang. Pelaporan atas penerapan Manajemen Risiko di Kota Tangerang sebagai Pemilik Risiko disampaikan setiap akhir tahun dengan maksimal waktu pelaporan pada minggu ke-4 (empat) Bulan Desember periode anggaran berjalan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko.

1. Pemantauan Risiko

Pemantauan dan reuiu terhadap pengelolaan risiko dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan usulan perbaikan

telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan risiko. Pelaksanaan pemantauan meliputi:

- a. Pengendalian rutin terhadap realisasi penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan.
- b. Pemantauan terhadap efektivitas semua langkah dalam penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko.
- c. Pemantauan dan/atau reviu dilakukan secara periodik setiap triwulan, semester, tahunan, atau sewaktu-waktu (insidental) atau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam satu periode tahun anggaran.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan reviu SPBE dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan koordinasi DISKOMINFO Pemerintah Kota Tangerang.
- e. Keluaran dari pemantauan dan reviu yang dilakukan yaitu Laporan Hasil Pemantauan dan Reviu Pengelolaan Risiko.

Terdapat beberapa jenis pemantauan yang dilakukan oleh organisasi, diantaranya:

- a. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan ini dapat dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko atau pelaksana proses Manajemen Risiko.
- b. Pemantauan oleh Atasan
Pemantauan ini dilakukan oleh setiap atasan baik di level organisasi eselon I dan eselon II secara periodik untuk memastikan tidak adanya kejutan berupa risiko baru yang tidak teridentifikasi dan semua pengendalian serta perlakuan risiko tetap efektif.
- c. Pemantauan Pihak Ketiga
Pemantauan ini dilakukan oleh Pihak Ketiga yang independen terhadap Organisasi.

2. Pelaporan Risiko

Pencatatan dan pelaporan penting dilakukan oleh organisasi untuk memastikan hal-hal berikut ini namun tidak terbatas pada:

- a. Mendukung pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan dan manajemen puncak, serta di setiap pemilik risiko dalam organisasi sesuai dengan hierarki tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- b. Memastikan proses pengelolaan risiko dilakukan sesuai tahapan secara efektif dan efisien.

- c. Mendukung laporan akuntabilitas Pimpinan dan manajemen puncak, terutama dalam pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam pemastian pencapaian sasaran strategis atau tujuan di level Pimpinan.
- d. Menyediakan informasi berkala yang terbuka bagi pemangku kepentingan yang relevan.

Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. **Pencatatan dan Pelaporan Periodik**
Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan. Pencatatan dan pelaporan periodik dapat dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) periode anggaran.
- b. **Pencatatan dan Pelaporan Insidental**
Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan atau arahan Pimpinan.

Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Risiko yang meliputi pelaporan tingkat OPD, berisikan terkait dengan:

- a. **Laporan Profil Risiko OPD**
Profil risiko OPD merupakan hasil identifikasi risiko dari OPD ditambah dengan hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh OPD. Laporan profil risiko OPD disusun, ditetapkan dan disampaikan oleh setiap OPD kepada Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
- b. **Laporan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko OPD**
Laporan Penanganan/Mitigasi Risiko OPD memuat informasi mengenai rencana penanganan untuk risiko-risiko yang membutuhkan penanganan/mitigasi dan pemantauan realisasi penanganan/mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Laporan penanganan/mitigasi risiko OPD disusun oleh OPD dan memuat masukan dari masing-masing OPD. Laporan Penanganan/Mitigasi Risiko OPD ditetapkan dan disampaikan oleh OPD kepada Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

F. PENUTUP

Demikianlah profil risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Tangerang yang telah disusun dan dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Tujuan dari penyusunan profil risiko ini adalah untuk membantu pemerintah Kota Tangerang dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan dalam berbagai aspek pelayanan publik. Profil risiko ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan langkah-langkah pengelolaan risiko yang tepat guna dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga keamanan serta keandalan sistem SPBE di Kota Tangerang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

WALIKOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 965 –Diskominfo/2023

TENTANG : PROFIL RISIKO SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko SPBE

1.1 Formulir 2.1 Informasi Umum

Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nama UPR SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
	Fungsi UPR SPBE	Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
		Pengelolaan UPT; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG	Nama UPR SPBE	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tangerang
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan, Visi, Misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
		Penatausahaan Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Pengkoordinasian dalam Penyusunan Perencanaan Badan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
BADAN PENANGGULANGANG BENCANA DAERAH	Nama UPR SPBE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Tugas UPR SPBE	Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
		Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
		Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
		Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
		Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
		Menyusun pedoman pembentukan BPBD
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, serta efektif dan efisien; dan		
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nama UPR SPBE	Badan Pendapatan Daerah
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB sesuai dengan visi, misi dan program Walikota.
	Fungsi UPR SPBE	Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB;
		Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang PBB dan BPHTB;		
	Pengolahan data dan informasi;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pelayanan PBB dan BPHTB;
		Penagihan Pajak Daerah;
		Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan BPHTB;
		Penyelenggaraan koordinasi pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
		Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemungutan PBB dan BPHTB;
		Pengelolaan UPT; dan
		Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama UPR SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
		Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;	
	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pengelolaan UPT; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nama UPR SPBE	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
		Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
		Pelaksanaan ketatausahaan Badan;
Pengelolaan UPT; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nama UPR SPBE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan,



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
		Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
		Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIM USAHA KECIL DAN MENENGAH	Nama UPR SPBE	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Tugas UPR SPBE	Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;		
	Pengelolaan UPT; dan	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Nama UPR SPBE	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan dan Dekorasi Kota yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan;
Pengelolaan UPT; dan		
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.		
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS KESEHATAN	Nama UPR SPBE	Dinas Kesehatan
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
		Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;		
		Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pengelolaan UPT Rumah Sakit Daerah
		Pengelolaan UPT; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN	Nama UPR SPBE	Dinas Ketahanan Pangan
	Tugas UPR SPBE	Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wa kota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketahanan pangan;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketahanan pangan;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketahanan pangan;
	Pengelolaan UPf; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya	
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS KETENAGAKERJAAN	Nama UPR SPBE	Dinas Ketenagakerjaan
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;		



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
		Pengelolaan UPT;
		Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan.
Periode Waktu		September 2023 – Agustus 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama UPR SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tugas UPR SPBE	Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
		Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Persandian;
		Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang statistik;
		Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan infomatika;
		Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian;
		Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik;
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan infomatika
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik
Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;		
Pengelolaan UPT; dan		



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Pelaksanaan tugas lain yang dibelikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Nama UPR SPBE	Dinas Lingkungan Hidup
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan Hidup;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
Pengelolaan UPT; dan		
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nama UPR SPBE	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang kepemudaan dan Olahraga ;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang kepemudaan dan Olahraga;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan Olahraga;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
		Pengelolaan UPT
	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya	
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS PENDIDIKAN	Nama UPR SPBE	Dinas Pendidikan
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pendidikan ;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pendidikan:
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang pendidikan;
Pengelolaan UPT	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya	
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS PERHUBUNGAN	Nama UPR SPBE	Dinas Perhubungan



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan ;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perhubungan:
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perhubungan;		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Nama UPR SPBE	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah ;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perpustakaan dan kearsipan:
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perpustakaan dan kearsipan;		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
		Pengelolaan UPT
		Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Nama UPR SPBE	Dinas Perumahan, Permukiman an Pertanahan
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman:
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Pengelolaan UPT		
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nama UPR SPBE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tugas UPR SPBE	Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asasotonomidan tugas perbantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		Memberi dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
	Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Melaksanakan ketatausahaan Dinas
		Mengelola UPT. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
DINAS SOSIAL	Nama UPR SPBE	Dinas Sosial
	Tugas UPR SPBE	Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang sosial;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang sosial;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
		Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang sosial;
Pengelolaan UPT; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	Nama UPR SPBE	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlingungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan urusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, dan pengendalian penduduk. .



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
		Pengelolaan UPT; dan
	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.	
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama UPR SPBE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tugas UPR SPBE	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
		Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
		Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
Pengelolaan UPT; dan		
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
INSPEKTORAT	Nama UPR SPBE	Inspektorat



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
	Tugas UPR SPBE	Membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota
	Fungsi UPR SPBE	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
		Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
		Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat;
		Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
		Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
		Pelaksanaan Administrasi Inspektorat; dan
Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan Lingkup Tugas dan Fungsinya.		
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
KECAMATAN PINANG	Nama UPR SPBE	Kecamatan Pinang
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
	Fungsi UPR SPBE	Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
		Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
		Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
		Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
		Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
Pembinaan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;		
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;		



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE		
	Informasi Umum		
		Pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
KECAMATAN KARAWACI	Nama UPR SPBE	Kecamatan Karawaci	
	Tugas UPR SPBE	Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota	
	Fungsi UPR SPBE		Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
			Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
			Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
			Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
			Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
			Pembinaan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
			Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
			Pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nama UPR SPBE	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Tugas UPR SPBE	Menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.	
	Fungsi UPR SPBE		Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan perundang undangan;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
		Penyelenggaraan penegakan dan pengawasan di bidang Produk hukum daerah;
		Penyelenggaraan operasi dan pengendalian terhadap pelanggaran perundang undangan daerah; dan
		Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan bahan hukum;
		Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
	Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024
SEKERTARIAT DAERAH	Nama UPR SPBE	Sekretariat Daerah
	Tugas UPR SPBE	Membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
	Fungsi UPR SPBE	Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
		Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
		Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada pemerintah daerah; dan
	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Nama UPR SPBE	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Tugas UPR SPBE	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.1 Informasi Umum Terkait UPR SPBE	
	Informasi Umum	
Fungsi UPR SPBE		Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
		Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
		Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Periode Waktu	September 2023 – Agustus 2024	

1.2. Form 2.2 Sasaran SPBE

Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Meningkatkan tata kelola kepegawaian dan pelatihan	Meningkatkan pengelolaan profil dan kinerja ASN secara berkelanjutan dan <i>update</i>	Indeks profesional ASN	91	IP ASN akan mencakup empat instrumen, yakni (1) kualifikasi, (2) kompetensi, (3) disiplin (etika), (4) kinerja.
				Indeks Kompetensi Aparatur	26	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
	2	Terwujudnya Kinerja dan Disiplin Aparatur		Terwujudnya Kinerja dan Disiplin Aparatur	78.9	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG	1	Meningkatnya Kerukunan dan Toleransi Masyarakat dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.	Meningkatkan pengelolaan profil dan kinerja ASN secara berkelanjutan dan update	Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA)	32	
				Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	86.37	
				Prosentase Ormas Aktif	100	
				Prosentase penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan	14.29	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Mengelola Indeks Risiko Bencana dengan mendata Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Indeks Resiko Bencana	95.2	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	Meningkatkan Penerimaan PBB dan BPHTB	Mengelola Laporan dan informasi terkait	Tingkat kenaikan potensi pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB	100%	
				Tingkat penyelesaian berkas yang masuk sesuai standar (tepat waktu)	100%	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
				Tingkat penyelesaian laporan Evaluasi Penerimaan PAD, keberatan dan pengendalian PBB dan BPHTB	100%	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah	Mengelola informasi Perencanaan Pembangunan	Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	95	
				Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100	
				Nilai Rata-rata AKIP OPD	79.45	
	2	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah dan kualitas pelaksanaan perencanaan	Mengelola Monitoring dan evaluasi	Tingkat kualitas dalam perencanaan	100	
				Persentase indikator sasaran dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (PD)	100	
				Nilai Rata-rata AKIP Bappeda	83.3	
	3	Terwujudnya Penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	Mengelola informasi Perencanaan Pembangunan	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	100	
4	Mewujudkan penyelenggaraan	Mengelola manajemen informasi pengadaan	Persentase nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) diatas 85	85		



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
		pemerintahan daerah yang berkualitas		Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah	100	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Mengelola Keuangan daerah dan sistem informasi	Opini BPKD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	
				Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	WTP	
	2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah		Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	Tepat	
				Ketepatan waktu penyampaian APBD	Tepat	
				Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Daerah	Tepat	
	3	Meningkatnya kinerja pelayanan dan pencapaian target penerimaan pajak daerah lainnya		Realisasi Pajak Daerah Lainnya	0.823	
				Indeks Kepuasan Pelayanan	85.83	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Meningkatnya Kualitas Dokumentasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengelola dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online	Persentase Penduduk ber-KTP	99.86	
				Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100	
				Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	
				Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	100	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE						
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIM USAHA KECIL DAN MENENGAH				Persentase Anak ber Akta Kelahiran	98		
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	50		
				Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan Update	100		
				Persentase Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	43		
	1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Mengelola Layanan dan informasi	Nilai PDRB	147.34		
				Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB Kota Tangerang	62		
				Nilai PDRB Sektor (ADHK) Perdagangan	17.19		
		2		Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Indeks pengeluaran (daya beli)	147.3	
					3	Meningkatnya Sektor Industri Yang Berdaya Saing	Nilai PDRB Sektor (ADHK) Industri



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
	4	Meningkatnya perekonomian masyarakat		Laju inflasi	3.5	
	5	Meningkatkan Koperasi dan UMKM berdaya saing		Rasio jumlah Koperasi yang sehat	44.34	
	6	Meningkatkan Koperasi dan UMKM berdaya saing		Rasio jumlah usaha mikro yang berkembang	1.58	
	7	Meningkatkan Koperasi dan UMKM yang maju		Rasio jumlah koperasi yang meningkat omsetnya terhadap total jumlah koperasi	88.43	
				Rasio jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya terhadap total jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	2.37	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Meningkatnya pelestarian kesenian dan benda-benda bersejarah di daerah	Mengelola Informasi Secara Online	Jumlah kesenian daerah yang lestari	10	
				Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	100	
	2	Meningkatnya pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan	1,652,147	
				Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	1.95	
DINAS KESEHATAN	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Mengelola Informasi tentang kesehatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan	84 (B)	
				Cakupan penduduk kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	95	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
	2	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat		Prevalensi balita gizi kurang	7.50	
				Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100	
DINAS KETAHANAN PANGAN	1	Menurunnya Kerawanan pangan daerah	Mengelola informasi Ketahanan Pangan	Persentasi Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan	1.26	
		Meningkatnya Keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan		Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)konsumsi	88.7	
	2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Perikanan serta mengembangkan Urban Farming		Laju inflasi kelompok bahan manakanan	3.5	
		Terwujudnya ketersediaan pangan daerah/masyarakat		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	96.5	
DINAS KETENAGAKERJAAN	1	Meningkatkan Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja	Mengelola Informasi dan Job fair secara Online	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7.54	
				Jumlah Lowongan Kerja	18000	
				Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	81.88	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
DINAS KOMINFO	1	Meningkatkan pelayanan Publik Berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mengelola Aset TIK dan Informasi berbagai aplikasi di Kota Tangerang	IKM terhadap pelayanan publik berbasis TIK	82.74	
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Persentase Penggunaan Aplikasi	100	
				Persentase pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang digunakan oleh Pemkot Tangerang	94.87	
				Persentase pemanfaatan regulasi TIK	100	
				Persentase pemanfaatan dan pengamanan infrastruktur TIK	100	
	3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan statistik untuk mendukung kebijakan publik		Persentase data statistik daerah kota	89.8	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.93	
				Tingkat Pengelolaan Sampah	100	
	2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan		Indeks kualitas air (IKA)	51.42	
				Indeks kualitas udara (IKU)	71.5	
				Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	44.02	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1			Prosentase SDM Kepemudaan Yang Berprestasi(%)	100	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
		Meningkatkan Pemuda Berwirausaha Baru	Mengelola Informasi dan dataterkait SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga	Prosentase Wirausaha Muda (%)	100	
				Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana (%)	100	
				Indeks Kompetensi Aparatur	26	
	2	Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi (atlet)	150	
				Prosentase SDM Keolahragaan Yang Berkompeten (%)	100	
				Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dikembangkan (%)	100	
DINAS PENDIDIKAN	1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Mengelola Informasi terkait Disdik	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK/RA/Sederajat	75.1	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108.63	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	106.93	
	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	
				Nilai Rata-rata Nilai UAS SD/MI	75.86	
				Nilai Rata-rata Nilai UAS SMP/MTs	66.25	
				Nilai Rata-rata Paket A	75.86	
				Nilai Rata-rata Paket B	66.25	
				Nilai Rata-rata Paket C	66.25	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
DINAS PERHUBUNGAN	1	Menurunnya Kemacetan	Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas Perhubungan	Prosesntase titik kemacetan yang tertangani	100%	
	2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum		Terpenuhinya jumlah kapasitas Angkutan Umum Sistem Transit	2555	
	3	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas		Rasio Kecelakaan Lalu Lintas	0,000227	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan	Mengelola Perpustakaan Online dan mendigitalisasi kegiatan manual	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan public bidang perpustakaan dan kearsipan (point)	80.61	
	2	Meningkatnya kesadaran dan kegemaran membaca		Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (point)	135	
	3	Terwujudnya kearsipan berkualitas		Persentase skpd yang telah menerapkan arsip secara baku (orang)	100	
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Menurunnya lingkungan permukiman kumuh dan meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas Perumahan dan Pertanahan	Luas lingkungan permukiman kumuh	13.03	
				Persentase rumah layak huni	0.998	
	2	Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah		Persentase tingkat cakupan layanan air bersih	28.16	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
				Persentase tingkat cakupan layanan pengolahan air limbah domestik	99.81	
	3	Meningkatnya kualitas bangunan yang laik fungsi		Persentase bangunan yang laik fungsi	1000	
	4	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan		Persentase pemetaan bidang tanah bersertifikat milik pemda	4.23	
	1	Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Mengelola laporan, jadwal dan informasi Dinas PUPR	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)	89.1	
				Nilai hasil evaluasi SAKIP	B	
	2	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan		Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	94.79	
				Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik	99.3	
				Menurunnya banjir dan genangan		



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
				Prosentase Penurunan luas banjir dan genangan	45.62	
				Meningkatnya kualitas penataan ruang		
				Luas kesesuaian pemanfaatan ruang	15605.63	
DINAS SOSIAL	1	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial PMKS	Mengelola data secara Online	Persentase Penurunan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	5.47	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Menurunnya perempuan keluarga miskin	mengelola informasi tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan keluarga miskin	3,250	
	2	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase Kota Layak Anak	85.00%	
	3	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB		Cakupan Kesertaan Ber-KB	77.34%	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Meningkatnya Investasi Daerah	Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas DPMPSTP	Tingkat Pertumbuhan Investasi Daerah	5	
				Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	9.67	
	2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	
				Presentase Pelayanan Berdasarkan SOP	98.36	
INSPEKTORAT	1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Mengelola Informasi terkait Inspektorat dan audit di Kota Tangerang	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindak lanjuti	100	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tingkat Maturitas SPIP Level 4	Level 4	
				Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tangerang		Persentase Nilai SAKIP OPD Minimal BB	100	
KECAMATAN PINANG	1	Terwujudnya tata kelola kecamatan yang baik	Mengelola dan menampilkan sistem informasi terkait Kecamatan Pinang		84.18	
				Meningkatnya pelayanan umum kecamatan dan kelurahan	100	
KECAMATAN KARAWACI	1	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	Mengelola dan menampilkan sistem informasi terkait Kecamatan Karawaci	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	87.47	
	2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	100	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Mengelola informasi terkait Satpol PP	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100	
	1			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.83	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.2 Sasaran SPBE					
	No.	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE	Catatan
SEKERTARIAT DAERAH		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Digitalisasi dokumen, mengelola inventaris dan informasi	Nilai PMPRB pada 4 Area Perubahan	23.56	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	90	
	2	Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial		Prosentase bahan kebijakan yang menjadi kebijakan daerah	52.63	
				Prosentase analisis kajian kebijakan yang menjadi bahan kebijakan daerah tepat waktu	95	
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Mengelola Web Profil DPRD	Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan pelayanan Sekretariat DPRD	77.8	



1.3 Form 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
		Kepala Bidang Mutasi Aparatur
		Kepala Bidang Pembinaan Aparatur
		Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		UPT Penilaian Kompetensi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
		UPT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Kepala Bidang Sarana Prasarana Bencana
		UPT Damkar Cibodas
		UPT Damkar Ciledug
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pelayanan
		Kepala Bidang Pendataan Verifikasi dan Pengolahan Data
		Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian
		Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian
		UPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan
		Kepala Bidang Perencanaan Sosial Masyarakat dan Ekonomi
		Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan
		Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Anggaran
		Kepala Bidang Penataan dan Akuntansi
		Kepala Bidang Administrasi Aset
		Kepala Bidang Pendapatan Lainnya
		UPT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang PIA dan Pemanfaatan Data
		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIM USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Perindustrian



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Perdagangan
		Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha mikro
		UPT
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Kebudayaan
		Kepala Bidang pariwisata
		Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota
		UPT
DINAS KESEHATAN	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Kesehatan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
		Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
		UPT
DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan
		Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan
		Kepala Bidang Pertanian
		UPT
DINAS KETENAGAKERJAAN	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Ketenagakerjaan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Kepala Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas
		UPT
DINAS KOMINFO	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian
		Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Kepala Bidang pengembangan eGovernment
		Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		UPT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang tata Lingkungan
		Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup
		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
		UPT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Kepemudaan
		Kepala Bidang Olahraga
DINAS PENDIDIKAN	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Pendidikan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI)
		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP/MTs)
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
DINAS PERHUBUNGAN	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Perhubungan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi
		Kepala Bidang Angkutan
		Kepala Bidang Lalu Lintas
		Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pengembangan dan Kepegawaian
		Kepala Bidang Perpustakaan
		Kepala Bidang Kearsipan
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kepala Bidang Bangunan
		Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Pengawasan, Pelayanan Bangunan dan Pertanahan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Perencanaan Teknis
		Kepala Bidang Bina Marga
		Kepala Bidang Tata Air
		Kepala Bidang Tata Ruang
		Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan
		UPT
DINAS SOSIAL	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Sosial
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Pnevuluhan dan Penggerakan
		Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
		UPT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemilik Risiko SPBE	Inspektur
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	INSPEKTUR PEMBANTU I
		INSPEKTUR PEMBANTU II
		INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT		INSPEKTUR PEMBANTU IV
	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kepala Bidang Bangunan
		Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah
	Kepala Bidang Pengawasan, Pelayanan Bangunan dan Pertanahan	
KECAMATAN PINANG	Pemilik Risiko SPBE	Camat



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Seksi Tata Pemerintahan
		Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
		Seksi Ekonomi Pembangunan
		Seksi Pelayanan Umum; dan
		Seksi Kemasyarakatan;
		Kelompok Jabatan Fungsional.
KECAMATAN KARAWACI	Pemilik Risiko SPBE	Camat
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Seksi Tata Pemerintahan
		Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
		Seksi Ekonomi Pembangunan
		Seksi Pelayanan Umum; dan
		Seksi Kemasyarakatan;
	Kelompok Jabatan Fungsional.	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemilik Risiko SPBE	Kepala Satuan
	Koordinator Risiko SPBE	Sekretariat
	Pengelola Risiko SPBE	Kepala Bidang Penegakan Program Hukum Daerah
		Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
	Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
		Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
		Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
		UPT
SEKERTARIAT DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Sekertaris Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
	Pengelola Risiko SPBE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Asisten Administrasi Umum
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Pemilik Risiko SPBE	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Koordinator Risiko SPBE	Bagian Administrasi Umum
	Pengelola Risiko SPBE	Bagian Perencanaan dan Administrasi Keuangan
		Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas Protokol
		Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan



1. 4. Form 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Kementerian PAN RB	Instansi Pemerintah/eksternal	Konsultansi Pengelolaan Kinerja ASN
	2	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	3			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
BADAN PENDAPATAN DAERAH	2			
	3			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIM USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS KESEHATAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS KETAHANAN PANGAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
	3			
DINAS KETENAGAKERJAAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS KOMINFO	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2			
	3			
DINAS PENDIDIKAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS PERHUBUNGAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS SOSIAL	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
INSPEKTORAT	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
KECAMATAN PINANG	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
	3			
KECAMATAN KARAWACI	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
SEKERTARIAT DAERAH	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi
	2			
	3			
SEKERTARIAT DEWAN	1	Diskominfo Kota Tangerang	Instansi Pemerintah/internal	Pengelola Aplikasi



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan			
	No.	Pemangku Kepentingan	Kelompok Pemangku Kepentingan	Hubungan
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2			
	3			

1.5. Form 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil (PNS)	
	3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Republik Indonesia	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
	3	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang tahun 2005-2025;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	4	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Kedudukan dan Fungsi Tugas tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang;	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;	
	2	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);	
	3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;	
	5	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).	
	2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).	
	3	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).	
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3).	
	5	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2021 1 - 6 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023;	
	5	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);	
	3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);	
	4	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	
	5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
	6	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIM USAHA	1	Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;	
	2	Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;	
	3	Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi;	
	4	Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
KECIL DAN MENENGAH			
	5	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;	
	6	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;	
	7	Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;	
	2	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;	
	3	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;	
	4	Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;	
	6	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	
DINAS KESEHATAN	1	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah; Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	2	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;	
	3	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi;	
	4	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;	
	5	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ;	
	6	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan.	
	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dluah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	3	Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;	
	4	Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dn Tata Keda Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Ketahanan Pangan;	
	5	Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerla Unit Pelaksana Teknls Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan;	
DINAS KETENAGAKERJAAN	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).	
	2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);	
	3	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 201 Nomor 8);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	6	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);	
	7	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan	
DINAS KOMINFO	1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	
	2	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika:	
	3	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;	
	2	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023;	
	3	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
	4	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	5	Peraturan walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.	
	6	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.	
	7	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).	
	2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).	
	3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).	
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8).	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
DINAS PENDIDIKAN	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);	
	2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	
	3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;	
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);	
	5	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.	
DINAS PERHUBUNGAN	1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;	
	3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	4	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	
	5	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;	
	6	Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).	
	3	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2).	
	4	Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	5	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	
	2	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;	
	3	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
	5	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.	
	6	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6);	
	6	Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).;	
	7	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023.	
DINAS SOSIAL	1	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);	
	4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Kemiskinan;	
	6	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8).	
	7	Peraturan Walikota Tangerang No. 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem;	
	2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;	
	3	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;	
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.	
	6	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Tangerang;	
	7	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	
	3	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019);	
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1).	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);	
	6	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
INSPEKTORAT	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);	
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	5	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019);	
	6	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.	
KECAMATAN PINANG	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);	
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);	
KECAMATAN KARAWACI	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	4	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	
	4	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;	
SEKERTARIAT DAERAH	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);	
	2	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	
	4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);	
	5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7);	
	6	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5).	
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);	
	2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	



Nama OPD/ UPR SPBE	Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan		
	No.	Peraturan Perundang-Undangan	Amanat
	3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	
	4	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;	
	5	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.	



1.6 Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

No.	Kategori Risiko SPBE sesuai Permenpan 5 Th 2020		
1	Rencana Induk SPBE Nasional	9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
2	Arsitektur SPBE	10	Data dan Informasi
3	Peta Rencana SPBE	11	Infrastruktur SPBE
4	Proses Bisnis	12	Aplikasi SPBE
5	Rencana dan Anggaran	13	Keamanan SPBE
6	Inovasi	14	Layanan SPBE
7	Kepatuhan terhadap Peraturan	15	SDM SPBE
8	Pengadaan Barang dan Jasa	16	Bencana Alam



1.7 Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No.	Area Dampak Risiko SPBE sesuai Permenpan 5 Th 2020 (Kolom 11)
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

1.8 Formulir 2.8 Kriteria Risiko

SKALA DAMPAK								
AREA DAMPAK		Anggaran dan Keuangan	Reputasi/ Kepercayaan Publik	SDM (Keselamatan Personel)	Kinerja	Pelayanan Masyarakat	Operasional/ TIK/Logistik	Hukum dan Regulasi
1	Tidak Signifikan	Kerugian tidak materiil	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) \leq 10	Tidak berbahaya	100% > Capaian IKU > 97%	Pemberian Layanan Tertunda beberapa jam dari SLA	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama beberapa jam	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Teguran Lisan
2	Minor/ Kurang Signifikan	Jumlah kerugian kecil	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) sebanyak 10 s.d 20	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	97% > Capaian IKU > 92%	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja hampir 1 hari	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Tindakan Disiplin
3	Moderat/ Cukup Signifikan	Jumlah kerugian cukup besar	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>Stakeholder</i>) > 20	Gangguan kesehatan fisik dan/atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	92% > Capaian IKU > 87%	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Sanksi Disiplin
4	Signifikan	Jumlah kerugian besar	Pemberitaan negatif di media lokal Pemberitaan negatif di media massa nasional dan/atau Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Gangguan kesehatan fisik dan/atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	87% > Capaian IKU > 80%	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	Pelanggaran Etik dan mendapatkan Sanksi Kode Etik
5	Sangat Signifikan	Jumlah kerugian perlu mengembalikan ke kas negara	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan/atau media massa internasional dan/atau Pemberitaan negatif di media sosial menjadi <i>trending topic</i> nasional dan/atau internasional	Kejadian fatal/kematian	80% > Capaian IKU > 70%	Pemberian Layanan Tertunda lebih dari 1 Minggu	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja lebih dari 1 Minggu	Pelanggaran serius dan mendapatkan Tuntutan Pidana



SKALA KEMUNGKINAN			
Nilai Kemungkinan	Level Kemungkinan	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

1.9 Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Formulir 2.9.A. Matriks Analisis Risiko SPBE

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak					
		1	2	3	4	5	
Nilai	Pernyataan	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Kemungkinan Risiko	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Tidak pernah terjadi	1	3	5	8	20

Area Selera Risiko

Batas Toleransi Risiko

Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

		Rentang Nilai Risiko	Pernyataan Rentang Nilai Risiko	Simbol Warna
	Sangat Tinggi	20 - 25	Sangat Tinggi	Merah
	Tinggi	16 - 19	Tinggi	Jingga
	Sedang	12 - 15	Sedang	Kuning
	Rendah	6 - 11	Rendah	Hijau
	Sangat Rendah	1 - 5	Sangat Rendah	Biru



1.10 Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang ditangani	
		Risiko Positif	Risiko Negatif
1	Proses Bisnis	-	2
2	Aplikasi SPBE	-	17
3	SDM SPBE	-	22
4	Data dan Informasi	-	47
5	Layanan SPBE	-	4
6	Rencana dan Anggaran	-	13
7	Infrastruktur SPBE	-	3
8	Kepatuhan terhadap peraturan	-	1
9	Proyek pembangunan/ Pengembangan Sistem	-	4
10	Inovasi	-	1
11	Keamanan SPBE	-	6



2. Profil Risiko SPBE Pemerintah Kota Tangerang

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																			
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023									
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG									
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sekretariat Daerah																			
1	Digitalisasi dokumen, mengelola inventaris dan informasi terkait Setda	Nilai PMPRB pada 4 Area Perubahan	Memproses surat lelang barang dan jasa proses panduan membuat surat lelang. (Bangjaka)	Negatif	Aplikasi Bang Jaka tidak dapat diakses	Adanya gangguan jaringan pada aplikasi atau belum dilakukan pengaturan pada Bang Jaka	Arsitektur SPBE	- Terhambatnya proses pelaksanaan tender	Layanan Organisasi	Sudah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara penggunaan aplikasi Bang Jaka	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			Negatif	Ada proses yang belum terakomodir dalam aplikasi Bang Jaka	Masih kurangnya fitur	Proses Bisnis			Pengadaan jasa konsultan untuk update aplikasi	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya		
			Digitalisasi dokumen kelengkapan penyedia saat melakukan verifikasi (Arsip LPSE)	Negatif	Karena masih menggunakan aplikasi open source, kendala yang dihadapi adalah kapasitas penyimpanan	Data penyedia yang besar	Aplikasi SPBE	- Penyedia tidak bisa mengirim dokumen	Operasional dan Aset TIK	-Sudah dilakukan sosialisasi tatacara pengiriman dokumen persyaratan -Membuat email baru	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja hampir 1 hari	7	Rendah	Tidak		
			Mengelola informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Web LPSE)	Negatif	Proses under maintenance yang lama	Kurangnya SDM yang menguasai aplikasi berbasis opensource	SDM SPBE	Aplikasi LPSE tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan menghambat kinerja	Operasional dan Aset TIK	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo selaku pengelola server	4	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	16	Tinggi	Ya		
					Adanya error pada aplikasi SPSE	Bug aplikasi	Aplikasi SPBE			Melakukan koordinasi dengan LKPP selaku pemilik aplikasi dan membuat informasi kepada pengguna LPSE tentang adanya bug aplikasi	4	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	19	Tinggi	Ya		
			Mengelola informasi tentang peengguna yang bertujuan untuk mengelola data : - Pembuatan Surat Pengantar - Daftar Warga - Peta Wilayah - Daftar Pemangku (Pejabat Kelurahan/Kecamatan) - Daftar Warga Misikin - Grafik Kependudukan Kota Tangerang (Pangkas Versi Andro dan Web)	Negatif	Konfigurasi Sistem rusak	Security Awareness dari User yang masih rendah	Aplikasi SPBE	Beberapa data/ fitur tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan akibat Virus dan Malware	Layanan Organisasi	Menjalin kerjasama dengan pihak pengembang Aplikasi	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1 hari	7	Rendah	Tidak		



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Mengelola tentang Produk Hukum Pemerintah Kota Tangerang dan menu konsultasi bantuan hukum.(JDI hukum)	Negatif	Data yang diinput tumpang tindih/status produk hukum belum terupdate keseluruhan	Duplikasi data yang diinput/monitoring dan evaluasi status produk hukum	Data dan Informasi	Kesalahan penafsiran data.	Operasional dan Aset TIK	Melakukan filterisasi dan double cek pendataan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
				Negatif	Contact Person JDIIH kurang responsive	SDM yang tidak fast respon dan tidak mengerti SOP yang telah ditentukan	Layanan SPBE	- Pengguna Web/ Sistem Informasi tidak mengetahui cara menggunakan JDIIH yang benar - WEB JDIIH tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna	Layanan Organisasi	Sudah melakukan sosialisasi dan pengarahan terhadap SDM	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Pemberian layanan tertunda hampir 1 hari	7	Rendah	Tidak	
			Mengelola standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah dengan : - SOP - Tutorial (SOP)	Negatif	Hilangnya data riwayat hasil kegiatan	Erornya sistem saat penginputan data	Data dan Informasi	Output kinerja menjadi berkurang khususnya dalam SPBE.	Kinerja	Melakukan digitalisasi pengarsipan	1	Sangat Jarang	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	3	Sangat Rendah	Tidak	
				Negatif	Tidak ada standarisasi pelaksanaan penggunaan aplikasi/ Sistem Informasi.	Komitmen pimpinan dalam hal tata kelola kebijakan manajemen SI masih kurang	SDM SPBE	Proses ketatalaksanaan tidak berjalan dengan baik dan semestinya	Kinerja	Menginisiasi kebijakan internal dan berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	17	Tinggi	Ya	
			Mengelola inventaris bagian umum terkait : - Kategori Barang - Histori Stok Barang - Histori peminjaman dan Pengembalian Barang (SIBARSEDA)	Negatif	Satu personel banyak mengawaki/ mengelola aplikasi/sistem	Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam pemanfaatan aplikasi	SDM SPBE	- Pengawak Sistem/Aplikasi yang ditunjuk tidak fokus terhadap pekerjaannya - Pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif	Kinerja	Melakukan pengidentifikasian kembali daftar aplikasi yang dimiliki	4	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	12	Sedang	Ya	
			Mengelola Informasi terkait Setda (SKPD)	Negatif	Informasi profil Setda yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik kurang baik.	Kinerja	- Sudah ditunjuk pengelola admin situs dan akun sosial media resmi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tangerang	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	1	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	2	Sangat Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam <i>website</i> .	Data dan Informasi											
		Prosentase analisis kajian kebijakan yang menjadi bahan kebijakan daerah tepat waktu	Mengelola kerja sama antar pemerintah daerah (Web Bagian Kerjasama)	Negatif	Website tidak mendapatkan data update rutin dari pihak terkait	Aplikasi yang dikembangkan tidak di sosialisasikan sebelumnya kepada para pemangku kepentingan.	Data dan Informasi	- Aplikasi tidak mendapatkan data terbaru, masing-masing pihak terkait memiliki data sendiri-sendiri.	Kinerja	- Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	1	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	2	Sangat Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi terkait : - Realisasi Fisik dan Keuangan APBD- Dokumentasi Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik Konstruksi(SIEVLAP)	Negatif	Informasi kurang lengkap atau spesifik	Data hasil integrasi sistem yang belum spesifik per paket pekerjaan	Data dan Informasi	Tidak bisa menyajikan masalah per paket pekerjaan	Kinerja	Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah secara periodik	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	10	Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi dengan : - Pemberian bantuan hibah keagamaan (SABAKOTA)	Negatif	Terdapat lembaga yang tidak mendapatkan bantuan hibah keagamaan	- Terlambat melakukan input sabakota	Data dan Informasi	Tidak meratanya bantuan hibah keagamaan	Layanan Organisasi	Melakukan sosialisasi kepada lembaga calon penerima hibah dan lembaga penerima hibah	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	2	Pemberian layanan tertunda hampir 1 hari	10	Rendah	Tidak	
						- Masih ada masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi	Data dan Informasi											
Inspektorat																		
1	Terkelolanya Informasi terkait Inspektorat dan pengawasan di Kota Tangerang secara optimal	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Internal Yang Ditindak lanjut	Mengelola Informasi terkait Inspektorat (Web SKPD)	Negatif	Ketidaksesuaian antara data aktualnya dengan data di Web	Pihak terkait tidak melakukan cross check data dan dalam mengirimkan data tidak lengkap	SDM SPBE	Pengguna Aplikasi tidak mendapatkan data yang akurat	Layanan Organisasi	Sudah melakukan check data secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
		Tingkat Maturitas SPIP Level 4	Mengelola informasi terkait Pengawasan di Kota Tangerang (E-Audit)	Negatif	Pengamanan Data belum optimal	Minimnya kesadaran pegawai	SDM SPBE	Kebocoran Data	Kinerja	- Sudah melakukan Pembatasan Akses - Sudah melakukan backup data setiap hari	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
		Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Penuh		Negatif	Implementasi e-Audit tidak dilakukan secara optimal	Ketidaksesuaian aplikasi dengan kebutuhan di lapangan	Aplikasi SPBE	Aplikasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna aplikasi	Kinerja	Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
						Kurangnya motivasi kepada pihak terkait	SDM SPBE											



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sekertariat DPRD																		
1	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (RESES)	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Mempersiapkan Rapat BANMUS dalam rangka penjadwalan kegiatan Reses 1. Pembuatan SK Kegiatan Reses Dewan : - SK Ketua DPRD dalam rangka melaksanakan kegiatan Reses Dewan - SK Sekretariat DPRD dalam rangka pendampingan Reses Dewan 2. Menyiapkan bahan pendukung kegiatan Reses: - Undangan - Daftar hadir - Dokumentasi 3. Penginputan hasil reses dewan	Negatif	Aspirasi berupa usulan kegiatan pembangunan berupa data dan informasi belum bisa diakses oleh masyarakat melalui website Sekretariat DPRD	Pelaksanaan kegiatan Reses oleh dewan dalam rangka penyerapan Aspirasi dari masyarakat sudah dilaksanakan sesuai usulan dan kebutuhan dari masyarakat.	Data dan Informasi	Kurang percayanya masyarakat kepada Dewan karena belum adanya bukti kegiatan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi.	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulan sesuai usulan dari masyarakat	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	4	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	17	Tinggi	Ya	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
1	Terkelolanya informasi Perencanaan Pembangunan	Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Menampilkan informasi tentang kampung Tematik kota Tangerang seperti : - Informasi Kampung (Kampung Tematik)	Negatif	Informasi kurang lengkap atau spesifik	Kurangnya data informasi di beberapa wilayah	Data dan Informasi	Tidak tersampainya maksud dari Web kampung tematik di beberapa wilayah	Reputasi	Melakukan pendataan secara menyeluruh di setiap wilayah Kota Tangerang	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	14	Sedang	Ya	
			Menampilkan informasi tentang kampung Tematik kota Tangerang seperti : - Fasilitas Kampung (Kampung Tematik)	Negatif	Informasi Fasilitas belum di update	Kurangnya Perhatian update data informasi di fasilitas kampung tematik	Data dan Informasi	Kurang efektifnya Web dalam mengangkut Produk lokal	Reputasi	Melakukan Update berkala atau membuka Pendaftaran fasilitas di Web	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	14	Sedang	Ya	
			Menampilkan informasi tentang kampung Tematik kota Tangerang seperti : - Peta Kampung (Kampung Tematik)	Negatif	Kurangnya informasi tentang bagaimana cara ke salah satu kampung tematik menggunakan transportasi Umum	Belum adanya informasi bagaimana caranya ke kampung tematik menggunakan transportasi umum	Data dan Informasi	membuat ketertarikan masyarakat dengan fasilitas pemerintahan berkurang karena ketidaklengkapan informasi	Reputasi	Melakukan pembaharuan sesuai kritik dan saran masyarakat	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	4	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	17	Tinggi	Ya	
2	Terkelolanya Monitoring dan evaluasi	Tingkat kualitas dalam perencanaan	Menjaga manajemen informasi pengadaan seperti : - Beranda - Waktu	Negatif	Hilangnya data inputan	Terjadi error saat penginputan data	Data dan Informasi	Menghambat kinerja dan proses bisnis	Layanan Organisasi	melakukan double cek saat pengisian dan mengecek sebelum hari h acara	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IDENTIFIKASI RISIKO										ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			- Tautan Zoom, Absensi, Materi, Kritik dan Saran - Susunan Acara (RKPD)															
3	Terkelolanya Perencanaan Pembangunan	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	Mengelola memonitoring dan evaluasi kinerja SKPD dengan : - Menu RPJMD - Menu RKPD - Menu Renja (e-Monevi)	Negatif	Under maintenance yang terlalu lama	Belum menjadi Prioritas Pembaruan Web	Aplikasi SPBE	Tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan menghambat kinerja	Operasional dan Aset TIK	Mengingatkan kepada OPD pengelola untuk memprioritaskan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
4	Terkelolanya manajemen informasi pengadaan	Persentase nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) diatas 85	Mengelola perencanaan pembangunan terkait : - Forum SKPD (e-Planning)	Negatif	Informasi didalam belum terupdate	Kurangnya Perhatian update data	Data dan Informasi	Kurang efektifnya Web dalam memonitoring dan mengelola	Reputasi	Melakukan Update berkala dan pengecekan rutin terkait data-data didalamnya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola perencanaan pembangunan terkait : - RKPD (e-Planning)	Negatif	Adanya kesamaan data atau tumpang tindih data	penginputan data dua kali atau lebih	Data dan Informasi	ketidak konsistensian data yang menyebabkan mis informasi	Operasional dan Aset TIK	Melakukan filterisasi dan double cek pendataan	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	14	Sedang	Ya	
			Mengelola perencanaan pembangunan terkait : - Rincian RKPD (e-Planning)	Negatif	Informasi kurang lengkap atau spesifik	Pengelola Web belum mendapatkan data informasi yang rinci	Data dan Informasi	Tidak tersampainya maksud dari rincian RKPD	Reputasi	Melakukan meeting bulanan untuk mengingatkan tentng perincian data	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi mengenai TNDE Bappeda (TNDE)	Negatif	Under maintenance yang terlalu lama	Belum menjadi Prioritas Pembaruan Web	Aplikasi SPBE	Tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan menghambat kinerja	Operasional dan Aset TIK	Mengingatkan kepada OPD pengelola untuk memprioritaskan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
			Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah	Mengelola informasi mengenai pencairan dan penyampaian SPJ Bappeda (SIPPAK)	Negatif	Hilangnya data pertanggung jawaban anggaran kegiatan	Erornya sistem saat penginputan data atau terhapus tanpa sengaja	Data dan Informasi	Operasional dan Aset TIK	Melakukan Backup database secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
Badan Pengelola Keuangan Daerah																		
1	Terkelolanya Keuangan daerah dan sistem informasi keuangan daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	Mengelola informasi seputar Keuangan Daerah Kota Tangerang dengan : - Menu PPTK - Konfigurasi PPTK - Laporan PPTK (SIKUDA NEW SP3KTRA)	Negatif	Adanya kesalahan inputan nominal oleh user New Sp3ktra	Kekurangtelitian user dalam menginput nominal pada aplikasi	Data dan Informasi	Ketidak sesuaian data antara di sistem New Sp3ktra dengan realisasi di BKU	Operasional dan Aset TIK	Melakukan double check setelah menginput di sistem dengan melihat kembali laporan BKU	1	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	5	Sangat Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IDENTIFIKASI RISIKO										ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ketepatan waktu penyampaian APBD	Menyusun anggaran sesuai dengan pemendagri no 77 Tahun 2020 dengan : - RKA/DPA 21 - PAGU - CETAK RAPERDA (SIPD)	Negatif	Adanya program/kegiatan yang belum terinput	Error server dan loading sistem, sedangkan waktu penginputan dibatasi	Data dan Informasi	Jumlah pagu anggaran yang diinput pada sistem tidak sesuai dengan dokumen perencanaan	Operasional dan Aset TIK	Aktif melakukan koordinasi dengan penyedia sistem di pusat	1	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Adanya program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	8	Rendah	Tidak	
		Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Daerah	Mengelola barang milik daerah sesuai dengan pemendagri no 47 Tahun 2021 dengan : - RKBU/RKPBU - INVENTARIS ASET TETAP - HIBAH DAN PENGHAPUSAN (SIAP BMD)	Negatif	Adanya kesamaan data atau tumpang tindih data inputan	Penginputan data dua kali atau lebih	Data dan Informasi	ketidak konsistensian data yang menyebabkan mis informasi	Operasional dan Aset TIK	Melakukan filterisasi dan double cek pendataan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
		Realisasi Pajak Daerah Lainnya	Mengelola dan memonitoring pajak daerah berupa : - Menu Dashboard - Menu Realtime Transaction - Menu Detail Transaction - Menu Device Status (Monitoring Pajak)	Negatif	Hilangnya data atau tidak lengkapnya Data	Sistem error saat penginputan data	Data dan Informasi	Data tidak ada dan menghambat Proses bisnis	Operasional dan Aset TIK	Melakukan backup database	1	Sangat Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	5	Sangat Rendah	Tidak	
		Mengelola informasi pajak daerah (Pajak Daerah)	Mengelola informasi pajak daerah (Pajak Daerah)	Negatif	Informasi didalam belum terupdate	Kurangnya Perhatian update data	Data dan Informasi	Kurang efektifnya Web dalam memonitoring dan mengelola	Reputasi	Melakukan update berkala dan pengecekan rutin terkait data-data didalamnya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
		Mengelola informasi pajak air tanah dan restoran (Pajak Online)	Mengelola informasi pajak air tanah dan restoran (Pajak Online)	Negatif	Informasi didalam belum terupdate	Kurangnya Perhatian update data	Data dan Informasi	Kurang efektifnya Web dalam memonitoring dan mengelola	Reputasi	Melakukan update berkala dan pengecekan rutin terkait data-data didalamnya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Mengelola informasi pajak daerah (Sarana wajib pajak self assesment) dengan : - Informasi Pajak daerah - Pendaftaran Wajib Pajak (SIMPAD)	Negatif	Informasi didalam belum terupdate	Kurangnya Perhatian update data	Data dan Informasi	Kurang efektifnya Web dalam memonitoring dan mengelola	Reputasi	Melakukan update berkala dan pengecekan rutin terkait data-data didalamnya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM																		
1	Meningkatkan pengelolaan profil dan kinerja ASN secara bekesinambungan dan ter-update	Indeks profesional ASN	Menampilkan informasi profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang (Web SKPD)	Negatif	Informasi profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang tidak update.	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Nilai informasi keterbukaan publik menurun.	Kinerja	- Jadwal update profil telah disusun. - Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales. - Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	7	Rendah	Tidak	
						Vendor pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi											
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE											
2	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi pengembangan kompetensi (diklat) dan ter-update	Indeks Kompetensi Aparatur	Menampilkan informasi jejak rekam pelatihan, diklat/PIM, diklat teknis, diklat fungsional, sertifikasi keahlian barang jasa, sertifikat keahlian lain, dan sertifikat diklat/kursus	Negatif	Informasi jejak rekam digital pengembangan kompetensi tidak lengkap per individu ASN	kurang update data rekam jejak pengembangan kompetensi tidak disertai upload sertifikat yang dimiliki per individu ASN	Data dan Informasi	Rendahnya nilai komposit IP ASN dari Pengembangan Kompetensi ASN (PNS dan PPPK)	Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan korespondensi dengan OPD terkait.	5	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	5	Nilai komposit IP ASN untuk indeks kompetensi ASN rendah padahal nilainya terbesar sumbangannya 40%	25	Sangat Tinggi	Ya	
				Negatif	Belum optimalnya pengembangan kompetensi dikareanakan usulan peserta diklat yang diajukan tiap OPD tidak memenuhi sasaran	kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan kompetensi Pegawai baik teknis maupun administrasi karena adanya moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS	SDM SPBE	Kurang memadainya SDM aparatur baik dari kuantitas (jumlah) maupun dari kualitas	Hukum dan regulasi	melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada SDM yang tersedia	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pelanggaran serius sanksi tertulis	13	Sedang	Ya	
3	Meningkatkan kualitas SDM dimulai sejak perekrutan ASN	Nilai SKP diatas 85	Mengelola informasi rekrutmen terkait (Formasi)	Negatif	Informasi terkait formasi SDM dalam sistem kurang spesifik.	Informasi yang disampaikan oleh OPD terkait kurang komprehensif	Data dan Informasi	Pembagian formasi SDM dalam sistem belum seimbang antara kualitas dan kuantitas.	Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan korespondensi dengan OPD terkait.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	13	Sedang	Ya	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Mengelola informasi rekrutmen terkait Pengumuman rekrutmen	Negatif	Data pengumuman rekrutmen belum update.	Data pengumuman rekrutmen final belum disampaikan kepada tim pengembangan website.	Data dan Informasi	Pembagian formasi SDM dalam sistem belum seimbang antara kualitas dan kuantitas.	Sumber Daya Manusia	Koordinasi bagian pendataan dan pengelola Website	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	11	Rendah	Tidak	
				Negatif	Informasi yang dimuat dalam pengumuman rekrutment tidak sesuai dengan informasi yang aktual.	Kesalahan dalam input data.	SDM SPBE	Meningkatnya aduan dari peserta rekrutment.	Layanan Organisasi	Sudah adanya evaluasi peng inputan data	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi rekrutmen terkait Unduh Dokumen	Negatif	data dalam unduh dokumen kurang lengkap atau belum update	Data pengumuman belum dibuat atau update	Data dan Informasi	Meningkatnya aduan dari peserta rekrutment.	Reputasi	Diakukan evaluasi terkait data yang bisa di unduh	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi rekrutmen terkait Infografis	Negatif	Data terkait Infografis masih belum mudah dimengerti	kurangnya penjabaran disetiap langkah infografis	Proses Bisnis	Kurangnya pahamiannya peserta dalam mengikuti petunjuk arahan infografis	Layanan Organisasi	Sudah dilakukan pembaharuan tampilan agar mudah dimengerti	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi rekrutmen terkait Info Seleksi (Rekrutmen)	Negatif	tidak munculnya data peserta rekrutment	kurang lengkapnya database peserta	Aplikasi SPBE	Meningkatnya aduan dari peserta rekrutment.	Reputasi	Sudah adanya validasi data baik data input, data output dan database	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
	Meningkatkan road map pemetaan potensi dan kompetensi ASN dari hasil Asesmen (penilaian kompetensi) untuk dimasukan dalam data manajemen talenta daerah	Nilai SKP diatas 85	Mengelola informasi penilaian kompetensi (Web UPT)	Negatif	belum updatenya berita-berita terkait kegiatan penilaian UPT	kurangnya fokus untuk penginputan berita-berita kegiatan	SDM SPBE	Kurang percayanya masyarakat kepada UPT karena belum adanya bukti kegiatan terbaru	Layanan Organisasi	Membuat jadwal upload kegiatan setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
	Meningkatkan kualitas data base dan menu aplikasi pendukung terhadap file digital personal ASN	Nilai SKP diatas 85	Mengelola data ASN dengan : Profil Data ASN Input Kinerja Bulanan (SIMASN)	Negatif	belum updatenya data inputan kinerja bulanan	Kurangnya SDM untuk penginputan disetiap OPDnya	SDM SPBE	Tidak terpantaunya kegiatan kinerja bulanan	Hukum dan Regulasi	Melakukan evaluasi bulanan dan jadwal upload data	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	11	Rendah	Tidak	
	Meningkatkan kualitas data nominatif rotasi, mutasi dan Promosi ASN	Nilai SKP diatas 85	Mengelola data personal digital (SIMASN)	Negatif	Belum optimalnya penyusunan penilaian kompetensi dengan pengisian jabatan	Penyebaran/distribusi belum memperhatikan formasi dan kebutuhan penempatan kinerja BKPSDM	SDM SPBE	Belum meratanya persebaran pegawai dari segi jumlah atau kualitas sehingga belum Optimal kuantitas dan kualitas aparatur pengelola	Kinerja	sudah dilakukannya seleksi kualifikasi dengan syarat tertentu untuk mengisi formasi penempatan kerja	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	13	Sedang	Ya	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pembinaan disiplin, penilaian kinerja dan kesejahteraan ASN	Nilai SKP diatas 85	Mengelola data i-dis dan laporan berkenaan dengankasus disiplin	Negatif	Belum optimalnya pengawasan internal OPD terhadap para pegawai.	Kurangnya kesadaran dalam mewujudkan tata kelola dan tata kerja birokrasi yang baik dan bersih;	SDM SPBE	Masih rendahnya kedisiplinan, kualitas mental dan pola pikir sehingga masih ada ketidak taatan jam kerja maupun apel pagi	Layanan Organisasi	melakukan sidak dadakan mengenai kedisiplinan dengan konsekuensi hukuman	4	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	5	Pemberian Layanan Tertunda tertunda lebih dari 1 Minggu	24	Sangat Tinggi	Ya	
			Mengelola data SKP seluruh ASN se Kota Tangerang	Negatif	Belum optimalnya perangkat sub bagian umum dan kepegawaian tiap OPD dalam memahami prosedur pengisian SKP online.	Belum dilaksanakannya pengembangan dan pembinaan	SDM SPBE	Belum optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas SDM;	Kinerja	sudah melakukan bimbingan teknis terkait pengisian SKP online	4	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	5	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	24	Sangat Tinggi	Ya	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
1	- Meningkatkan pengelolaan profil dan kinerja Kesbangpol secara berkelanjutan dan update	Prosentase Ormas Aktif	Pendaftaran ormas	Negatif	Data serta informasi terkini Ormas yang telah terdaftar belum terupdate secara optimal.	Pelaksanaan update data yang belum tersusun secara berkala	Rencana dan Anggaran	Nilai informasi keterbukaan publik menurun.	Kinerja	- Melakukan penjadwalan update data secara berkala dan melakukan sosialisasi. - Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales. - Melakukan pelatihan terkait teknis tata cara update data	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	17	Tinggi	Ya	
						Vendor pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi											
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate masih kurang kompetensinya.	SDM SPBE											
	- Meningkatkan Pelayanan terhadap Organisasi Masyarakat dengan menggunakan aplikasi	Prosentase Ormas Aktif	Data Base Ormas dan LSM Se Kota Tangerang	Negatif	Terdapat Ormas yang belum terdaftar yang ada di Kota Tangerang	Kurangnya informasi terkait cara pelaksanaan pendaftaran ormas secara digital	Layanan SPBE	Pengendalian Ormas terdaftar dan terlarang menjadi sulit dikarenakan pemetaan Ormas kurang komprehensif	Hukum dan Regulasi	Melakukan sosialisasi baik secara online maupun offline terkait tata cara pendataan ormas secara daring	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	11	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	Mengelola data kebencanaan untuk meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Presentase Kelurahan Tangguh Bencana	Melaporkan data kejadian bencana, kebakaran dan kedaruratan lainnya (Aplikasi satu data, SPM Bangda)	Negatif	Data kejadian bencana, kebakaran, dan kedaruratan belum update	Kurangnya perhatian produsen data untuk melaporkan informasinya	Data dan Informasi	Rencana mitigasi pencegahan bencana pada tahun berikutnya tidak tepat sasaran	Kinerja	- Melakukan penyimpanan data secara digital - Perluanya peran pimpinan dalam melakukan kontrol data secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Mitigasi tidak maksimal	13	Sedang	Ya	
			Melaporkan data korban bencana, kebakaran dan kedaruratan lainnya (Aplikasi satu data, SPM Bangda)	Negatif	Data korban bencana dan kedaruratan lainnya belum update	Kurangnya perhatian produsen data untuk melaporkan informasinya	Data dan Informasi	Penyaluran bantuan kepada korban tidak optimal	Kinerja	- Melakukan penyimpanan data secara digital - Perluanya peran pimpinan dalam melakukan kontrol data secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Penyaluran bantuan tidak maksimal	13	Sedang	Ya	
			Melaporkan data jumlah rumah yang terdampak bencana dan kebakaran (Aplikasi satu data, SPM Bangda)	Negatif	Data jumlah rumah yang terdampak bencana belum update	Kurangnya perhatian produsen data untuk melaporkan informasinya	Data dan Informasi	Rencana mitigasi pencegahan bencana pada tahun berikutnya tidak tepat sasaran	Kinerja	- Melakukan penyimpanan data secara digital - Perluanya peran pimpinan dalam melakukan kontrol data secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Mitigasi tidak maksimal	13	Sedang	Ya	
			Melaporkan data respon time rate kebakaran (Aplikasi satu data, SPM Bangda)	Negatif	Data respon time rate kebakaran belum update	Kurangnya perhatian produsen data untuk melaporkan informasinya	Data dan Informasi	Kinerja BPBD dalam pemadaman kebakaran tidak terlihat	Kinerja	Melakukan pelaporan data berkala setiap akhir bulan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kinerja tidak terlihat	11	Sedang	Ya	
			Melaporkan data kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat maupun aparatur (Aplikasi satu data, SPM Bangda)	Negatif	Data kegiatan sosialisasi dan pelatihan belum update	Kurangnya perhatian produsen data untuk melaporkan informasinya	Data dan Informasi	Tidak terpetaknya warga negara dan aparatur yang sudah dilatih dan mendapatkan sosialisasi	Kinerja	- Melakukan penyimpanan data secara digital - Perluanya peran pimpinan dalam melakukan kontrol data secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Warga negara dan aparatur penerima manfaat tidak terdaftar	11	Sedang	Ya	
			Melaporkan jumlah serta kondisi sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran (Aplikasi satu data, SPM Bangda)	Negatif	Belum diperbaharunya data sarana prasarana	Pendataan sarana prasarana belum dilakukan secara berkala	Data dan Informasi	Pengendalian sarana prasarana tidak dapat terkelola dengan baik	Kinerja	Melakukan pengecekan dan pelaporan sarana prasarana secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Dokumentasi sarana prasarana tidak terkelola dengan baik	7	Rendah	Tidak	
			Pelaporan capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan (E-monev Kota Tangerang)	Negatif	Capaian kinerja dan realisasi keuangan belum ada	Capaian dan realisasi dari produsen data belum dilaporkan	Rencana dan Anggaran	Capaian kinerja dan keuangan BPBD tidak dilaporkan secara maksimal	Kinerja	- Melakukan pendataan capaian secara berkala tiap triwulan dan realisasi keuangan berkala tiap bulan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kinerja SKPD tidak terhitung	7	Rendah	Tidak	
			Mengelola Informasi terkait SKPD BPBD (Web SKPD)	Negatif	Data informasi belum terupdate	Kurangnya perhatian Pengelola untuk memperbaharui informasinya	Data dan Informasi	Kurang percayanya warga kepada OPD karena belum adanya bukti kegiatan terbaru	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	7	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dinas Komunikasi dan Informatika																		
1	Terkelolanya Aset TIK dan Informasi berbagai aplikasi di Kota Tangerang	IKM terhadap pelayanan publik berbasis TIK	Mengelola informasi tentang aplikasi yang ada di Kota Tangerang dengan : - Daftar Aplikasi - Link Aplikasi (Web Daftar Aplikasi)	Negatif	Tidak Updatenya data daftar aplikasi	Kurangnya perhatian Pengelola untuk memperbaharui data	Data dan Informasi	User tidak tau jika ada aplikasi terbaru atau ada aplikasi yang sudah tidak digunakan atau dimatikan	Operasional dan Aset TIK)	Melakukan pengecekan dan pembaharuan rutin setiap 3 bulan sekali	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
	Persentase Penggunaan Aplikasi	Mengelola semua informasi terkait kota Tangerang dan aplikasi-aplikasi yang terintegrasi didalamnya (Web Resmi Pemkot Tangerang)	Negatif	Data informasi belum terupdate	Kondisi hosting yang overload	Aplikasi SPBE	membuat Web tidak bisa di akses atau dibuka	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak		
	Persentase pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang digunakan oleh Pemkot Tangerang	Menyajikan Data yang berkualitas, akurat dan mutakhir. (Tangerang Satu Data)	Negatif	Adanya kesamaan data atau tumpang tindih data	Penginputan data dua kali atau lebih	Data dan Informasi	ketidak konsistensian data yang menyebabkan mis informasi	Operasional dan Aset TIK)	Melakukan filterisasi dan double cek pendataan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak		
	Persentase pemanfaatan regulasi TIK	Mengelola tanda tangan digital dengan Verifikasi Dokumen Digital (RA E-Sign)	Negatif	Serverdown	Kondisi hosting yang overload	Aplikasi SPBE	membuat Web tidak bisa di akses atau dibuka	Operasional dan Aset TIK)	Melakukan maintenance secara rutin dan troubleshooting server	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya		
	Persentase pemanfaatan dan pengamanan infrastruktur TIK	Mengelola keamanan dengan Esign Check (CSIRT)	Negatif	Belum terupdatenya berita kegiatan terkait keamanan	Kurangnya SDM untuk mengelola Berita kegiatan	SDM SPBE	terlihat tidak adanya kegiatan terbaru	Sumber Daya Manusia	Melakukan Penjadwalan upload kegiatan berupa foto dan deksripsi kegiatan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	11	Rendah	Tidak		
	Persentase data statistik daerah kota	Menampilkan sistem informasi keamanan (MATADOEa)	Negatif	Web tidak dapat diakses	Nama domain sudah kadaluarsa	Aplikasi SPBE	Menghambat kinerja dan proses bisnis	Operasional dan Aset TIK)	Selalu mengecek masa domain, dan rutin memperbaharui domain	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya		
		Pemanfaatan aplikasi internal TIK	Negatif	Server down pada data center Diskominfo	Kondisi Jaringan Internal yang mengalami kendala	Aplikasi SPBE	Menghambat kinerja	Kinerja	Melakukan maintenance secara rutin	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	1	Tidak Signifikan	4	Sangat Rendah	Tidak		
		Pemanfaatan aplikasi internal TIK	Negatif	Aplikasi error	Terjadinya peretasan / mis konfigurasi	Aplikasi SPBE	Menghambat kinerja	Kinerja	Melakukan monitoring keamanan dan konfigurasi sistem secara berkala	1		1	Tidak Signifikan	1	Sangat Rendah	Tidak		
		Pengelolaan Email resmi Pemerintah Kota Tangerang	Negatif	Server down pada data center Diskominfo	Terjadinya Overload Akses	Infrastruktur SPBE	Tidak dapat menerima dan mengirim email	Operasional dan Aset TIK)	Melakukan monitoring akses secara berkala	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	2	Kurang Signifikan / kecil	10	Rendah	Tidak		



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengelolaan Email resmi Pemerintah Kota Tangerang	Negatif	Email Phising	Kurangnya Awareness keamanan informasi	SDM SPBE	Pencurian data dan informasi	Sumber Daya Manusia	Melakukan sosialisasi pengamanan informasi terhadap pengguna	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	3	Sedang / Medium	14	Sedang	Ya	
			Pengelolaan Email resmi Pemerintah Kota Tangerang	Negatif	Aplikasi email tidak Update	Berakhirnya dukungan developer aplikasi email	Aplikasi SPBE	Layanan tidak optimal	Operasional dan Aset TIK)	Beralih ke aplikasi memberi dukungan jangka panjang	2	Kemungkinan kecil/jarang	3	Sedang / Medium	11	Sedang	Ya	
			Pengelolaan Email resmi Pemerintah Kota Tangerang	Negatif	Aplikasi error	Terjadinya peretasan / mis konfigurasi	Aplikasi SPBE	Menghambat kinerja	Kinerja	Melakukan monitoring keamanan dan konfigurasi sistem secara berkala	1	Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1	Sangat Rendah	Tidak	
			Pengelolaan Data Center	Negatif	Kerusakan perangkat keras	Prosedur pemeliharaan tidak dilakukan	Infrastruktur SPBE	Kerusakan perangkat atau aset yang berdampak pada tidak beroperasinya layanan Data Center	Operasional dan Aset TIK)	Melakukan monitoring penjadwalan pemeliharaan perangkat TI	2	Kemungkinan kecil/jarang	4	Signifikan / Besar	13	Sedang	Ya	
			Pengelolaan Data Center	Negatif	Akses tidak terorisasi	Belum menerapkan User ID dan password	Proses Bisnis	Hilangnya aset yang kritikal atau sensitif	Layanan Organisasi	Menerapkan hak akses pada 1 user dibarengi dengan Pengendalian akses berupa NDA	1	Sangat jarang	4	Signifikan / Besar	8	Rendah	Tidak	
			Pengelolaan Data Center	Negatif	Listrik Padam	Gangguan layanan PLN	Arsitektur SPBE	Layanan Diskominfo Terhenti	Operasional dan Aset TIK)	Memfaatkan tenaga listrik cadangan (Generator/UPS)	2	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	5	Sangat signifikan / Sangat Besar	21	Sangat Tinggi	Ya	
			Pengelolaan peningkatan kompetensi SDM	Negatif	Kompetensi SDM	Tidak ada pelatihan peningkatan kompetensi	SDM SPBE	Pengembangan layanan SPBE terhambat	Layanan Organisasi	Menjadwalkan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	2	Kurang Signifikan / Kecil	10	Rendah	Tidak	
			Pengelolaan Aplikasi Layanan Pemerintah	Negatif	Adanya celah pada pemrograman aplikasi yang mudah diretas pihak luar	Tidak dilakukan Penetration Test Terlebih dahulu sebelum Website di release ke Publik	Keamanan SPBE	Operasional Organisasi Terganggu	Operasional dan Aset TIK)	Membuat SOP publikasi aplikasi TI	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	4	Signifikan / Besar	17	Tinggi	Ya	
			Pengelolaan Database	Negatif	Database hilang	Tools Cron Job terdisable	Data dan Informasi	Sistem Aplikasi tidak Optimal	Operasional dan Aset TIK)	Monitoring jadwal backup database	2	Kemungkinan kecil / Jarang	4	Signifikan / Besar	13	Sedang	Ya	
			Pengelolaan Command Center	Negatif	Laporan aduan masyarakat yang tidak tertangani	Keterbatasan SDM pada OPD/Organisasi selaku penindak lanjut laporan masyarakat	SDM SPBE	Terhambatnya penanganan aduan masyarakat	Kinerja	Diadakan Reward dan Punishment kepada SDM yang berhasil menyelesaikan aduan masyarakat	2	Kemungkinan kecil / Jarang	2	Kurang Signifikan / Kecil	7	Rendah	Tidak	
			Pengelolaan Command Center	Negatif	Kinerja pengelola data kurang efisien	Tidak ada fitur AI analisa aduan masyarakat pada aplikasi	Aplikasi SPBE	Kurang optimalnya kinerja Operator	Layanan Organisasi	Dibuatkan fitur analisa pada Aplikasi Aduan Masyarakat	1	Sangat jarang	1	Tidak Signifikan	1	Sangat Rendah	Tidak	
			Pengelolaan Command Center	Negatif	Kerahasiaan Data Bocor	Peretasan keamanan informasi	Keamanan SPBE	Tingkat kepercayaan Masyarakat untuk melapor aduan ke LAKSA dan 112	Reputasi	Menjamin Kerahasiaan data dengan berpedoman pada SOP kerahasiaan data	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	4	Signifikan / Besar	17	Tinggi	Ya	
			Pengelolaan Data Sektoral	Negatif	Kurang up to date dan akuratnya data sehingga penyelenggaraan	kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara penyelenggara kegiatan	Data dan Informasi	Kualitas data sektoral yang kurang dapat dipertanggungjawabkan	Layanan Organisasi	Perwal no 26 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan satu	2	Kemungkinan kecil / Jarang	2	Kurang Signifikan / Kecil	7	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG											Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023							
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024											Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG							
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					kegiatan statistik sektoral tidak terlaksana sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku	statistik sektoral di pemerintah daerah				data indonesia di Kota Tangerang								
			Pengelolaan Diseminasi informasi	Negatif	Diseminasi informasi kepada masyarakat kurang optimal	Fasilitas dan stimulus pemanfaatan media KIM sebagai salah satu media diseminasi informasi masih kurang	Rencana dan Anggaran	Layanan informasi kurang tersebar luas kepada sasaran masyarakat yang cenderung lebih menyukai media interpersonal dan hiburan langsung	Layanan Organisasi	Pendataan Lembaga Komunikasi Masyarakat dan memberikan fasilitas	3	Kadang-kadang / Mungkin terjadi	2	Kurang Signifikan / Kecil	10	Rendah	Tidak	
			Pengelolaan Diseminasi informasi	Negatif	Sarpras untuk publikasi masih dibatasi dari bagian anggaran dan TKDN	Pembelian sarpras pendukung desiminasi informasi masih dibatasi	Rencana dan Anggaran	Publikasi informasi terkendala TKDN sarpras yang tidak mendukung	Layanan Organisasi	melakukan ceklis barang yang terdada di TKDN	2	Kemungkinan kecil / Jarang	3	Sedang / Medium	11	Sedang	Ya	
			Pengelolaan Diseminasi informasi	Negatif	Kurang maksimalnya data pendukung dari OPD	Kendala Pemberian data dari OPD untuk desiminasi informasi	Data dan Informasi	Data yang di sajikan masih kurang maksimal atau realtime	Layanan Organisasi	Penyajian data dilakukan dalam satu sistem (satu data) untuk update data	2	Kemungkinan kecil / Jarang	3	Sedang / Medium	11	Sedang	Ya	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
1	Terkelolanya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara digital	Persentase Penduduk ber-KTP	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara digital (Sobat Dukcapil) (SIAK)	Negatif	Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan	Masyarakat belum mengetahui tatacara pelayanan secara online	Layanan SPBE	Target Kinerja OPD Disdukcapil tidak tercapai	Kinerja	- Melakukan penyebaran informasi tatacara penggunaan sobat dukcapil baik melalui sosialisasi baik luring maupun daring (website, media sosial, zoom) - Melakukan evaluasi dan revisi website/aplikasi sobat dukcapil apabila diperlukan	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	17	Tinggi	Ya	
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga		Negatif	Masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi	Terjadi gangguan pada jaringan dan hardware	Infrastruktur SPBE	Penumpukan antrian di kantor Disdukcapil	Operasional dan Aset TIK	Melakukan pemeliharaan jaringan dan perangkat keras	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Har	13	Sedang	Ya	
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian		Negatif	Data penduduk yang tidak sesuai	Kesalahan proses input/ verifikasi data yang kurang optimal	Layanan SPBE	Meningkatnya aduan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian data	Layanan Organisasi	- Pelaksanaan evaluasi dan pelatihan SDM terkait pengelolaan administrasi kependudukan - Melakukan evaluasi dan revisi standar operasional apabila diperlukan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta	Penyediaan Informasi terkait OPD	Negatif	Informasi OPD Disdukcapil tidak update	Pengelola Informasi kurang sigap dalam menyediakan informasi	Data dan Informasi	Masyarakat tidak terinformasikan	Reputasi	Melakukan pembaharuan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Negatif, terdapat pemberitaan	7	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Perkawinan Non Muslim	Disdukcapil (Website dan Media Sosial)					kegiatan OPD Disdukcapil		informasi secara rutin								
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah																		
1	Terwujudnya pengelola perpustakaan dan arsip secara online	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan (orang)	Mengelola buku kedalam aplikasi Inlislite	Negatif	Aplikasi tidak dapat diakses	Adanya hacker	Layanan SPBE	Layanan perpustakaan terganggu	Layanan Organisasi	Melakukan koordinasi dengan tim Kominfo	4	Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	16	Tinggi	Ya	
		Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku (point)	Sosialisasi penilaian internal kearsipan ke SKPD di Kota Tangerang	Negatif	SKPD tidak bisa mengakses link yang diberikan	Sosialisasi pengisian form penilaian kurang optimal	Data dan Informasi	Data penilaian tidak lengkap	Kinerja	Membuat buku pedoman pengisian penilaian pengawasan internal kearsipan	4	Kemungkinan Kecil/ Jarang	5	Tidak dapat dilakukan audit sistem pengawasan internal	13	Sedang	Ya	
Dinas Sosial																		
1	Terkelolanya data PMKS secara Online	Persentase Penurunan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Mengelola data keluarga prasejahtera dengan : - Data Kemiskinan - Agregasi Data Kemiskinan (Prasta)	Negatif	Data Kemiskinan tidak sesuai dengan realita	Tidak adanya validasi data dilapangan	Rencana dan Anggaran	Sasaran Bansos tidak pada yang membutuhkan	Layanan Organisasi	Evaluasi metode pengumpulan data	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	5	Pemberian Layanan Tertunda lebih dari 1 Minggu	22	Sangat Tinggi	Ya	
			Mengelola informasi status penerima bantuan sosial dengan Dashboard Lumbung Pangan (Kampung Siaga)	Negatif	Adanya kesamaan data atau tumpang tindih data	Penginputan data dua kali atau lebih	Data dan Informasi	ketidak konsistensian data yang menyebabkan mis informasi	Operasional dan Aset TIK	Melakukan filterisasi dan double cek pendataan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola data untuk metadata dengan : - Pendataan & Verifikasi Penerima Bantuan Covid-19 - Pendataan & Verifikasi UMKM - Pendataan Rencana Lokasi Pemasangan Internet RT/RW (SIDATA)	Negatif	Tidak transparannya pemetaan metadata	Tidak adanya deskripsi mengenai data	Data dan Informasi	Ketidakpercayaan masyarakat terkait data yang diolah	Layanan Organisasi	Memberikan penjelasan terkait keamanan data dan data yang di olah	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
			Mengelola Informasi terkait Dinsos (Web SKPD)	Negatif	Belum terupdate berita kegiatan Dinsos	Kurangnya SDM untuk mengelola Berita kegiatan	SDM SPBE	terlihat tidak adanya kegiatan terbaru	Sumber Daya Manusia	Melakukan Penjadwalan upload kegiatan berupa foto dan deksripsi kegiatan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	13	Sedang	Ya	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Terkelolanya Laporan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) secara Online	Persentase Penurunan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	- Dokumen melebihi kapasitas	Negatif	Data Dokumen melebihi standar yang di perlukan	Batas File yang masih terlalu kecil	Data dan Informasi	Memperlambat Penguploadan Data	Layanan Organisasi	Batas File yang di perbesar	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja	11	Rendah	Tidak	
			- Sistem Error	Negatif	Sistem Error yang Stuck	Sistem Data Base yang masih Kecil	Data dan Informasi	Laporan Pekerjaan PSM menjadi Lambat	Layanan Organisasi	Sering Melaksanakan Sistem Update Berkala Per 3 Bulan	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	5	Pemberian Layanan Laporan Tertunda	22	Sangat Tinggi	Ya	
			- Kurangnya Pemahaman penggunaan pada User Laporan Kinerja PSM	Negatif	Sistem Berjalan tidak maksimal	Lambatnya Pemahaman SDM pada Sistem	SDM Pekerja Sosial Masyarakat	Memperlambat Penguploadan Laporan Kinerja PSM	Sumber Daya Manusia	Sosialisasi & Pelatihan Berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja	11	Rendah	Tidak	
Dinas Kesehatan																		
1	Terkelolanya Informasi terkait kesehatan daerah secara komprehensif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan	- Melakukan sosialisasi mengenai penilaian IKM melalui aplikasi indikator nasional mutu. - Monitoring dan Evaluasi pengimputan data	Negatif	Belum optimalnya prosedur pengimputan data kepuasan masyarakat	Kurangnya pemahaman tentang pengisian data indikator nasional mutu terkait kepuasan masyarakat	Data dan Informasi	Tidak terukurnya mutu pada pelayanan kesehatan melalui indek kepuasan masyarakat.	Kinerja	Imputan Data Indikator Nasional Mutu terkait kepuasan masyarakat setiap semester	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	17	Tinggi	Ya	
		Cakupan penduduk kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	Mendata - Rencana Kebutuhan Anggaran - Prediksi Perhitungan jumlah peserta PBPU dan BP Pemda. - Perhitungan Jumlah Penduduk Kota Tangerang berdasarkan Data DUKCAPIL.	Negatif	Masih adanya penduduk Kota Tangerang yang belum memiliki jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya tidak aktif	Penduduk Kota Tangerang yang terkena PHK sehingga terputusnya jaminan kesehatan (non aktif) dari perusahaan tempat dia bekerja.	Data dan Informasi	Menurunnya jumlah cakupan penduduk yang memiliki JKN aktif	Kinerja	Rekonsiliasi data kepesertaan JKN setiap triwulan	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya	
						Penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan yang dibayar mandiri namun sudah tidak pernah membayar iuran wajib (menunggak).	Data dan Informasi	Menurunnya jumlah cakupan penduduk yang memiliki JKN aktif	Kinerja	Rekonsiliasi data kepesertaan JKN setiap triwulan	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya	
						Penduduk Kota Tangerang yang terdaftar sebagai peserta JKN PBI APBN berdasarkan data Dinsos (DTKS) dan terkena penonaktifan JKN berdasarkan verifikasi Kementerian Sosial (non aktif oleh SK Mensos)	Data dan Informasi	Menurunnya jumlah cakupan penduduk yang memiliki JKN aktif	Kinerja	Rekonsiliasi data kepesertaan JKN setiap triwulan	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya	
						Bayi baru lahir dari peserta yang didaftarkan oleh Pemda (BPBU BP Pemda) yang tidak secara otomatis terdaftar sebagai peserta aktif oleh sistem BPJS Kesehatan.	Data dan Informasi	Tidak tercapainya target cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Kinerja	Rekonsiliasi data kepesertaan JKN setiap triwulan	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG											Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023							
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024											Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG							
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO				EVALUASI RISIKO				
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Prevalensi balita gizi kurang	Mengelola informasi surveilans gizi melalui elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), melalui: - Melakukan input hasil pencatatan pemantauan pertumbuhan balita di masyarakat (Posyandu) - Melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput - Melakukan analisa data hasil pemantauan pertumbuhan balita, termasuk status gizi	Negatif	Belum optimalnya penginputan data hasil pemantauan pertumbuhan pada aplikasi e-PPGBM	- Keterbatasan SDM penginput - Belum terintegrasinya aplikasi e-PPGBM dengan aplikasi yang dikembangkan di Kota Tangerang	Data dan Informasi	Prevalensi balita gizi kurang under/over-reported	Kinerja	Mengajukan surat integrasi aplikasi e-PPGBM kepada Kementerian Kesehatan RI	3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya	
		Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Mengelola informasi pencatatan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), melalui:	Negatif	Belum optimalnya penginputan data hasil skrining kesehatan pada aplikasi ASIK	- Keterbatasan SDM penginput - Belum terintegrasinya aplikasi ASIK dengan aplikasi lain yang digunakan sebagai data dasar seperti ePuskesmas-	Data dan Informasi	Cakupan Under reported dan kehilangan data yang sudah diinput	Kinerja	-Melakukan pelatihan ASIK dan menyampaikan kendala pada DTO Kemenkes	4	Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	19	Tinggi	Ya	
			Mengelola Informasi terkait SI PTM (Sistem Informasi PTM)	Negatif	Belum optimalnya penginputan data hasil skrining kesehatan pada aplikasi SI PTM	-Penginputan secara manual dan upload file sering gagal -Belum terintegrasinya aplikasi SI PTM dengan aplikasi lain yang digunakan sebagai data dasar seperti ePuskesmas	Data dan Informasi	Cakupan Under reported dan kehilangan data yang sudah diinput - Tidak efisiennya waktu dan memerlukan SDM khusus inputer	Kinerja	-Melakukan pelatihan ASIK dan menyampaikan kendala pada DTO Kemenkes Menggunakan manual data dan menggunakan excel	4	Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	19	Tinggi		
			Mengelola informasi seputar ePuskesmas (web PKM)	Negatif	Data tidak terintegrasi dengan Aplikasi yang digunakan oleh program	-Sistem belum dikembangkan optimal -Keterbatasan SDM penginput	Data dan Informasi	-Data dasar tidak tersedia -Bukti layanan tidak lengkap	Kinerja	Monitoring dan pembaharuan data rutin	4	Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	19	Tinggi		
Dinas Pendidikan																		
1	Terkelolanya Informasi terkait Data Pendidikan secara komprehensif	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK/RA/ Sederajat	Mengelola informasi terkait data pokok pendidikan (Data Pokok Pendidikan)	Negatif	Hilangnya data atau tidak lengkapnya Data	Erornya sistem saat penginputan data	Data dan Informasi	Data tidak ada dan menghambat Proses bisnis	Operasional dan Aset TIK	Melakukan Backup database dan melakukan pembenahan dalam server aplikasi	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	Mengelola data sinkronisasi satuan pendidikan	Negatif	Data belum terupdate	Kurangnya perhatian Pengelola untuk memperbaharui informasinya	Data dan Informasi	Data tidak realtime dan menghambat proses bisnis	Operasional dan Aset TIK	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan	11	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IDENTIFIKASI RISIKO										ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		SD/MI/Paket A	(Sinkronisasi Sekolah)											kerja selama 1-3 Hari				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Mengelola perpindahan atau mutasi siswa dari sekolah ke sekolah lainnya (e-Pendidikan) pada jenjang SD dan SMP	Negatif	Tampilan Dashboard yang masih membingungkan	Belum tersampainya apa yang dimau dan apa yang dikerjakan oleh Programmer	Aplikasi SPBE	Kebingungan peserta dalam penggunaan e- pendidikan	Operasional dan Aset TIK	Masih dilakukannya pengembangan tampilan web kedepannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	Terkelolanya informasi tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perempuan keluarga miskin	Mengelola itsbat Nikah dengan Formulir Isian Pendaftaran	Negatif	Tampilan UI yang masih terlihat sulit untuk dipahami oleh pengguna	Belum tersampainya secara efektif data informasi yang dibutuhkan oleh client dengan aplikasi yang dibuat oleh programmer	Aplikasi SPBE	Data informasi tidak dapat dikumpulkan secara efektif karena kesulitan peserta dalam mengisi data informasi yang diminta oleh client didalam aplikasi yang dibuat	Operasional dan Aset TIK	Melaksanakan pengembangan tampilan web	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	
				Negatif	Masih ada data dari beberapa wilayah yang susah untuk diunggah	Belum tereduksi dengan meratanya penggunaan itsbat nikah	Layanan SPBE	Data di beberapa wilayah masih harus manual	Layanan Organisasi	Meningkatkan edukasi dan pendampingan ke setiap wilayah	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	
		Persentase Kota Layak Anak	Mengelola Web Informasi SKPD	Negatif	Data informasi belum terupdate	Kurangnya perhatian Pengelola untuk memperbaharui informasinya	Aplikasi SPBE	Kurang percayanya warga kepada OPD karena belum adanya bukti kegiatan terbaru	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
1	Terkelolanya Informasi dan data terkait SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga	Prosentase SDM Kepemudaan Yang Berprestasi(%)	Mengelola data seputar : - Tambah venue - Lihat data venue - Lihat data peminjaman - Tambah data biaya sewa - Tambah data lapangan (Tim Sport Admin)	Negatif	Pembayaran dari Wajib Retribusi Tidak Terdeteksi oleh aplikasi Timsport	Gangguan pada jaringan / sistem BJB	Layanan SPBE	-Ketidakpuasan Wajib Retribusi - Tabrakan Jadwal Peminjaman - Terhambatnya proses pemindah bukaan dan Rekonsiliasi Harian	Reputasi	Rekonsiliasi pencatatan transaksi harian	3	1 sampai 4 kali dalam sebulan	3	Gangguan menghambat pekerjaan, pengaduan tersebar di media sosial	14	Sedang	Ya	
				Negatif	Pembayaran dari Wajib Retribusi Tidak Sampai ke Rekening Penampungan	Gangguan pada jaringan / sistem perbankan	Layanan SPBE	-Ketidakpuasan Wajib Retribusi	Reputasi	Menunggu pengaduan Wajib Retribusi	2	5- 10 kali dalam setahun	3	pengaduan tersebar di media sosial	11	Sedang	Ya	
				Negatif	Sarpras Tidak Dapat Digunakan, sedangkan jadwal sudah di booking	- Cuaca Hujan (Lap. Sepak Bola) - Kegiatan Mendadak dari pemerintah Daerah - Kerusakan fasilitas sarpras	Layanan SPBE	-Ketidakpuasan wajib retribusi - Admin harus secara manual memindahkan jadwal	Reputasi	- Membuat prosedur/Fitur pemindahan jadwal yang berbasis user - Merencanakan kegiatan event lebih dari 2 minggu sebelum acara - Mempercepat pemeliharaan	4	Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	3	pengaduan tersebar di media sosial	16	Tinggi	Ya	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga (Web SKPD)	Negatif	Data informasi belum terupdate	Kurangnya perhatian Pengelola untuk memperbaharui informasinya	Data dan Informasi	Kurang percayanya warga kepada OPD karena belum adanya bukti kegiatan terbaru	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
Dinas Ketenagakerjaan																		
1	Terkelolanya Informasi portal ketenagakerjaan (Tangerang Cakap Kerja) secara online	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Mengelola Pendaftaran peserta pelatihan Wirausaha	Negatif	Informasi yang dimuat dalam jadwal pendaftaran tidak Update	Admin tidak mendapatkan data aktual untuk dipublikasi	Data dan Informasi	Calon Peserta Pelatihan tidak bisa mendaftar ke Pelatihan yang sudah disediakan	Layanan Organisasi	Adanya Ketentuan/ SOP dalam penyampaian data/ input data aplikasi	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya	
						Admin kurang melakukan crosscheck data yang perlu dimuat dalam Pendaftaran Wirausaha.	SDM SPBE											
				Negatif	Terlambat dalam menyampaikan informasi peserta yang lolos sebagai peserta pelatihan	Pihak terkait dalam menyampaikan data melebihi dari tenggat waktu yang sudah ditetapkan	Data dan Informasi	Calon Peserta Pelatihan tidak bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan	Layanan Organisasi	Adanya Ketentuan/ SOP dalam penyampaian data/ input data aplikasi	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya	
						Admin kurang melakukan follow up data kepada pihak terkait.	SDM SPBE											
	Jumlah Lowongan Kerja		Mengelola Pendaftaran peserta pelatihan BLK	Negatif	Informasi yang dimuat dalam jadwal pendaftaran tidak Update	Admin tidak mendapatkan data aktual untuk dipublikasi	Data dan Informasi	Calon Peserta Pelatihan tidak bisa mendaftar ke Pelatihan yang sudah disediakan	Layanan Organisasi	Adanya Ketentuan/ SOP dalam penyampaian data/ input data aplikasi	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya	
						Admin kurang melakukan crosscheck data yang perlu dimuat dalam Pendaftaran Wirausaha.	SDM SPBE											
				Negatif	Terlambat dalam menyampaikan informasi peserta yang lolos sebagai peserta pelatihan	Pihak terkait dalam menyampaikan data melebihi dari tenggat waktu yang sudah ditetapkan	Data dan Informasi	Calon Peserta Pelatihan tidak bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan	Layanan Organisasi	Adanya Ketentuan/ SOP dalam penyampaian data/ input data aplikasi	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya	
						Admin kurang melakukan follow up data kepada pihak terkait.	SDM SPBE											
	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan		Mengelola Job Fair dengan : - Data Lowongan - Data Perusahaan - Pengaturan Job Fair - Data hasil Job Fair (Pendaftaran Job Fair)	Negatif	Pendaftaran job fair tidak bisa diakses oleh pencari kerja	Pencari kerja kurang paham dengan mekanisme pendaftaran online	Aplikasi SPBE	Job Seekers tidak bisa mengikuti Job Fair Online	Reputasi	- Proses bisnis pengelolaan Aplikasi sudah terbentuk - Sudah ada petunjuk pengisian dalam pengumuman pelaksanaan pelaksanan Jobfair Online	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
						Pendaftaran Job fair Online kurang tersosialisasi dengan baik	Proyek Pembangunan/Pengemb	Job fair online Disnaker kurang diminati oleh Job Seekers										



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IDENTIFIKASI RISIKO										ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO	
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							angan Sistem												
			Mengelola Pendaftaran Kartu Kuning (AK/I)	Negatif	Terlambat dalam memverifikasi dan memvalidasi pengajuan Kartu Kuning (AK/I)	Kesalahan Unggah data dalam aplikasi	Data dan Informasi	Pelayanan Kartu kuning (AK/I) menjadi terlambat	Kinerja	Melakukan Sosialisasi terkait tutorial pembuatan kartu kuning (AKI) melalui media sosial lainnya dan kanal publikasi lainnya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	13	Sedang	Ya		
						Keterbatasan jumlah SDM untuk memverifikasi dan validasi dan banyaknya antrian registrasi	SDM SPBE			Melakukan analisa beban kerja dan kebutuhan SDM									
						SDM yang ditugaskan untuk memverifikasi dan validasi tidak mengecek data secara berkala.	SDM SPBE			Jadwal pengecekan verifikasi dilakukan secara rutin dan berkala.									
	Terkelolanya Informasi Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan secara Online		Mengelola Tata Persuratan Online (Eoffice) : (Admin Eoffice)	Negatif	Terlambatnya dalam pengupdaten data surat masuk maupun keluar	Admin tidak mengupdate data secara rutin dan berkala	SDM SPBE	Pelayanan Dinas menjadi terganggu karena keterlambatan dalam arus informasi	Layanan Organisasi	Jadwal pengecekan dan update data dilakukan secara rutin dan berkala.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak		
				Negatif	Informasi didalam Eoffice tidak Update	Admin kurang melakukan crosscheck data yang sudah masuk di eoffice	SDM SPBE			Adanya Ketentuan/ SOP dalam penyampaian permasalahan	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya		
			Mengelola data kepegawaian secara online (SIMASN)	Negatif	Terlambatnya dalam pengupdaten data Kepegawaian di aplikasi	Admin tidak mengupdate data secara rutin dan berkala	SDM SPBE	Data Kepegawaian yang tidak update dan akan berakibat langsung ke SDM	Kinerja	Jadwal pengecekan dan update data dilakukan secara rutin dan berkala.	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya		
						Permasalahan pada SDM akan berdampak pada pelayanan													
			Mengelola data Perencanaan Penganggaran dan Realisasi kegiatan melalui aplikasi (SIPD)	Negatif	Informasi yang dimuat dalam SIPD tidak update	Kinerja aplikasi menurun karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan	Aplikasi SPBE	Data yang tidak update akan berdampak langsung pada pelayanan Administrasi	Layanan Organisasi	- Proses bisnis pengelolaan Aplikasi sudah terbentuk - Jadwal pengecekan dan update data dilakukan secara rutin dan berkala.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak		
					Terlambat dalam mengupdate informasi di SIPD	Admin kurang melakukan follow up data kepada pihak terkait.	SDM SPBE	Data yang tidak update akan berdampak langsung pada pelayanan Administrasi											
			Mengelola data Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi (SIRUP)	Negatif	Informasi yang dimuat dalam SIRUP tidak update	Kinerja aplikasi menurun karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan	Aplikasi SPBE	Data yang tidak update akan berdampak langsung pada pelayanan Administrasi	Layanan Organisasi	- Proses bisnis pengelolaan Aplikasi sudah terbentuk - Jadwal	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	13	Sedang	Ya		



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																			
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023									
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG					
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										pengecekan dan update data dilakukan secara rutin dan berkala.									
					Terlambat dalam mengupdate informasi di SIRUP	Admin kurang melakukan follow up data kepada pihak terkait.	SDM SPBE	Data yang tidak update akan berdampak langsung pada pelayanan Administrasi											
	Terkelolanya Sarana media publikasi dan media komunikasi masyarakat		Melakukan Publikasi Program maupun kegiatan Dinas (Admin Sosial Media)	Negatif	Informasi yang dimuat dalam Sosial Media Dinas tidak update	Admin tidak mendapatkan data aktual untuk dipublikasi	Data dan Informasi	Masyarakat tidak memperoleh Informasi yang update tentang program dan kegiatan Dinas	Reputasi	- Peningkatan kemampuan admin Sosial media dalam pembuatan konten - Jadwal pembuatan konten dan update dilakukan secara rutin dan berkala.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak		
						Admin tidak melakukan update konten secara berkala	SDM SPBE												
			Menjawab pertanyaan,aduan saran maupun kritik (Admin Pengaduan LAKSA)	Negatif	Admin Terlambat menjawab pertanyaan ,saran dari masyarakat	*Admin tidak mengupdate data secara rutin dan berkala	SDM SPBE	- Komunikasi dengan masyarakat akan terganggu - reputasi Dinas akan terganggu karena tidak responsif terhadap keluhan masyarakat	Layanan Organisasi	- Pembuatan SOP dan SPM dalam pelayanan - Jadwal pengecekan pertanyaan dan menjawab dilakukan secara rutin dan berkala.	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	14	Sedang	Ya		
					Informasi yang diberikan admin tidak solutif	Admin tidak memperoleh data dan jawaban dari pihak terkait	Data dan Informasi												
			Menjawab pertanyaan,aduan saran maupun kritik (Admin Email Dinas)	Negatif	Admin Terlambat menjawab pertanyaan,komentar ,saran dari masyarakat	*Admin tidak mengupdate data secara rutin dan berkala	SDM SPBE	- Komunikasi dengan masyarakat akan terganggu - reputasi Dinas akan terganggu karena tidak responsif terhadap keluhan masyarakat	Layanan Organisasi	- Pembuatan SOP dan SPM dalam pelayanan - Jadwal pengecekan pertanyaan dan menjawab dilakukan secara rutin dan berkala.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak		
					Informasi yang diberikan admin tidak solutif	Admin tidak memperoleh data dan jawaban dari pihak terkait	Data dan Informasi												
			Menjawab pertanyaan,aduan saran maupun kritik (Admin WA Dinas)	Negatif	Admin Terlambat menjawab pertanyaan,komentar ,saran dari masyarakat	*Admin tidak mengupdate data secara rutin dan berkala	SDM SPBE	- Komunikasi dengan masyarakat akan terganggu - reputasi Dinas akan terganggu karena tidak responsif terhadap keluhan masyarakat	Layanan Organisasi	- Pembuatan SOP dan SPM dalam pelayanan - Jadwal pengecekan pertanyaan dan menjawab dilakukan secara rutin dan berkala.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	13	Sedang	Ya		
					Informasi yang diberikan admin tidak solutif	Admin tidak memperoleh data dan jawaban dari pihak terkait	Data dan Informasi												



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																			
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023									
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG					
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO				
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Mengelola Informasi terkait SKPD Disnaker (Web SKPD)	Negatif	Informasi profil Disnaker yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website. SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	Rencana dan Anggaran Data dan Informasi SDM SPBE	Informasi keterbukaan publik Disnakerja kurang baik.	Kinerja	Jadwal update profil telah disusun. Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales. Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	13	Sedang	Ya		
	Terkelolanya informasi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara online		Mengelola Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta secara online (OSS)	Negatif	Terlambat dalam melakukan pemeriksaan berkas administrasi dan verifikasi permohonan perizinan LPK Swasta	Admin tidak melakukan pengecekan data secara rutin/berkala Kinerja aplikasi menurun karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan	SDM SPBE Aplikasi SPBE	Proses Rekomendasi ijin LPK Swasta terhambat	Layanan Organisasi	Jadwal pengecekan data dilakukan secara rutin/berkala	2	Kemungkinan Kecil/Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	6	Rendah	Tidak		
			Mengelola Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan secara Online (LPK)	Negatif	Terlambat dalam melakukan verifikasi pendaftaran akun, pemeriksaan berkas dan verifikasi pendaftaran LPK	Admin tidak melakukan pengecekan data secara rutin/berkala	SDM SPBE	Proses Pendaftaran LPK Perusahaan terhambat	Layanan Organisasi	Jadwal pengecekan data dilakukan secara rutin/berkala	2	Kemungkinan Kecil/Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	6	Rendah	Tidak		
												3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	3		9	Rendah	Tidak	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																			
1	Terkelolanya informasi pariwisata di Kota Tangerang	Jumlah kesenian daerah yang lestari Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	Tersedia aplikasi serupa dari Lembaga lain (SIPARDA, SIPARNAS)	Negatif	Silaku Hotel tidak Update	Belum adanya regulasi yang mengharuskan pihak hotel untuk memberikan data secara terprogram/ periodik Disbudpar kurang melakukan follow up data kepada pihak terkait/ pemilik hotel	Kepatuhan terhadap peraturan Data dan Informasi	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disbudpar kurang tidak akuntabel - Pimpinan tidak mendapatkan informasi mengenai sebaran informasi pengunjung serta hasil pendapatan yang didapatkan oleh daerah	Kinerja	Sudah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Silaku Hotel	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak		
				Negatif	Silaku Hotel sering mengalami gangguan sistem	Disbudpar tidak melakukan pengembangan aplikasi secara terprogram	Proyek pembangunan/ Pengembangan Sistem	- Pengguna/ pihak hotel kurang berminat dalam memberikan data kunjungan kepada Aplikasi Silaku Hotel - Aplikasi kurang	Layanan Organisasi	Adanya kerjasama dengan vendor	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak		



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								termanfaatkan dengan baik										
		Jumlah kunjungan wisatawan	Mengelola informasi mengenai : 1. Taman 2. Tanaman 3. Reservasi Taman (Portal Taman Kita)	Negatif	Fitur dalam Aplikasi Portal Taman Kita tidak dapat diakses dengan optimal	Maintenance Aplikasi kurang terprogram	Proyek pembangunan/ Pengembangan Sistem	- Kebutuhan pengguna aplikasi/ masyarakat tidak dapat dipenuhi. - Aplikasi kurang diminati oleh masyarakat	Layanan Organisasi	Adanya kerjasama dengan vendor	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Ya	
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)				SDM kurang memiliki kompetensi dalam melakukan pengembangan Aplikasi	SDM SPBE											
			Mengelola Informasi terkait SKPD Disbudpar (Web SKPD)	Negatif	Informasi profil Disbudpar yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik Disbudpar kurang baik.	Kinerja	- Jadwal update profil telah disusun. - Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales. - Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Informasi publik tidak tersampaikan	7	Rendah	Tidak	
						Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi											
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE											
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM																		
1	Terkelolanya Layanan dan informasi dalam peningkatan kualitas perekonomian	Nilai PDRB	Mengelola Profil SKPD (Web SKPD)	Negatif	Informasi profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik instansi kurang baik.	Kinerja	- Jadwal update profil telah disusun. - Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales. - Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB Kota Tangerang	Mengelola Layanan PPID (PPID)	Negatif	Data dan informasi yang dimuat PPID tidak lengkap	Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website. SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	Data dan Informasi SDM SPBE SDM SPBE	- Pengguna Aplikasi tidak mendapatkan informasi secara lengkap dan komprehensif. - Keterbukaan informasi publik instansi menurun	Layanan Organisasi	Adanya regulasi/ SOP mengenai pengelolaan PPID	2	Kemungkinan Kecil/ Jarak	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	
		Nilai PDRB Sektor (ADHK) Perdagangan	Mengelola pednafataran UMKM dan juga informasi terkait UMKM (Web UKM)	Negatif	Pendaftaran UMKM tidak bisa diakses oleh pengguna	Crosscheck data kurang dilakukan dengan baik oleh pengelola PPID Pihak terkait tidak mengirimkan data secara lengkap kepada pengelola PPID Pengguna kurang paham dengan mekanisme pendaftaran online Pendaftaran UMKM kurang tersosialisasi dengan baik Banyaknya pengguna yang mengakses website	SDM SPBE Data dan Informasi SDM SPBE Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE	- Pengguna tidak bisa mendaftarkan UMKM secara online - Pendaftaran online UMKM kurang diminati oleh pengguna	Layanan Organisasi	Website pendaftaran online UMKM sudah disosialisasikan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarak	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
		Indeks pengeluaran (daya beli)		Negatif	Tampilan website kurang responsive dan tidak komunikatif	Pengelola website tidak melakukan pengembangan	SDM SPBE	- Pengguna web tidak nyaman saat mengakses informasi website melalui mobile. - Web kurang diminati oleh pengguna	Layanan Organisasi	Website pendaftaran online UMKM sudah disosialisasikan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarak	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	
						Tampilan layout website tidak fleksibel saat diakses melalui mobile.	Aplikasi SPBE											



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
1	Terkelolanya Informasi terkait Dinas DPMPPTSP	Tingkat Pertumbuhan Investasi Daerah	Mengelola perizinan untuk admin (Perizinan CMS)	Negatif	Perizinan online tidak menyederhanakan Birokrasi	Pengelola kurang paham dengan alur birokrasi perizinan	SDM SPBE	Penggunaan perizinan online tidak optimal	Kinerja	Bekerjasama dengan pihak pengembang web/Apk online	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Ya	5
						Mekanisme perizinan yang tidak bisa ditransformasikan menjadi online	Inovasi	- Perizinan masih dirasa berbelit-belit - Pengguna (pengaju perizinan) tetap harus mendatangi Instansi secara tatap muka	Layanan organisasi	Sudah dilakukan sosialisasi kepada pengguna mengenai perizinan online	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	3
		Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas DPMPPTSP (Web SKPD)	Negatif	Informasi profil DPMPPTSP yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik DPMPPTSP kurang baik.	Kinerja	- Jadwal update profil telah disusun. - Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales. - Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	7	Rendah	ya	6
						Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi											
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE											
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengelola perizinan online dengan : - Simulasi Retribusi - Tutorial - Bantuan (Perizinan Online)	Negatif	Aplikasi tidak user friendly	Pengembang aplikasi kurang memetakan hal-hal yang perlu disederhanakan dalam proses perizinan	Proyek pengembangan dan pembangunan sistem	Proses perizinan masih rigid	Layanan organisasi	Bekerjasama dengan pihak pengembang web/Apk online	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	2
						Fitur dalam aplikasi tidak terisi data-data yang dibutuhkan secara lengkap	Aplikasi SPBE	Aplikasi kurang diminati oleh pengguna	Layanan organisasi	Sudah dilakukan sosialisasi kepada pengguna mengenai perizinan online	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	1
						Aplikasi sering mengalami bug system	Aplikasi SPBE											
		Presentase Pelayanan Berdasarkan SOP	Aliran data pada aplikasi existing saat ini tidak optimal.	Negatif	Aliran data pada aplikasi existing saat ini tidak optimal.	Tidak tersedianya peta aliran data (Data Flow Diagram) pada saat design pengembangan sistem aplikasi	Proses Bisnis	Proses Output layanan TIK menjadi berkurang. Aplikasi/sistem tidak berjalan dengan baik.	Operasional dan aset TIK	Melakukan updating data secara manual dengan sumber data yang dicari secara mandiri	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Ya	4



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG											Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023							
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024											Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG							
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan																		
1	Terkelolanya Data Informasi terkait SKPD Dinas Perumahan dan Pertanahan	Luas lingkungan permukiman kumuh	Mengelola informasi mengenai Layanan Perpanjangan Tanah Pemakaman (melalui Web Perijinan)	Negatif	Data dalam Web terpisah-pisah (database belum tersedia) dan sulit untuk melakukan integrasi data.	Tidak adanya standar data dan meta data	Data dan Informasi	- Data tidak tersentralisasi dan kualitas data tidak terjaga. - Kesulitan dalam pengumpulan data.	Kinerja	Melakukan update daftar data yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk mengetahui produsen data.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
		Persentase rumah layak huni	Mengelola data dan informasi kedinaaan	Negatif	Informasi profil Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik instansi kurang baik.	Kinerja	Jadwal update profil telah disusun.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
						Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi			Akan dikembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data kedinasan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
						Tidak adanya tata kelola pengembangan aplikasi	Proses Bisnis											
						Tidak tersedianya SOP dan kebijakan internal sebagai dasar penggunaan aplikasi	Proses Bisnis											
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE			Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
		Persentase tingkat cakupan layanan air bersih	Mengelola pendataan PSU	Negatif	Aliran data pada aplikasi PSU tidak optimal	Tidak tersedianya peta aliran data (Data Flow Diagram) pada saat design pengembangan sistem	Data dan Informasi	- Proses Output layanan Aplikasi/ TIK menjadi berkurang. - Aplikasi kurang termanfaatkan dengan optimal.	Operasional dan Aset TIK	Melakukan updating data secara manual dengan sumber data yang dicari secara mandiri, Akan dikembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan PSU	1	Sangat Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	8	Rendah	Tidak	
		Persentase tingkat cakupan layanan pengolahan air limbah domestik	Mengelola pendataan kepemilikan rumah tidak layak huni	Negatif	Aplikasi SIDATA yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Akses aplikasi yang masih menggunakan setting/password default dari vendor.	Keamanan SPBE	- Kurangnya kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan. - masih ketergantungan kepada admin pemerintah pusat	Reputasi	, Sedang dikembangkan aplikasi pendukung diluar aplikasi yang sudah ada (SIMBARULI)	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	13	Sedang	Ya	
						Aplikasi belum di uji melalui penetration test.	Proyek pembangunan atau											



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																			
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023									
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG									
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							pengembangan sistem												
						Pengelola aplikasi belum memahami mengenai keamanan data aplikasi	SDM SPBE												
		Persentase bangunan yang laik fungsi	Mengelola perijinan online pada Aplikasi SIMBG (aplikasi dr kementerian PUPR) utk pengajuan bangunan gedung, diantaranya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)	Negatif	Pengembangan aplikasi pelayanan bangunan belum optimal, Keterbatasan penguploadan dokumen perencanaan pemohon (maks 40-50 MB, scr teknis ada 80 MB (apartemen, bangunan diatas It)	Komitmen pimpinan dalam hal tata kelola kebijakan manajemen SI masih kurang	SDM SPBE	- Aplikasi kurang dapat dimanfaatkan oleh pengguna - Output kinerja menjadi berkurang khususnya dalam SPBE.	Operasional dan Aset TIK	Sudah dikoordinasikan permasalahan kapasitas aplikasi ke pemerintah pusat, Sedang dikembangkan aplikasi pendukung diluar aplikasi utama	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja	11	Rendah	Tidak		
Dinas Lingkungan Hidup																			
1	Terkelolanya Informasi terkait OPD Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengelola Informasi terkait OPD Dinas Lingkungan Hidup (Web & Media Sosial OPD)	Negatif	Informasi profil dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dimuat dalam web dan media sosial OPD tidak update	Pelaksanaan update data profil dan kegiatan belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik instansi kurang baik.	Kinerja	Jadwal update profil dan kegiatan telah disusun.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	23	
						Minimnya pelatihan yang bersertifikat nasional/internasional dibidang aplikasi, data dan manajemen SI.	Rencana dan Anggaran			Peningkatan Kapasitas Pegawai dibidang aplikasi, data dan manajemen SI	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	8	
						Pengelola belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi			Data terkini sudah disiapkan sebelum jadwal update.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	22	
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil dan kegiatan belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE			Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	21	
				Negatif	Aplikasi/ Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Akses Aplikasi/ Sistem Informasi yang masih menggunakan setting/password default dari pihak pengembang.	Keamanan SPBE	Kurangnya kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan.	Reputasi	mengganti password default	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	20	
						Aplikasi/ Sistem Informasi belum di uji melalui penetration test.	Proyek pembangunan atau pengembangan sistem	Masih ketergantungan kepada pihak pengembang	Sumber Daya Manusia	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)									
						Pengelola aplikasi belum memahami mengenai keamanan data aplikasi	SDM SPBE												
				Negatif	Informasi profil dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Koneksi jaringan atau server bermasalah	Infrastruktur SPBE	- tidak bisa melakukan updating data profil dan kegiatan	Layanan Organisasi	Sudah adanya kerjasama dengan pihak	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak		



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																			
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023									
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara					PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					yang dimuat dalam web OPD tidak dapat diakses oleh publik			- menghambat publik untuk mengakses informasi		pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)									
						Terjadinya Bencana Alam	Infrastruktur SPBE	- tidak bisa melakukan updating data profil dan kegiatan - menghambat publik untuk mengakses informasi	Layanan Organisasi	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)	1	Kemungkinan Sangat Kecil	5	Pemberian Layanan Tertunda sampai keadaan kondusif	20	Sangat Tinggi	Tidak	3	
		Tingkat Pengelolaan Sampah	Mengelola informasi data berupa : - Data pengelolaan sampah - Komposisi sampah masuk (GREEN KOTA TANGERANG)	Negatif	Portal web Green Kota Tangerang tidak mendapatkan data update rutin dari pihak terkait	Portal web tidak disosialisasikan sebelumnya secara masif kepada para pemangku kepentingan.	Proyek pembangunan dan pengembangan sistem	Informasi yang dimuat dalam portal web tidak aktual	Operasional dan aset TIK	Adanya database mengenai informasi Green Kota Tangerang	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	4	
						Minimnya pelatihan yang bersertifikat nasional/internasional dibidang aplikasi, data dan manajemen SI.	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik instansi kurang baik.	Layanan Organisasi	Peningkatan Kapasitas Pegawai dibidang aplikasi, data dan manajemen SI	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	5	
						Pelaksanaan update data portal web belum terprogram	Rencana dan Anggaran		Kinerja	Jadwal update profil dan kegiatan telah disusun.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	14	
						Pengelola belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi			Data terkini sudah disiapkan sebelum jadwal update.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	13	
						SDM yang ditugaskan dalam portal web belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE			Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	12	
				Negatif	Aplikasi/ Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Akses Aplikasi/ Sistem Informasi yang masih menggunakan setting/password default dari pihak pengembang.	Keamanan SPBE	Kurangnya kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan.	Reputasi	mengganti password default	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	11	
						Aplikasi/ Sistem Informasi belum di uji melalui penetration test.	Proyek pembangunan atau pengembangan sistem	Masih ketergantungan kepada pihak pengembang	Sumber Daya Manusia	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	10	
						Pengelola aplikasi belum memahami mengenai keamanan data aplikasi	SDM SPBE												
				Negatif	Portal Web Green tidak dapat diakses oleh publik	Koneksi jaringan atau server bermasalah	Infrastruktur SPBE	- tidak bisa melakukan updating portal web - menghambat publik untuk mengakses informasi	Layanan Organisasi	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	9	
						Terjadinya Bencana Alam	Infrastruktur SPBE	- tidak bisa melakukan updating portal web - menghambat publik	Layanan Organisasi	Sudah adanya kerjasama dengan pihak	1	Kemungkinan Sangat Kecil	5	Pemberian Layanan Tertunda	20	Sangat Tinggi	Tidak	1	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				: PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								untuk mengakses informasi		pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)				sampai keadaan kondusif				
		Indeks kualitas air (IKA)	Mengelola informasi berupa : - Kualitas Udara - Kualitas Air - Peta Sebaran dampak - Pelaporan Limbah Cair - Bank Pohon (Form aplikasi pengajuan permintaan bibit pohon) - Peta Sebaran (Perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan) (Sistem Informasi Lingkungan)	Negatif	Kekurangan SDM yang paham menangani troubleshooting dan pengembangan portal sistem informasi lingkungan.	Rekrutmen pegawai ASN tidak berdasarkan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan	SDM SPBE	Kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan layanan aplikasi, data, manajemen SI dan cenderung membutuhkan waktu yang lama.	Layanan Organisasi	Melakukan pendidikan ke jenjang lebih tinggi secara mandiri oleh masing-masing personil SDM.M16	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	6
		Indeks kualitas udara (IKU)				Minimnya pelatihan yang bersertifikat nasional/internasional dibidang aplikasi, data dan manajemen SI.	Rencana dan anggaran	Layanan informasi online kurang termanfaatkan dengan baik										
		Indeks kualitasutupan lahan (IKTL)				Portal web tidak di sosialisasikan sebelumnya secara masif kepada para pemangku kepentingan.	Proyek pembangunan dan pengembangan sistem	Informasi yang dimuat dalam portal web tidak aktual	Operasional dan aset TIK	Adanya database mengenai informasi SIL Kota Tangerang	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	13	Sedang	Ya	7
						Pelaksanaan update data portal web belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik instansi kurang baik.	Kinerja	Jadwal update profil dan kegiatan telah disusun.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	19
						Pengelola belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi			Data terkini sudah disiapkan sebelum jadwal update.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	18
						SDM yang ditugaskan dalam portal web belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE			Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	17
				Negatif	Aplikasi/ Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Akses Aplikasi/ Sistem Informasi yang masih menggunakan setting/password default dari pihak pengembang.	Keamanan SPBE	Kurangnya kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan.	Reputasi	mengganti password default	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	16
						Aplikasi/ Sistem Informasi belum di uji melalui penetration test.	Proyek pembangunan atau pengembangan sistem	Masih ketergantungan kepada pihak pengembang	Sumber Daya Manusia	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)								



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO					EVALUASI RISIKO			
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengelola aplikasi belum memahami mengenai keamanan data aplikasi	SDM SPBE											
				Negatif	Portal sistem informasi lingkungan tidak dapat diakses oleh publik	Koneksi jaringan atau server bermasalah	Infrastruktur SPBE	- tidak bisa melakukan updating portal web - menghambat publik untuk mengakses informasi	Layanan Organisasi	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)	2	Kemungkinan Kecil/ Jarak	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	15
						Terjadinya Bencana Alam	Infrastruktur SPBE	- tidak bisa melakukan updating portal web - menghambat publik untuk mengakses informasi	Layanan Organisasi	Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi (Dinas Kominfo)	1	Kemungkinan Sangat Kecil	5	Pemberian Layanan Tertunda sampai keadaan kondusif	20	Tinggi	Tidak	2
Dinas Perhubungan																		
1	Terkelolanya Informasi terkait SKPD Dinas Perhubungan	Prosesntase titik kemacetan yang tertangani	Memonitoring dan mengelola perencanaan penempata petugas lapangan	Negatif	Aplikasi SILAT yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Akses aplikasi yang masih menggunakan setting/password default (tidak di update).	Keamanan SPBE	- Kurangnya kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan. - Informasi yang tersampaikan kepada publik maupun pihak terkait tidak akurat	Reputasi	- Sudah adanya kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi - Saat pengembangan aplikasi sudah berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarak	4	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	13	Sedang	Ya	
						Aplikasi belum di uji melalui penetration test.	Proyek pembangunan atau pengembangan sistem											
						Pengelola aplikasi belum memahami mengenai keamanan data aplikasi.	SDM SPBE											
				Negatif	Aplikasi kurang dapat mengakomodir kebutuhan dalam bekerja	Fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan instansi.	Aplikasi SPBE	- Pekerjaan instansi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tidak terlaksana secara efektif - Menurunnya pencapaian kinerja organisasi	Kinerja	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengembangan aplikasi.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarak	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
						Tingkat keamanan data yang diunggah pada aplikasi relatif rendah.	Keamanan SPBE											
						Seringn terjadinya kendala dalam pengaksesan dan operasional layanan aplikasi.	Aplikasi SPBE											



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG											Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023							
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024											Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG							
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Negatif	Aplikasi tidak mendapatkan data update dari pengelola aplikasi	Aplikasi yang dikembangkan tidak di sosialisasikan sebelumnya kepada para pemangku kepentingan.	Aplikasi SPBE	- Aplikasi tidak mendapatkan data terbaru, masing-masing pemilik data memiliki data sendiri-sendiri. - Aplikasi yang dikembangkan kurang dapat dimanfaatkan	Operasional dan Aset TIK	Sudah adanya rancangan pengembangan aplikasi	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	11	Rendah	Tidak	
		Terpenuhinya jumlah kapasitas Angkutan Umum Sistem Transit	Mengelola Informasi terkait SKPD Dinas Perhubungan	Negatif	Informasi profil Dinas Perhubungan yang dimuat dalam web SKPD tidak update	Pelaksanaan update data profil belum terprogram	Rencana dan Anggaran	Informasi keterbukaan publik instansi kurang baik.	Kinerja	Jadwal update profil telah disusun.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
						Pengelola Website belum menerima data terkini yang akan dituangkan dalam website.	Data dan Informasi			Dalam kontrak kerjasama dengan vendor sudah diatur terkait service after sales.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate profil belum mengetahui jadwal update data.	SDM SPBE			Sudah ada transfer knowledge bagi SDM yang baru menduduki jabatan baru.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Kegiatan terhambat, kurang efektif	11	Rendah	Tidak	
		Rasio Kecelakaan Lalu Lintas		Negatif	Rusaknya konfigurasi sistem pada Aplikasi/ Web/ Sistem Informasi	Security Awareness dari User yang masih rendah	Keamanan SPBE	- Beberapa data tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan akibat Virus dan Malware - Rawan Pencurian Data	Layanan data dan informasi	- Mensosialisasikan secara rutin kepada User tentang Security Awareness - Melakukan Vulnerability Assesment secara berkala	3	Kadang-kadang/ Mungkin Terjadi	4		17	Tinggi	Ya	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	Terkelolanya laporan, progres dan informasi Dinas PUPR secara optimal	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Mengelola layanan pelaksanaan penganggaran, monitoring dan rencana kegiatan (Web Dinas PUPR)	Negatif	Laporan kegiatan belum terunggah atau terupdate	Format dokumen tidak sesuai	Data dan Informasi	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran menurun	Layanan Organisasi	Koordinasi dan korespondensi dengan pihak terkait serta sosialisasil terkait tata cara unggah dokumen laporan kegiatan	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	8
		Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)		Negatif	Informasi jadwal monitoring pelaksanaan penganggaran kegiatan dan rencana yang tidak update	SDM yang bertanggung jawab dalam update informasi masih kurang kompetensinya	SDM SPBE	Evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan secara transparan dan sistematis.	Layanan Organisasi	Melakukan pelatihan terkait teknis tata cara pengelolaan jadwal monitoring penganggaran, kegiatan dan rencana	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	7



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara				PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Nilai hasil evaluasi SAKIP		Negatif	Informasi progres dan monitoring belum sesuai dengan kondisi terkini	SDM yang bertanggung jawab dalam update informasi masih kurang kompetensinya	SDM SPBE	Evaluasi kinerja proyek secara transparan, sistematis dan objektif tidak dapat dilakukan dengan baik.	Layanan Organisasi	Melakukan pelatihan terkait teknis tata cara update jadwal monitoring	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	6
						Penanggung jawab proyek atau pihak terkait tidak memberikan info terkait perubahan atau update jadwal	Data dan Informasi			Koordinasi dan korespondensi dengan pihak terkait	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	5
		Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	Mengelola Informasi terkait layanan pengaduan yang diperoleh dari Aplikasi LAKSA	Negatif	Terdapat pengaduan yang salah sasaran, atau bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR	Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait kewenangan infrastruktur yang ada di Kota Tangerang	Data dan Informasi	Belum terlayannya pengaduan masyarakat	Layanan Organisasi	Melakukan sosialisasi terkait kewenangan infrastruktur	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	11	Rendah	Tidak	4
		Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik								Berkoordinasi dengan instansi terkait perihal kewenangan infrastruktur	4	Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	16	Tinggi	Ya	1
		Prosentase Penurunan luas banjir dan genangan																
		Luas kesesuaian pemanfaatan ruang	Mengelola informasi terkait Persebaran Menara (SINDAMENDEL)	Negatif	Penambahan, penghapusan serta perubahan informasi belum aktual	Informasi dari pihak terkait belum tersampaikan dengan baik	Data dan Informasi	Pengelolaan serta pemetaan persebaran menjadi tidak efektif, efisien serta sistematis	Layanan Organisasi	Koordinasi dan korespondensi dengan pihak terkait	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	2
						SDM yang ditugaskan dalam mengupdate informasi masih kurang kompetensinya serta jadwal update data belum dilakukan secara berkala	SDM SPBE											
			Mengelola layanan Kesesuaian Ruang Kota (Perizinan Online)	Negatif	Belum sesuainya dokumen pengajuan dari pemohon	Informasi dari pihak terkait belum tersampaikan dengan baik	Data dan Informasi	Keterlambatan dalam mengeluarkan rekomendasi teknis	Layanan Organisasi	Melakukan sosialisasi terkait kebutuhan dokumen yang dipersyaratkan	3	Kadang-kadang/mungkin terjadi	3	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	14	Sedang	Ya	3
Satuan Polisi Pamong Praja																		
1	Terkelolanya informasi terkait Satpol PP	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Mengelola informasi mengenai Kendali mutu SPJ Satpol PP	Negatif	Informasi tidak terupdate secara optimal	SDM yang ditugaskan dalam mengupdate masih kurang kompetensinya.	SDM SPBE	Nilai informasi keterbukaan publik menurun.	Kinerja	Melakukan pelatihan terkait teknis tata cara update data	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	7	Rendah	Tidak	
			Mengelola informasi terkait Satpol PP	Negatif		Pelaksanaan update data yang belum tersusun secara berkala	Rencana dan Anggaran			Melakukan penjadwalan update data secara berkala	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kegiatan terhambat, kurang efisien	7	Rendah	Tidak	



PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROFIL RISIKO SPBE PEMERINTAH KOTA TANGERANG																		
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG										Tgl. Asistensi/Pengisian Kertas Kerja : September 2023								
Periode Penerapan : September 2023 - Agustus 2024										Daftar Terwawancara : PEMERINTAH KOTA TANGERANG								
NO	SASARAN SPBE	INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN PENGELOLAAN	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO						EVALUASI RISIKO		
				JENIS RISIKO SPBE	PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB	KATEGORI	DAMPAK	AREA DAMPAK	SISTEM PENGENDALIAN	KEMUNGKINAN		DAMPAK		NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kecamatan Karawaci																		
1	Mengelola informasi terkait Kecamatan Karawaci	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Terkelolanya sistem informasi terkait Kecamatan Karawaci	Negatif	Belum semua warga menggunakan Web untuk mencari informasi kecamatan	Kurang meratanya sosialisasi penggunaan Web kecamatan	Layanan SPBE	Web menjadi tidak berguna karena penyampaian informasi masih manual	Layanan Organisasi	Melakukan Sosialisasi terkait penggunaan Web.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	
				Negatif	Data informasi belum terupdate	Kurangnya perhatian setiap kecamatan untuk memperbaharui informasinya	Aplikasi SPBE	Kurang percayanya warga kepada kecamatan karena belum adanya bukti kegiatan terbaru	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	11	Rendah	Tidak	
		Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu		Negatif	Sistem informasi kurang mendorong atensi dari warga.	Warga lebih memilih datang untuk bertanya	Inovasi	Web kurang bermanfaat sebagai sumber informasi (informasi disampaikan secara manual)	Layanan Organisasi	Melakukan Sosialisasi terkait penggunaan Web.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	13	Sedang	Ya	
Kecamatan Pinang																		
1	Mengelola informasi terkait Kecamatan pinang	IKM Pelayanan Kecamatan	Terkelolanya sistem informasi terkait Kecamatan Pinang	Negatif	Belum semua warga menggunakan Web untuk mencari informasi kecamatan	Kurang meratanya sosialisasi penggunaan Web kecamatan	Layanan SPBE	Web menjadi tidak berguna karena penyampaian informasi masih manual	Layanan Organisasi	Sudah melakukan Sosialisasi terkait penggunaan Web.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	8	rendah	Ya	
				Negatif	Data informasi belum terupdate	Kurangnya perhatian setiap kecamatan untuk memperbaharui informasinya	Aplikasi SPBE	Kurang percayanya warga kepada kecamatan karena belum adanya bukti kegiatan terbaru	Reputasi	Melakukan pembaharuan data rutin setiap bulannya	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	3	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	6	rendah	Tidak	
				Negatif	Sistem informasi kurang mendorong atensi dari warga.	Warga lebih memilih datang untuk bertanya	Inovasi	Web kurang bermanfaat sebagai sumber informasi (informasi disampaikan secara manual)	Layanan Organisasi	Sudah melakukan Sosialisasi terkait penggunaan Web.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	8	rendah	Ya	
	Mengelola informasi terkait Kecamatan pinang	Tingkat Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan Tepat Waktu	Terkelolanya sistem informasi terkait Kecamatan Pinang	Negatif	Belum semua warga memahami aplikasi terkait PATEN Kecamatan	Kurang meratanya sosialisasi penggunaan Aplikasi terkait PATEN kecamatan	Layanan SPBE	Aplikasi menjadi tidak berguna karena penyampaian informasi masih manual	Layanan Organisasi	Sudah melakukan Sosialisasi terkait penggunaan Web.	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	8	rendah	Ya	
				Negatif	Sistem informasi terkait aplikasi yang menyangkut kegiatan PATEN Kecamatan kurang mendorong atensi dari warga.	Warga lebih memilih datang untuk bertanya ke kecamatan dan kelurahan	Aplikasi SPBE	Aplikasi terkait kegiatan PATEN Kecamatan jadi tidak digunakan secara maksimal	Layanan Organisasi	Sudah melakukan Sosialisasi via Web dan Media Sosial terkait penggunaan Aplikasi terkait kegiatan PATEN	2	Kemungkinan Kecil/ Jarang	4	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	8	rendah	Ya	



3. Rencana Tindak Lanjut Risiko SPBE Pemerintah Kota Tangerang

Kertas Kerja Penanganan Risiko PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang								
Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG				Tgl. Penyusunan : September 2023				
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024				Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG				
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sekretariat Daerah								
1	Adanya error pada aplikasi SPSE	Eskalasi Risiko	Melakukan koordinasi dengan LKPP selaku pemilik resiko	Bug system dapat ditangani	Setiap kejadian	Setda	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Tidak ada standarisasi pelaksanaan penggunaan aplikasi/ Sistem Informasi.	Mitigasi Risiko	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi	Rekapitulasi SOP	Tahun anggaran berjalan	Setda	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Proses <i>under maintenance</i> yang lama	Penghindaran Risiko	Melakukan perekrutan SDM baru sesuai kompetensi	Penambahan SDM	Tahun anggaran berjalan	Setda	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
4	Aplikasi Bang Jaka tidak dapat diakses	Eskalasi Risiko	Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak ada gangguan aplikasi Bang Jaka	Setiap kejadian	Setda	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
5	Ada proses yang belum terakomodir dalam aplikasi Bang Jaka	Penghindaran Risiko	Melakukan perekrutan SDM baru sesuai kompetensi	Penambahan SDM	Tahun anggaran berjalan	Setda	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
6	Satu personel banyak mengawaki/ mengelola aplikasi/sistem	Transfer Risiko	Melakukan perekrutan SDM baru	Penambahan SDM	Tahun anggaran berjalan	Setda	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Inspektorat								
1	Implementasi e-Audit tidak dilakukan secara optimal	Penghindaran Risiko	Gunakan sistem umpan balik yang memungkinkan pengguna memberikan saran dan masukan tentang aplikasi	Menambah pengetahuan SDM terkait pengelolaan E-audit	Tahun anggaran berjalan	Inspektorat	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Ketidaksesuaian antara data aktualnya dengan data di Web	Penghindaran Risiko	Melakukan verifikasi data sebelum pemuktahiran pada web	Dokumen hasil verifikasi dan/atau cek data	Tahun anggaran berjalan	Inspektorat	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Sekertariat DPRD								
1	Aspirasi berupa usulan kegiatan pembangunan berupa data dan informasi belum bisa diakses oleh masyarakat melalui website Sekretariat DPRD	Transfer Risiko	Melakukan pembagian tugas terhadap personel lainnya	Bertambah Sumber Daya Manusia	Tahun anggaran berjalan	Sekertariat DPRD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Kurangnya informasi tentang bagaimana cara ke salah satu kampung tematik menggunakan transportasi umum	Penghindaran Risiko	Tambahkan fitur, dapat berupa fitur pencarian informasi yang lebih detail atau fitur yang dapat menghasilkan informasi dengan lebih spesifik	Penambahan fitur dan pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	BAPPEDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Informasi kurang lengkap atau spesifik	Penghindaran Risiko	Membuka forum kritik atau saran masukan kepada pengguna untuk melihat timbal balik dari pengguna	Penambahan fitur dan pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	BAPPEDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Informasi Fasilitas belum di <i>update</i>	Penghindaran Risiko	Mengadakan evaluasi dan pengembangan secara terjadwal dan prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi pada website	Kegiatan evaluasi dan pengembangan secara rutin	Tahun anggaran berjalan	BAPPEDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Sاتفung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Adanya kesamaan data atau tumpang tindih data	Penghindaran Risiko	Gunakan sistem manajemen data yang terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap data hanya terdapat pada satu sumber data	Penambahan fitur atau sistem integrasi untuk mengelola data	Tahun anggaran berjalan	BAPPEDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
5	Hilangnya data inputan	Penghindaran Risiko	Gunakan sistem validasi data pada sistem atau aplikasi yang digunakan untuk memastikan bahwa data inputan yang dimasukkan sudah benar dan <i>valid</i>	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	BAPPEDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Badan Pendapatan Daerah								
1	Tidak bisa mengakses web karena IP akses terblokir	Penghindaran Risiko	gunakan VPN untuk mengakses web yang terblokir	Penambahan sistem untuk mengelola <i>web</i>	Tahun anggaran berjalan	BAPENDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	<i>Web</i> tidak dapat diakses karena domain kadaluarsa	Transfer Risiko	Hubungi pemilik domain untuk menanyakan apakah domain masih dapat diperpanjang atau tidak	Data domain	Tahun anggaran berjalan	BAPENDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	<i>Error</i> saat penginputan	Transfer Risiko	Hubungi penyedia layanan <i>database</i> untuk meminta bantuan atau upgrade layanan untuk mengatasi masalah <i>database</i> yang penuh.	Pembaharuan server <i>database</i>	Tahun anggaran berjalan	BAPENDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rusaknya konfigurasi sistem	Transfer Risiko	Menjalin kerjasama dengan pihak pengembang Aplikasi atau cari bantuan ahli atau konsultan teknologi untuk membantu memperbaiki kerusakan konfigurasi sistem	Kerja sama dan peningkatan kinerja SDM	Tahun anggaran berjalan	BAPENDA	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1	Hilangnya data inputan	Mitigasi Risiko	Gunakan sistem validasi data pada sistem atau aplikasi yang digunakan untuk memastikan bahwa data inputan yang dimasukkan sudah benar dan valid	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	BPKD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
1	Belum optimalnya penginputan data kompetensi (rekam jejak kediklatan dan sertifikasi ASN)	Penghindaran Risiko	penyusunan aplikasi SIM DIKLAT ASN	Data rekam jejak Kompetensi ASN per Individu	Tahun anggaran berjalan	BKPSDM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Belum optimalnya pengawasan internal OPD terhadap para pegawai.	Penghindaran Risiko	Meningkatkan kualitas supervisi	Kualitas kinerja supervisi lebih maksimal	Tahun anggaran berjalan	BKPSDM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Belum optimalnya perangkat sub bagian umum dan kepegawaian tiap OPD dalam memahami prosedur pengisian SKP online.	Penghindaran Risiko	Pemberian panduan dan petunjuk dapat berupa buku manual, tutorial video, atau infografis yang mudah dipahami	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	BKPSDM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Sاتفung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Informasi terkait formasi SDM dalam sistem kurang spesifik.	Penghindaran Risiko	Membuka forum kritik atau saran masukan kepada pengguna untuk melihat timbal balik dari pengguna	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	BKPSDM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
5	Belum optimalnya penyusunan penilaian kompetensi dengan pengisian jabatan	Penghindaran Risiko	Melakukan peningkatan transparansi dalam sistem penilaian kompetensi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang cukup dan jelas kepada calon pelamar mengenai kriteria penilaian dan prosedur penilaian	Perataan pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi	Tahun anggaran berjalan	BKPSDM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
6	Belum optimalnya pengembangan kompetensi dikareanakan usulan peserta diklat yang diajukan tiap OPD tidak memenuhi sasaran	Penghindaran Risiko	Mengukur dan memantau hasil diklat khusus yang lebih sesuai dengan sasaran dan kebutuhan kompetensi yang diharapkan dapat melibatkan peserta diklat, pimpinan OPD, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan diklat	Meningkatnya kualitas peserta diklat	Tahun anggaran berjalan	BKPSDM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Data serta informasi terkini Ormas yang telah terdaftar belum terupdate secara optimal.	Penghindaran Risiko	Menambahkan fitur <i>feedback</i> atau umpan balik dari pengguna	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	KESBANGPOL	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah								



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Data kejadian bencana, kebakaran, dan kedaruratan belum update	Penghindaran Risiko	Membuat sistem lumbung data internal BPBD untuk mencatat dan melaporkan data secara real time	Lumbung data internal BPBD	Tahun anggaran berjalan	BPBD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Data korban bencana, kebakaran dan kedaruratan lainnya belum update	Penghindaran Risiko	Membuat sistem lumbung data internal BPBD untuk mencatat dan melaporkan data secara real time	Lumbung data internal BPBD	Tahun anggaran berjalan	BPBD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Data jumlah rumah yang terdampak bencana belum update	Penghindaran Risiko	Membuat sistem lumbung data internal BPBD untuk mencatat dan melaporkan data secara real time	Lumbung data internal BPBD	Tahun anggaran berjalan	BPBD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
4	Data respon time rate kebakaran belum update	Penghindaran Risiko	Membuat sistem pencatatan respon time secara otomatis (terkoneksi dengan peralatan di lapangan)	Sistem pencatatan otomatis pada mobil pemadam kebakaran	Tahun anggaran berjalan	BPBD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
5	Data kegiatan sosialisasi dan pelatihan belum update	Penghindaran Risiko	Membuat sistem lumbung data internal BPBD untuk mencatat dan melaporkan data secara real time	Lumbung data internal BPBD	Tahun anggaran berjalan	BPBD	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Komunikasi dan Informatika								



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Server down	Mitigasi Risiko	Pengadaan colocation/DRC sebagai server backup	Layanan dapat berjalan normal	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Web tidak dapat diakses	Mitigasi Risiko	Penanganan permasalahan sistem webserver seperti restart service aplikasi dan atau restart server	Web dapat diakses	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Email Phising	Mitigasi Risiko	1. Penguncian Email yang terdampak Phising; 2. Monitoring Proteksi SPAM, Filtering Email masuk dan Keluar, Penanganan Blacklist sumber Phising; 3. Pembersihan Konten Phising dan Atur ulang Password terdampang Phising 4. Memberi pengarahan untuk meningkatkan Kesadaran Keamanan digital Penggunaan Email 5. Serta terima Email kepada pengguna	Email dapat digunakan dengan normal	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
4	Aplikasi email tidak Update	Penerimaan Resiko	Monitoring Proteksi SPAM, dan Antivirus Email mencari alternatif update Patch Komunitas dari sumber terpercaya jika tersedia	Aplikasi tidak update akan tetapi di monitoring penggunaan Server email.	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Evaluasi Alternatif aplikasi Email dengan sumber terbuka	Alternatif Email Server Opensource				
5	Kerusakan perangkat keras	Mitigasi Risiko	Menetapkan dan mengelola prosedur pemeliharaan perangkat keras secara berkala	Kerusakan perangkat keras dapat diminimalisir	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
6	Listrik Padam	Transfer Risiko	Pengadaan genset yang memadai oleh pengelola gedung serta peningkatan kapasitas UPS oleh Diskominfo	Layanan dapat berjalan normal	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
7	Adanya celah pada pemrograman aplikasi yang mudah diretas pihak luar	Mitigasi Risiko	1. Melakukan pengujian aplikasi; 2. Melakukan monitoring pada aplikasi	Laporan pengujian, Laporan monitoring	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
8	Database hilang	Mitigasi Risiko	Menetapkan dan mengelola prosedur backup database secara berkala	Layanan dapat berjalan normal	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
9	Kerahasiaan Data Bocor	Mitigasi Risiko	Membuat NDA untuk tenaga outsourcing terkait keamanan informasi	Kerahasiaan data dan perlindungan data terkendali	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Sarfung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sarpras untuk publikasi masih dibatasi dari bagian angrgan dan TKDN	Mitigasi Risiko	Membuat daftar ceklist sarpras yang terdata di TKDN agar dapat dianggarkan.	Sarpras pendukung dapat dianggarkan	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
11	Kurang maksimalnya data pendukung dari OPD	Mitigasi Risiko	Membuat rencana untuk memantau dan mengevaluasi situasi secara berkala.	Mengurangi dampak negatif dari kekurangan data pendukung	Tahun anggaran berjalan	DISKOMINFO	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan	Penghindaran Risiko	- Melakukan penyebaran informasi tatacara penggunaan sobat dukcapil baik melalui sosialisasi baik luring maupun daring (website, media sosial, zoom) - Melakukan evaluasi website/aplikasi sobat dukcapil apabila diperlukan	- laporan pelaksanaan sosialisasi sobat dukcapil - laporan evaluasi website/aplikasi sobat dukcapil	Tahun anggaran berjalan	DUKCAPIL	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi	Penghindaran Risiko	Melakukan pemeliharaan jaringan dan perangkat keras	Jaringan dan perangkat keras yang terpelihara	Tahun anggaran berjalan	DUKCAPIL	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Data penduduk yang tidak sesuai	Penghindaran Risiko	- Pelaksanaan evaluasi dan bimbingan operator SIAK terkait pengelolaan administrasi kependudukan - Melakukan evaluasi standar operasional	- laporan pelaksanaan evaluasi dan bimbingan operator SIAK - laporan evaluasi standar operasional	Tahun anggaran berjalan	DUKCAPIL	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
1	Aplikasi tidak dapat diakses	Penghindaran Risiko	Melakukan pemasangan VPN pada komputer perpustakaan agar bisa diakses	Server bisa diakses pengunjung secara lokal di komputer perpustakaan daerah	Tahun anggaran berjalan	Perpustakaan dan Arsip Daerah	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	SKPD tidak bisa mengakses link yang diberikan	Penghindaran Risiko	Pelakukan pendampingan pengisian penilaian internal pengawasan kearsipan ke SKPD di Kota Tangerang	Data penilaian mandiri SKPD di Kota Tangerang	Tahun anggaran berjalan	Perpustakaan dan Arsip Daerah	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Sosial								
1	Data Kemiskinan tidak sesuai dengan realita	Penghindaran Risiko	Buat sebuah komite pengawasan independen untuk memantau dan mengevaluasi data kemiskinan secara reguler dan menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki data yang tidak akurat	Komite pengawasan dan data yang sesuai dengan keadaan lapangan	Tahun anggaran berjalan	DINSOS	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Belum terupdatenya berita kegiatan Dinsos	Penghindaran Risiko	Mengendakan evaluasi dan pengembangan secara terjadwal dan prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi pada website	Data berita kegiatan yang terupdate	Tahun anggaran berjalan	DINSOS	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Kesehatan								



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tidak updatenya data ketersediaan kasur di website	Penghindaran Risiko	Mengendakan evaluasi dan pengembangan secara terjadwal dan prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi pada website	Data ketersediaan kasur yang terupdate	Tahun anggaran berjalan	DINKES	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Tidak diupdatenya data keuangan Dinas Kesehatan	Penghindaran Risiko	Pertimbangkan penggunaan teknologi yang tepat, seperti perangkat lunak akuntansi, untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DINKES	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Tidak bisa mendaftar vaksinasi	Penghindaran Risiko	Membuat cara pendaftaran vaksin lainnya.	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DINKES	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
4	Tidak bisa mengedit data input peserta	Penghindaran Risiko	Membuat sistem alternatif dengan permintaan pengeditan beserta alasan dan rincian yang jelas mengapa data input perlu di edit	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DINKES	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Pendidikan								
1	Hilangnya data atau tidak lengkapnya Data	Penghindaran Risiko	Menggunakan teknologi RAID: RAID (<i>Redundant Array of Inexpensive Disks</i>) adalah teknologi penyimpanan yang dapat menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DISDIK	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Tampilan Dashboard yang masih membingungkan	Penghindaran Risiko	Menyediakan panduan atau bantuan, Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan Melakukan evaluasi <i>usability</i>	Penambahan fitur yang memudahkan pengguna	Tahun anggaran berjalan	DISDIK	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Tampilan UI yang masih membingungkan	Penghindaran Risiko	Menyediakan panduan atau bantuan, Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan Melakukan evaluasi <i>usability</i>	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DP3AP2KB	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Masih ada data dari beberapa kewilayahan yang susah untuk diunggah	Penghindaran Risiko	Melakukan Kunjungan rutin untuk membantu melakukan pengunggahan data di beberapa wilayah	Data terkelola secara merata di seluruh wilayah	Tahun anggaran berjalan	DP3AP2KB	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga								
1	Pembayaran dari Wajib Retribusi Tidak Terdeteksi oleh aplikasi Timsport	Transfer Risiko	Melakukan laporan kepada Bank BJB	Pembayaran uang sewa dicallback oleh BJB agar terbaca oleh sistem TIMSPORT	Tahun anggaran berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pembayaran dari Wajib Retribusi Tidak Sampai ke Rekening Penampungan	Transfer Risiko	Melakukan laporan kepada Bank BJB	Biaya sewa dikembalikan ke user (penyewa)	Tahun anggaran berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Sarpras Tidak Dapat Digunakan, sedangkan jadwal sudah di booking	Mitigasi Risiko	Melakukan penjadwalan ulang	User(penyewa) dapat memakai Sarpras OR yang diinginkan	Tahun anggaran berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
4	Data informasi belum terupdate	Mitigasi Risiko	Selalu mengingatkan admin web untuk memperbarui data	Website selalu terbaharui	Tahun anggaran berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Ketenagakerjaan								
1	Terlambat dalam menyampaikan informasi lowongan pada <i>job fair online</i>	Penghindaran Risiko	Menghubungi peserta <i>job fair online</i> , dapat dilakukan melalui <i>email</i> , telepon, atau media sosial.	Data peserta yang masih berminat melakukan <i>job fair</i>	Tahun anggaran berjalan	DISNAKER	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Penempatan tenaga kerja tidak dipetakan dengan baik	Penghindaran Risiko	Perlu mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja yang ada	Perataan pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi	Tahun anggaran berjalan	DISNAKER	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Informasi profil Disnaker yang dimuat dalam <i>web SKPD</i> tidak <i>update</i>	Penghindaran Risiko	Mengagendakan evaluasi dan pengembangan secara terjadwal dan prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi pada <i>website</i>	Data informasi yang terupdate	Tahun anggaran berjalan	DISNAKER	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM								
1	Data dan informasi yang dimuat PPID tidak lengkap	Penghindaran Risiko	Menyediakan alternatif lain seperti membuat google form untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.	Penambahan sistem untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan	Tahun anggaran berjalan	DISPERINDA GKOP-UKM	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
1	Perizinan <i>online</i> tidak menyederhanakan Birokrasi	Penghindaran Risiko	Membuat panduan atau petunjuk yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DPMPTSP	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Aplikasi tidak user <i>friendly</i>	Penghindaran Risiko	Menyediakan panduan atau bantuan dan Mengumpulkan umpan balik dari pengguna	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DPMPTSP	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
1	Aplikasi SIDATA yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Mitigasi Risiko	Pasang <i>antivirus</i> pada <i>server</i> dan <i>client</i> untuk memeriksa dan menghapus <i>virus</i> dan <i>malware</i> yang dapat mengancam keamanan <i>web</i>	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DINAS PERKIMTAN	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Lingkungan Hidup								
1	Portal web Green Kota Tangerang tidak mendapatkan data <i>update</i> rutin dari pihak terkait	Mitigasi Risiko	Mencari sumber data alternatif yang berasal dari pihak lain yang mempublikasikan data yang serupa atau dari sumber data yang dikelola secara mandiri	Data terbaru	Tahun anggaran berjalan	DLH	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Data dalam Sistem Informasi Lingkungan Pengolahan Limbah B3 terpisah-pisah dan sulit untuk melakukan integrasi data.	Mitigasi Risiko	Perlu ditetapkan standar data yang seragam dan konsisten dalam pengumpulan dan penyimpanan data	Dokumen yang dikelola secara konsisten	Tahun anggaran berjalan	DLH	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Kekurangan SDM yang paham menangani <i>troubleshooting</i> dan pengembangan portal sistem informasi lingkungan.	Transfer Risiko	Kerjasama dengan pihak eksternal dapat membantu dalam menangani <i>troubleshooting</i> , pengembangan portal dan melakukan pelatihan pemeliharaan portal	Kerja sama dan peningkatan kinerja SDM	Tahun anggaran berjalan	DLH	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
Dinas Perhubungan								
1	Rusaknya konfigurasi sistem pada Aplikasi/ Web/ Sistem Informasi	Transfer Risiko	Menjalin kerjasama dengan pihak pengembang Aplikasi atau cari bantuan ahli atau konsultan teknologi untuk membantu memperbaiki kerusakan konfigurasi sistem	Kerja sama dan peningkatan kinerja SDM	Tahun anggaran berjalan	DISHUB	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Aplikasi SILAT yang dibangun/dikembangkan masih rentan mengalami serangan siber.	Mitigasi Risiko	Pasang antivirus pada <i>server</i> dan <i>client</i> untuk memeriksa dan menghapus virus dan malware yang dapat mengancam keamanan <i>web</i>	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DISHUB	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



**Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang**

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Safung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Terdapat pengaduan yang salah sasaran, atau bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR	Mitigasi Risiko	melaksanakan sosialisasi menggunakan media-media sosial secara konsisten	Informasi terkait kewenangan infrastruktur	Tahun anggaran berjalan	DINAS PUPR	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Penambahan, penghapusan serta perubahan informasi belum aktual	Mitigasi Risiko	Terapkan validasi data pada sistem untuk memastikan data yang dimasukkan valid dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan	Penambahan fitur atau pembaharuan sistem	Tahun anggaran berjalan	DINAS PUPR	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
3	Belum sesuaiya dokumen pengajuan dari pemohon	Mitigasi Risiko	melaksanakan sosialisasi menggunakan media-media sosial secara konsisten	Informasi terkait persyaratan dokumen	Tahun anggaran berjalan	DINAS PUPR	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	



Kertas Kerja Penanganan Risiko
PROFIL RISIKO SPBE Pemerintah Kota Tangerang

Nama Pemilik Risiko : PEMERINTAH KOTA TANGERANG		Tgl. Penyusunan : September 2023						
Periode Penerapan : September 2023 – Agustus 2024		Tim Penyusun : PEMERINTAH KOTA TANGERANG						
NO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
		OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Satfung secara struktural)	Biaya/Anggaran (bila ada)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Karawaci								
1	Belum semua warga menggunakan <i>Web</i> untuk mencari informasi kecamatan	Penghindaran Risiko	Melibatkan warga dalam proses pengembangan dan pemeliharaan <i>web</i> , sehingga masyarakat merasa memiliki dan tertarik untuk menggunakan <i>web</i> sebagai sumber informasi.	Ketertarikan dan minat User menggunakan sistem informasi	Tahun anggaran berjalan	Karawaci	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	
2	Sistem informasi kurang mendorong atensi dari warga.	Penerimaan Risiko	Gunakan <i>web</i> sebagai ajang atau perantara Event lokal, sehingga masyarakat bisa menggunakan <i>web</i>	Bertambahnya <i>user</i> baru	Tahun anggaran berjalan	Karawaci	Disesuaikan dengan kebutuhan anggaran	

WALIKOTA TANGERANG



ARIFF R. WISMANSYAH